

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31									
HALAMAN : 6											TAHUN 2005

## Kilang Langit Biru Balongan Telan Investasi US\$ 288 Juta

INDRAMAYU – Investasi proyek kilang Langit Biru Balongan (LBB) Indramayu, Jawa Barat total mencapai US\$ 228 juta. Dari jumlah itu, US\$ 75,025 juta berasal dari PT Pertamina, dan sisanya US\$ 152,975 juta dari PT Rekayasa Industri dan perusahaan kontraktor Jepang, Toyo Engineering Corp.

Pembangunan proyek LBB didanai dari pinjaman komersial *trustee borrowing scheme* yang akan dikembalikan dalam bentuk *product offtake* (LSWR dan *decant oil*). Berbagai pinjaman ini meliputi *loan agreement*, *purchase and sales agreement*, *trustee paying agreement*, dan *operator agreement*.

"Proyek LBB yang berlokasi di area Kilang Pertamina UP (Unit pengolahan) VI Balongan ini bertujuan untuk menghasilkan bensin tanpa timbal (TT) sehingga dapat menekan emisi timbal yang berasal dari

kendaraan bermotor," ujar *General Manager* Kilang Pertamina UP VI Balongan Harijanto K di Indramayu, Kamis (25/8).

Secara keseluruhan, kilang berkapasitas 52 ribu barel per hari (BPH) ini sudah mulai beroperasi sejak Juni 2005, kendati peresmian baru dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Indramayu, Minggu (28/8).

Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan produksi bensin kilang Balongan sebesar 47 ribu BPH dengan nilai oktan 92,8 dan produksi elpiji sebesar 200 ton per hari. "Mulai Juni, kilang ini sudah mulai beroperasi meskipun masih tahap *start up* sebesar 190 juta barel minyak atau setara dengan 300 juta liter," imbuhnya.

Dia menambahkan, kilang itu memiliki beberapa fasilitas, di antaranya *naphtha drotreater* berkapasitas 52 ribu BPH,

*platformer* (29 ribu BPH), penex unit (23 ribu BPH), fasilitas utilitas, *offsite* dan fasilitas pendukung lainnya.

"Dengan begitu, hasil produk kilang ini nantinya akan berupa bensin TT, HOMC (*high oktan mogas component*) yang akan dikirimkan ke unit pengolahan lainnya guna menaikkan nilai oktan dan elpiji," tuturnya.

Meskipun begitu, Pertamina harus mendatangkan bahan baku naphtha untuk kilang LBB dari kilang-kilang Pertamina lainnya, seperti UP III (Plaju), UP IV (Cilacap), dan UP V (Balikpapan).

Semula, proyek ini berlokasi di UP III Cilacap karena adanya kelebihan naphtha yang menjadi bahan baku proyek langit biru ini. Hanya saja, proyek ini kemudian dialihkan ke kilang UP VI Balongan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas kilang ini bila dibadung di UP III. Selain

itu, lokasi UP VI Balongan pun lebih memadai dari segi biaya, pola, dan sarana pengapalan bahan naphtha serta distribusi bensin ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Salah satu alasan kenapa kilang ini harus dibangun, di antaranya untuk mengurangi impor HOMC yang mencapai 12 juta barel per tahunnya. Karena HOMC ini diperlukan untuk menaikkan nilai oktan bensin dan memaksimalkan produk-produk Pertamina seperti naphtha untuk industri kimia dan BBM," lanjutnya.

Ia mengklaim, Pertamina bisa menghemat devisa dan biaya impor HOMC hingga 11 juta barel per tahun. Dengan kata lain, Pertamina bisa menghemat hingga US\$ 464 juta per tahunnya dengan asumsi harga minyak dunia US\$ 47 per barel atau US\$ 597 juta per tahun untuk harga minyak US\$ 60 per barel. (c63)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 1											TAHUN 2005

KRISIS BBM

## Presiden Tawarkan Lima Solusi

INDRAMAYU, KOMPAS — Perlu kebijakan yang mendasar, strategis, dan bersifat jangka panjang untuk dapat keluar dari krisis bahan bakar minyak. Pasalnya, kelangkaan BBM menyebabkan kenaikan harga sehingga subsidi yang harus dianggarkan pemerintah semakin bertambah.

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peresmian Kilang Langit Biru di Unit Pengolahan VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (28/8). Kenaikan harga minyak dunia memengaruhi APBN.

Menurut Presiden, pada tahun 2005 anggaran yang disediakan untuk subsidi BBM mencapai Rp 140 triliun atau sekitar seperempat APBN tahun 2005.

Presiden menawarkan lima solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini, yaitu tingkatkan produksi minyak dalam negeri, pembangunan kilang baru, menentukan besaran dan siapa yang berhak menerima subsidi, mencari solusi perihal harga minyak yang tepat, dan diversifikasi bahan bakar alternatif.

"Saat ini 45 persen persediaan BBM dalam negeri masih mengandalkan pasokan impor. Salah satu hal yang menyebabkan keadaan itu adalah sedikitnya kilang minyak di Indonesia," katanya.

Adanya kilang baru di UP VI Balongan, kata Presiden mencontohkan, ketergantungan terhadap minyak impor dapat ditekan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pengoperasian Proyek Langit Biru Balongan diperkirakan menghemat devisa dan keuangan pemerintah sebesar satu miliar dollar AS pada tingkat harga *high octane mogas component* sebesar 84 dollar AS per barrel. Pasalnya, PLBB memiliki kapasitas produksi 47.000 barrel per hari (premium TT dengan oktan 92,8) dan 200.000 ton *liquified petroleum gas* (LPG).

Hal itu mampu menggantikan 12 juta barrel per tahun yang selama ini diimpor untuk memenuhi produksi bensin tanpa timbal di Indonesia. (D01)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

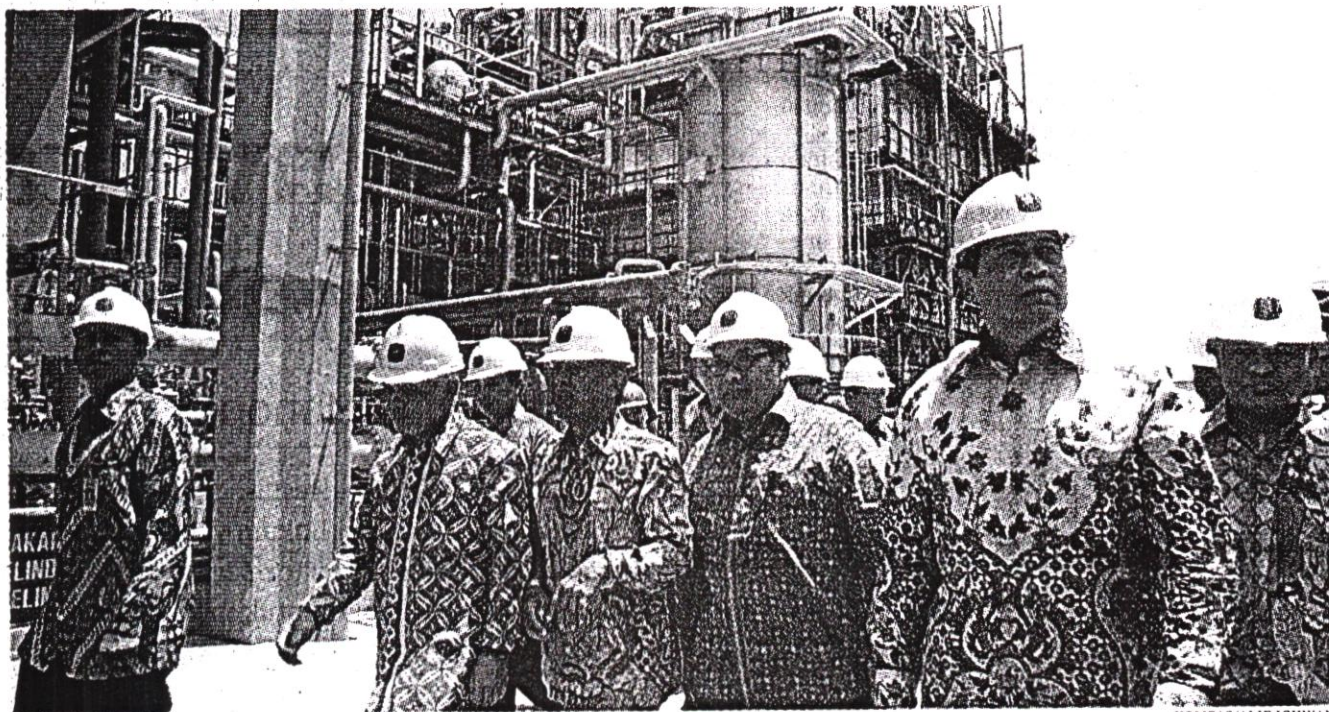
GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2005

### Meninjau Kilang Balongan



KOMPAS/ALIF ICHWAN

Presiden  
Susilo  
Bambang  
Yudhoyono  
didampingi  
sejumlah  
menteri  
meninjau  
Kilang  
Balongan,  
Pertamina, di  
Indramayu,  
Jawa Barat,  
Minggu  
(28/8).

24

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 3											TAHUN 2005

BAHAN BAKAR MINYAK

# Kilang Langit Biru Balongan Beroperasi

**INDRAMAYU (Media):** Kilang Langit Biru Balongan, Unit Pengolahan VI PT Pertamina, di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, kemarin resmi beroperasi. Dengan beroperasinya kilang ini, pemerintah bisa menghemat devisa negara.

Kilang yang dibangun dengan biaya US\$228 juta ini, merupakan kilang pertama dihasilkan oleh putra-putri Indonesia. Proyek yang dibangun mulai 17 Maret 2003 ini merupakan proyek tercepat di Asia Tenggara. Pembangunan kilang ini hanya perlu waktu 27 bulan.

Kilang yang dikerjakan oleh kontraktor Rekayasa Industri bersama konsorsium Toyo Engineering itu, memaksimalkan kandungan lokal 44% dari nilai kontrak dan menyerap 2.506 tenaga kerja yang mayoritas berasal dari Indramayu.

Proyek tersebut diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Balongan, kemarin. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan, pembangunan kilang yang merupakan Unit Pengolahan VI itu akan menambah kemampuan Indonesia untuk memproduksi bahan bakar minyak dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan Kilang Langit Biru Balongan yang menggunakan bahan baku utama *naphtha* itu mampu menghemat devisa negara.

Kilang Langit Biru yang ada di UP VI Balongan ini bisa memproduksi bensin tanpa timbal hingga 70 ribu barel per hari.

"Ini berarti akan menghemat impor minyak sebanyak 4.604 barel/tahun yang secara otomatis akan menghemat hingga US\$116 juta/tahun", katanya.

Presiden SBY mengatakan, kalau Indonesia hanya bergantung pada impor BBM yang saat ini telah mencapai sekitar

45% dari kebutuhan dalam negeri, maka akan makin memperbesar subsidi. Apalagi, harga minyak dunia saat ini telah melonjak di atas US\$65 per barel.

"Makin tinggi harga minyak dunia, akan semakin tinggi pula subsidi dan beban negara bertambah berat," katanya.

Ia menambahkan, untuk tahun ini anggaran subsidi mencapai Rp140 triliun atau lebih dari seperempat dana APBN sehingga menjadikan situasi fiskal sulit.

Sementara itu, subsidi BBM yang tak tepat sasaran karena dinikmati oleh mereka yang berpendapatan menengah atau tinggi, padahal sebenarnya subsidi itu untuk rakyat kecil, belum lagi masalah penyelundupan BBM.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Widya Purnama mengatakan, Kilang Langit Biru Balongan itu bisa memproduksi sebanyak 52.000 barel per hari. Rencananya, pemerintah juga akan membangun kilang sejenis di Jawa Timur. (UL/Sdk/E-3)

**'Kilang Langit Biru yang ada di UP VI Balongan ini bisa memproduksi bensin tanpa timbal hingga 70 ribu barel per hari.'**



MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 7											TAHUN 2005																			

## Balongan, Kebanggaan di Tengah Keterpurukan

Di tengah keterpurukan, Indonesia boleh berbangga. Satu kilang berdiri megah di tengah Kilang Unit Pengolahan VI Balongan, Indramayu. Semuanya tercipta dari tangan dingin putra-putri terbaik bangsa.

Mengusung nama "Langit Biru (*Blue Sky*)", kilang ini mencerminkan tekad PT Pertamina (Persero) untuk tampil lebih baik, dengan menciptakan bensin tanpa timbal (bensin TT) yang ramah lingkungan.

Berdiri di atas lahan seluas 250 hektar, kilang seluas 2,5 hektar ini terletak sekitar 210 kilometer dari Ibukota Jakarta. Semuanya berawal dari tujuan pembangunan fasilitas pengilangan bahan bakar minyak (BBM) untuk menghasilkan bensin tanpa timbal (*unleaded gasoline*). Dengan begitu, kilang ini diharapkan mampu menekan tingkat emisi timbal yang berasal dari kendaraan bermotor.

Sejak Juli 2001, Pertamina memang telah memasok berbagai jenis bensin tanpa timbal, seperti premium TT oktan 88, premix TT oktan 94, dan super TT oktan 95 dari kilang Balongan. Lalu, muncul pertamax oktan 92 dan pertamax plus oktan 95 pada Desember 2005 guna memasok Jakarta dan Bali. Program akhirnya, Pertamina ingin memasok bensin TT bernilai oktan 91 dan 95 di seluruh Indonesia.

Investasi pembangunan kilang ini memakan dana yang tidak sedikit. Sekitar US\$ 228 juta digunakan untuk merealisasikan

kilang yang berkapasitas 52 ribu barel per hari. Dari jumlah itu, Pertamina menanggung sekitar US\$ 75 juta untuk royalti dan *advisory licensor*, sertifikasi peralatan dan instalansi, persiapan lahan, katalis dan platina, bea masuk, pajak, bahan kimia, dan lain sebagainya. Sementara mitranya PT Rekin menggandeng PT Toyo Engineering Corp melengkapi sisa investasi yang hampir mencapai US\$ 153 juta. Dana ini khusus untuk pembangunan kilang dan fasilitas pendukungnya.

Kilang yang pertama dihasilkan oleh putra-putri Indonesia itu diselesaikan pengerjaannya dalam tempo 27 bulan dan merupakan proyek tercepat di Asia Tenggara sejak dibangun pada 17 Maret 2003. Uniknya, mulai dari pemilihan kontraktor sampai tenaga kerjanya, proyek ini memprioritaskan perusahaan dalam negeri. Bisa dikatakan, inilah pertama kalinya Pertamina mempercayakan proyek berskala ratusan juta dolar AS kepada pekerjanya.

"Kami berharap dapat mengerjakan proyek-proyek lainnya yang melibatkan putra-putri terbaik bangsa," papar *General Manager* Pertamina UP VI Balongan Hari-

janto K di Indramayu.

Layaknya kilang yang lain, kilang asli buatan Indonesia ini pun memiliki beberapa fasilitas. Sebut saja, ada naphtha hydrotreater yang berkapasitas 52 ribu barel per hari (BPH), platformer (29 ribu BPH), penex unit (23 ribu BPH), fasilitas utilitas, *offsite* dan yang lainnya.

Pertamina bahkan mendatangkan bahan baku naphtha tersebut dari beberapa kilang UP lainnya, seperti UP III Plaju, UP IV Cilacap, dan UP V Balikpapan. Sementara hasil yang berupa *high oktan mogas component* (HOMC) akan dikirimkan kembali ke UP lainnya, yakni UP III, UP IV,

UP V, dan UP II Dumai. Fungsinya, tentu saja untuk menaikkan kandungan oktan premiumnya.

### Hemat US\$ 597 Juta

Selain asli buatan Indonesia, kilang ini memiliki kelebihan lainnya. Kilang ini dipercaya mampu menghemat devisa negara untuk mengimpor komponen BBM yakni High Octane Mogas Component (HOMC). Bayangkan, Pertamina selama ini harus mengimpor HOMC sebanyak 12 juta barel per tahun dengan harga *spot*. Itupun di luar harga premium, bea masuk, dan pajak terkait. Dari jumlah itu, Pertamina bisa menghemat sekitar US\$ 464 juta per tahun de-



### Sekilas Kilang Langit Biru

<b>Investasi</b>	: US\$ 228 juta
<b>Kapasitas</b>	: 52.000 barel per hari
<b>Produk</b>	: Bensin Tanpa Timbal (Premium TT Oktan 88, Premix TT Oktan 94 dan Super TT Oktan 95), Pertamax Oktan 92, Pertamax Plus Oktan 95 dan bensin TT Oktan 91 dan 95
<b>Kontraktor</b>	: Konsorsium PT Rekayasa Industri dan Toyo Engineering Corporation
<b>Fasilitas</b>	: Naphtha Hydrotreater, Platformer, Penex Unit Fasilitas Utilitas, Fasilitas Offsite, Fasilitas Pendukung lainnya

ngan asumsi harga minyak dunia US\$ 47 per barel. Bahkan, angka ini bisa melonjak sampai US\$ 597 juta per tahun kalau harga minyak yang digunakan US\$ 60 per barel.

“Mungkin kontribusi kita bisa mencapai 11 juta barel per tahunnya. Meskipun kita sudah memiliki Kilang Langit Biru, kita masih tetap harus mengimpor HOMC. Tapi paling tidak dengan adanya program langit biru saat ini, beban pemerintah untuk menyediakan dolar untuk impor itu terbantu,” ujar *Project Manager* Proyek Kilang Langit Biru yang juga perwakilan dari PT Rekin Edi Herman.

Sebelumnya, kilang langit biru ini direncanakan dibangun di kilang UP III Plaju. Pertimbangannya, unit ini memiliki kelebihan naphtha yang dapat digunakan sebagai bahan baku proyek langit biru. Hanya saja, rencana ini urung direalisasikan. Keterbatasan kilang UP III dan lokasi kilang UP VI Balongan yang lebih memadai menjadi alasan dipindahkannya proyek ini ke UP VI Balongan.

Mengusung moto “Kilang Langit Biru Balongan: Dipersembahkan oleh Putra-Putri Bangsa untuk Kemajuan Indonesia Tercinta”, proyek ini layak menjadi kebanggaan bangsa di tengah keterpurukan kepercayaan asing terhadap tenaga kerja Indonesia. Tak berlebihan kiranya jika pengoperasian kilang ini dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah bertekad, pembangunan Kilang Biru Langit akan terus dilanjutkan meskipun dilakukan secara bertahap. Setelah Balongan, kilang serupa akan dibangun di Jawa Timur. Anggap saja, kilang ini adalah salah satu hadiah istimewa di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-60. Dirgahayu Indonesia. Maju Pertamina!. **(Endang Sri Melanie)**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2005

## KRISIS ENERGI

# Disiapkan, Solusi Mendasar Masalah BBM

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sejumlah solusi mendasar untuk mengatasi masalah energi, khususnya yang terkait dengan bahan bakar minyak (BBM) yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional.

Pertama, kata Yudhoyono dalam pidato tanpa teks saat meresmikan Kilang Langit Biru, Unit Pengolahan VI PT Pertamina di Indramayu Jawa Barat, Minggu, "Kita harus bisa melihat tanpa emosi dan jujur bahwa produksi minyak dari tahun ke tahun menurun".

Yudhoyono mengingatkan, seperti dikutip *Antara*, konsumsi minyak di dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat. Karena itu, terjadi kesenjangan antara pasokan dan permintaan hingga menimbulkan masalah dalam ekonomi nasional.

Yudhoyono menggambarkan, sekitar 30 tahun lalu produksi minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari (bph). Padahal jumlah penduduk saat itu sekitar 135 juta jiwa. Sementara saat ini, dengan jumlah penduduk yang telah membengkak menjadi sekitar 215 juta orang, produksi minyak malah menurun menjadi di bawah 1,2 juta bph.

Masalah itu, menurut Yudhoyono, perlu dicari solusinya dalam jangka menengah dan panjang agar produksi minyak dan gas di dalam negeri meningkat kembali. "Potensi ini ada. Mari kita lakukan," katanya.

Kedua, untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri, jumlah kilang pengolahan

minyak mentah menjadi produk BBM harus ditambah. Karena itu, Yudhoyono memastikan bahwa setelah pembangunan kilang Unit Pengolahan VI di Balongan, pemerintah juga berencana membangun proyek sejenis di Jatim. Dengan itu, kelak Indonesia tidak terlampau bergantung lagi pada impor.

Ketiga, seiring kebutuhan yang semakin meningkat, kuota konsumsi nasional dan patokan harga minyak harus dihitung lebih akurat. "Saya menerima kritikan masyarakat, bagaimana bisa harga minyak di pasar dunia yang telah mencapai 65 dolar AS, asumsi di APBN justru hanya sekitar 40 dolar AS per barel," kata Yudhoyono.

Itu, menurut Presiden, menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin asumsi harga minyak dalam APBN bisa dikatakan realistis. Apalagi neraca anggaran mengalami defisit.

Keempat, diversifikasi energi harus dikembangkan. Tentang itu, Yudhoyono mengingatkan, bagaimanapun produksi minyak bersifat terbatas. Karena itu, katanya, diperlukan energi alternatif seperti biodiesel, energi samudera, tenaga angin, maupun energi surya. "Dengan diversifikasi, subsidi minyak tidak akan terlalu besar," katanya. ...

**"Untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri, jumlah kilang pengolah minyak mentah menjadi produk BBM harus ditambah."**

Susilo Bambang Yudhoyono  
Presiden RI

28

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN :		TAHUN 2005

# Kenaikan BBM Berjenjang

**Subsidi diharapkan bisa diberikan sebelum kenaikan harga BBM.**

CIREBON — Pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebelum tahun 2006 atau awal 2006. "Prinsipnya kita lakukan kenaikan yang berjenjang, jadi tidak sekaligus. Kenaikan sampai mencapai nilai ekonomisnya atau nilai *market-nya*," kata Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, di Cirebon, Sabtu (27/8). Usai mengikuti rapat kabinet terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela kunjungan kerjanya ke Cirebon dan Idramayu, Aburizal mengatakan, semua persiapan dana

kompensasi sesuai dengan APBNP pertama 2005, telah mulai dilaksanakan. Dengan begitu, tambah dia, satu syarat kenaikan harga BBM sudah disiapkan. "Namun, kita akan mengaudit kembali sampai mana penyaluran dana kompensasi itu sudah berjalan. Tapi saya yakin sebelum 2006, sebab pada awal 2006 atau sebelumnya, kenaikan harga BBM sudah bisa dilaksanakan," kata Aburizal yang didampingi Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Namun, menurutnya, belum ada ancar-ancar berapa persen kenaikannya. Selain diikuti Aburizal, rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam itu juga diikuti Menkeu Jusuf Anwar, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Kapolri Jendral Pol Sutanto, Sekretaris Sudi Silalahi serta dua juru bicara Presiden, Dino Pati Jalal dan Andi Mallarangeng. Rapat digelar di ruang Sanggabuana

Paseban, Hotel Santika, Cirebon. Dalam rapat tersebut Presiden Yudhoyono mengatakan, kenaikan harga BBM tidak akan dilaksanakan tanpa dua hal. Pertama, dana kompensasi BBM benar-benar telah disalurkan dengan baik sesuai dengan jadwal. Kedua, identifikasi bagi program dana subsidi langsung itu sudah selesai direncanakan. Oleh karena itu, tambah Aburizal, sudah harus ada data dari BPS tentang jumlah dan letak serta tempat orang miskin dan bagaimana mekanismenya. "Setelah ada dua syarat itu, barulah Presiden bisa menyepakati kenaikan harga BBM. Hal itu akan dilaksanakan dan dikaji untuk menentukan kapan harga BBM akan dinaikkan dan bila subsidi akan diberikan," katanya.

Aburizal berharap subsidi itu bisa diberikan sebelum kenaikan harga BBM. Namun, menurutnya, semua itu tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tapi harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Pada kesempatan itu Presiden secara khusus minta pada Gubernur BI untuk melakukan saling sinkronisasi, berkomunikasi dan integrasi dengan pemerintah. "Agar tidak ada satu aspek pun yang tidak bisa kita lihat dari sisi fiskal dan sisi moneter dan dalam konteks makro ekonomi secara keseluruhan," kata Presiden.

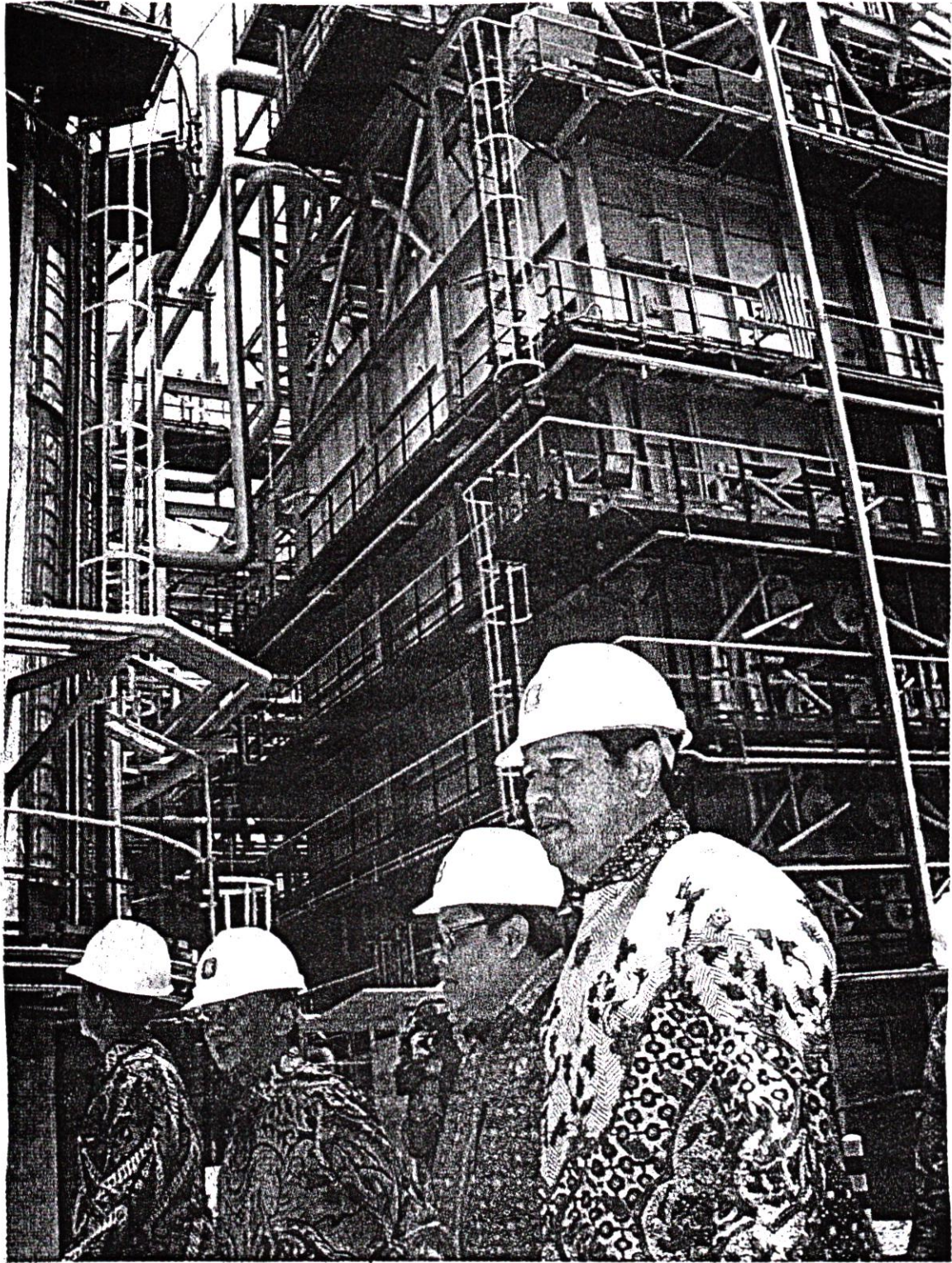
Rapat terbatas tersebut juga membahas masalah depresiasi rupiah, pariwisata, infrastruktur dan imigrasi. Hari ini (Ahad 28/8), Presiden dijadwalkan meresmikan Kilang Langit Biru PT Pertamina unit Pengolahan VI, Balongan, di Indramayu.

Presiden beserta rombongan berangkat ke Cirebon dengan menggunakan Kereta Api Luar Biasa. Presiden — didampingi istrinya Ibu Ani Bambang

Yudhoyono dan putranya Eddie Baskoro Yudhoyono — bertolak dari Stasiun Gambir sekitar pukul 07.40 WIB. Presiden, diapit anak dan istrinya, menemani gerbong Nusantara di bagian paling belakang dari rangkaian gerbong KA yang dirancang khusus itu.

Tampak ikut menyertai kunjungan Presiden yang untuk pertama kalinya menggunakan kereta api itu Kapolri Jendral Polisi Sutanto, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Budaya Jero Wacik, dan Menteri Keuangan Jusuf Anwar.

Presiden akan kembali ke Jakarta dari Stasiun Kereta Api Jatibarang, Indramayu, pada pukul 13.30 WIB dengan menggunakan Kereta Api Luar Biasa tersebut. Presiden dijadwalkan tiba kembali di Stasiun Gambir pada Ahad (28/8), pukul 16.00 WIB, dan akan langsung menuju Istana Merdeka. ■ osa/ant



**LANGIT BIRU** – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan peninjauan ke kilang minyak Unit Pengolahan VI Pabrik Platforming Naphtha usai meresmikan pengoperasian Proyek Langit Biru Balongan (PLBB), Indramayu Jawa Barat, Minggu (28/8). Pengoperasian PLBB dinilai sejalan dengan Program Langit Biru yang dicanangkan pemerintah terkait dengan upaya pengendalian pencemaran udara serta menjamin mutu udara bersih di Indonesia. (Suara Karya/Andry Bey)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 1												TAHUN 2005																		

## Terpuruknya Nasib Si Raja Minyak

Sekitar 30 tahun lalu, produksi minyak Indonesia mencapai 1,5 juta barel per bari (bph) dengan jumlah penduduk saat itu sekitar 135 juta jiwa. Saat ini dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa, produksi minyak ternyata menurun, kurang dari 1,2 juta bph. Akibatnya, sekitar 45% kebutuhan minyak domestik masih harus diimpor.

Meski Indonesia masih tercatat sebagai pengekspor minyak dan gas (migas), toh Indonesia tak banyak menikmati lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia memang menjadikan surplus neraca pembayaran di sektor migas pada triwulan II 2005 mencapai US\$ 1 miliar dari sebelumnya US\$ 0,2 miliar. Namun, data Bank Indonesia menunjuk-

kan, tingginya impor dan kenaikan harga minyak itu menyebabkan naiknya biaya angkut impor (*freight*) hingga 35,6%. Akibatnya, neraca jasa naik 34,3% menjadi US\$ 4,8 miliar pada triwulan II 2005.

Kenaikan harga minyak dunia mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan migas dalam jumlah relatif terbatas. Dengan

asumsi harga minyak jenis migas yang tidak berbeda dengan harga rata-rata triwulan I (US\$ 45 per barel), ekspor migas hanya meningkat US\$ 0,4 miliar dalam triwulan II 2005 hingga mencapai US\$ 5,4 miliar.

Peningkatan ekspor migas yang lebih besar tidak dapat dicapai karena produksi minyak dalam negeri terus turun hingga menjadi 1.070 juta barel per hari. Sebaliknya, impor migas tumbuh 34,4% (yoy) hingga mencapai US\$ 15,1 miliar pada triwulan II 2005. BI mencatat tingginya impor migas ini disebabkan semakin meningkatnya konsumsi domestik untuk bahan bakar minyak (BBM) di tengah tingginya harga minyak dunia.

### Perkembangan Neraca Transaksi Berjalan Minyak dan Gas

Minyak & Gas	2004			2005	
	I	II	Total	I	II
Transaksi berjalan	323	645	1237	225	982
Transaksi Perdagangan	1547	1842	6526	1340	2105
Ekspor	3957	4270	17684	4978	5369
Impor	-2410	-2428	-11159	-3637	-3263
Jasa-jasa	-1224	-1197	-5289	-1115	-1124

Sumber: Bank Indonesia

Investor Daily/ROHADI KUSMABRATA

Mengingat kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi, idealnya memang tidak perlu lagi ada ekspor. Apalagi, terbukti harga rata-rata minyak mentah Indonesia lebih rendah dibanding harga jenis lainnya di dunia (**lihat tabel**).

Namun, persoalannya tidak sederhana itu. Jangankan menghentikan ekspor, mengakui Indonesia sudah menjadi negara *net importer* saja tidak dilakukan pemerintah. Padahal jelas, data pada Agustus 2004 menunjukkan setiap hari Indonesia mengekspor rata-rata 400.000 barel minyak mentah, dan impor 500.000 barel. Dibandingkan negara OPEC lain, cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia kecil, apalagi dibagi jumlah penduduk.

Sampai saat ini, Indonesia mengekspor minyak mentah sekitar 0,4 juta bph. Namun nyaris semua minyak yang diekspor ini adalah milik kontraktor bagi hasil (Kontraktor *Production Sharing/KPS*), bukan milik Pertamina atau pemerintah. Hal ini mengingat dari 100% minyak yang diproduksi di bumi Indonesia, sekitar 92-95% dilakukan para KPS.

Sayangnya, KPS memiliki kewenangan penuh untuk mengelola lebih lanjut minyak yang diproduksinya. Apalagi, setelah lahir UU Migas 22/2001 yang juga berdampak perubahan status Pertamina, mengakibatkan hilangnya fungsi kontrol Pertamina terhadap KPS, khususnya untuk mengatur aliran produksi minyak mentah untuk keperluan dalam negeri. Padahal, menurut pengamat perminyakan Kurtubi, jika KPS bisa diarahkan untuk mengurangi impor BBM sebanyak 100 ribu bph saja, pemerintah tidak perlu menyiapkan dana tunai sekitar US\$ 5,8 juta per hari untuk impor BBM. Tentunya akan ada penghematan dari sisi ongkos angkut dibandingkan jika mengimpor BBM dari Timur Tengah atau Afrika Barat.

Secara teknis spesifikasi minyak mentah yang dihasilkan di Indonesia tidak sepenuhnya cocok dengan kilang yang dimiliki Pertamina. Dari 100% minyak yang diproduksi hanya sekitar 55% yang bisa dimanfaatkan untuk kilang dalam negeri. Selama ini, minyak mentah Indonesia banyak diekspor ke Jepang, Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, dan

negara-negara lain.

Saat ekspor tidak mampu dikurangi, impor pun tidak bisa dicegah. Pasalnya, kilang Pertamina hanya mampu memenuhi kebutuhan BBM sekitar 70% dari total konsumsi BBM nasional, sisanya mau tak mau harus didatangkan dari luar. Indonesia saat ini mengimpor BBM sekitar 0,3 juta bph dan juga mengimpor minyak mentah sekitar 0,4 juta bph yang seluruhnya dibayar dengan tingkat harga pasar yang menjadi salah satu komponen biaya pokok BBM.

Selama ini, Indonesia mengimpor minyak mentah dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri yang dapat memproduksi jenis-jenis hasil kilang tertentu seperti *lube base* dan aspal, serta untuk meningkatkan hasil BBM. Semula jenis minyak mentah yang diimpor adalah ALC (*Arabian Light Crude*) dari Arab Saudi, kemudian dalam rangka imbal beli (*counter trade*) Indonesia juga mengimpor minyak mentah dari Itan (ILC).

Indonesia juga mengimpor minyak mentah dari Australia (Jabiru dan Harriet) dan dari Malaysia (Tapis). Sejauh ini, hasil kilang terutama LSWR dan Naptha diekspor ke Jepang sebagai negara tujuan utama.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, beberapa jenis BBM tertentu masih harus diimpor antara lain minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan BBM akhir-akhir ini, impor BBM juga cenderung meningkat.

Pada 2020, impor minyak bumi Indonesia diperkirakan mencapai 441 juta barel. Dengan asumsi harga minyak mentah sebesar US\$ 40 per barel saja, Indonesia akan mengeluarkan biaya impor sebesar US\$ 18 miliar pada 2020. Angka itu lebih dari tiga kali subsidi energi tahun 2005.

Kini, setelah menjadi pengimpor minyak, jika harga minyak dunia naik, dana untuk membeli minyak impor juga semakin besar. Apalagi kurs rupiah terus merosot, beban subsidi akhirnya menjadi fakta yang sangat pahit.

Setidaknya ada tiga jalan keluar menghadapi masalah ini, yakni mencari ladang minyak baru, mengembangkan sumber energi terbarukan, dan menggunakan energi dengan efisien. Menurut Kurtubi,

Indonesia seyogyanya mempunyai acuan kebijakan energi yang jelas, rasional, dan berwawasan jauh ke depan (*energy sustainable based policy*), tidak bersifat *ad-hoc*. Apalagi dari kalangan kontraktor juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk menggenjot produksi hingga di atas 1,3 juta bph, asalkan ada komitmen pemerintah untuk menjamin kelangsungan dan konsistensi kebijakan. Kalau negara lain saja bisa, kenapa kita tidak.

### Masa Jaya Indonesia

Naiknya harga minyak secara sangat signifikan (*oil booming*) mulai tahun 1970-an, telah membuat Indonesia menjadi negara bak

pembangunan di Indonesia telah membuat negeri ini menjadi salah satu kandidat 'Macan Asia', bersama dengan Thailand dan Malaysia.

Tingginya nilai ekspor ini membuat Indonesia tak ragu menjadi anggota negara-negara pengekspor minyak (OPEC), selain 10 negara lainnya yakni Algeria, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Venezuela.

Namun, kini apa yang terjadi. Naiknya harga minyak dunia, justru membuat negara tercekik oleh beban subsidi BBM, terutama sejak krisis 1997-1998. Menjadi pertanyaan besar, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa Sang Raja Minyak telah hilang keperkasannya untuk memuaskan ke-

### Habis 10 Tahun

Andaikan kapasitas produksi Indonesia akan tetap sebesar 0,5 miliar barel per tahun, cadangan minyak negeri ini yang tinggal kurang dari 5 miliar barel akan habis dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan asumsi tidak ada investasi baru di bidang eksplorasi minyak bumi, diperkirakan tidak lebih dari satu dekade lagi kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia harus seluruhnya dipenuhi lewat impor.

President Director Indonesia Petroleum Association (IPA) Chris Newton mengakui saat ini sekitar 95% produksi minyak dihasilkan dari lapangan minyak tua (*old field*). Ini terjadi karena lebih dari 10 tahun tidak ada investasi untuk kegiatan eksplorasi. Pasalnya, investor merasa terombang-ambing oleh kebijakan energi yang hendak dikeluarkan pemerintah.

Kedua, tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Bahkan bisa dikatakan boros. Menurut Kurtubi, harga BBM yang murah merupakan penyebabnya. Subsidi telah menyebabkan disparitas harga minyak di dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi. Setidaknya ada dua parameter untuk mengetahui tingkat boros/tidaknya penggunaan energi, yaitu elastisitas dan intensitas energi.

Elastisitas energi Indonesia berada pada kisaran 1,04 - 1,35 dalam kurun 1985 - 2000. Bandingkan dengan elastisitas energi negara-negara maju yang berada pada kisaran 0,55 - 0,65 pada kurun yang sama.

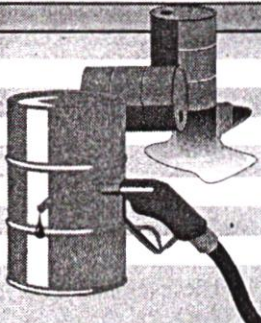
Intensitas energi Indonesia sekitar empat kali intensitas energi Jepang (Index Jepang=100, Indonesia=400). Angka itu juga di atas intensitas energi negara-negara Amerika Utara (sekitar 300), negara-negara OECD (sekitar 200), bahkan Thailand (sekitar 350).

Mengurangi konsumsi minyak, sungguh suatu hal yang amat penting. Namun, itu bukan suatu yang gampang. Mengingat sebanyak 70% dari produksi minyak saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti transportasi, listrik, industri, dan peralatan rumah tangga.

Richard Clapoth dari Smart Leadership Institute (Smart LIST) pernah mengungkapkan pemikirannya agar pemerintah mengolah hasil bumi menjadi produk-produk derivatif yang memberi nilai tambah dan efek ganda yang besar, daripada hanya mengekspor dalam bentuk komoditas mentah yang bernilai tambah rendah.

(euis rita hartati)

Bulan	WTI	ICP
Januari	46,80	42,39
Februari	47,98	44,74
Maret	54,60	53
April	53,17	54,86
Mei	49,96	52,92
Juni	56,42	48,73
Juli	59,03	55,42



'Si Raja Minyak'. Pemerintah memperoleh dana tambahan (*wind fall profit*) dari hasil penjualan minyak lebih besar dibandingkan biaya penyediaannya. Ini dimungkinkan, karena jumlah produksi minyak melebihi kebutuhan dalam negeri. Sebagai gambaran, pada era 1980-an, produksi minyak mentah masih 1,6-1,7 juta bph namun kebutuhan minyak mentah untuk BBM dalam negeri hanya sekitar 0,7 juta bph.

Dana dari hasil penjualan minyak bumi telah mengantar negeri ini dalam pembangunan ekonomi. Kondisi yang makmur, *gemah ripah lohjinawi* ini membuat pemerintahan Orde Baru tak sungkan-sungkan mengucurkan dana subsidi bagi rakyat.

Langkah pemberian subsidi, pada saat itu, dianggap sebagai langkah tepat, selain (konon) sebagai alasan politis yang dikembangkan pemerintah saat itu, tujuan lainnya adalah untuk menarik investor asing turut serta membangun Indonesia. Alhasil, hingga pertengahan 1990-an, pesatnya

butuhan devisa bangsa Indonesia?

Jawaban sederhana, telah terjadi ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran minyak.

Bayangkan, pada tahun 1973 produksi minyak nasional kita berada pada angka 1,3 juta barel per hari dengan kondisi jumlah penduduk 120 juta jiwa. Saat ini, dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, produksi minyak mentah hanya 1,02 juta bph, padahal minyak mentah yang dibutuhkan untuk BBM nasional adalah sekitar 1,35 juta bph.

Mengapa produksi tidak bisa mengimbangi konsumsi? Pertama, dari sisi produksi, sumur-sumur minyak Indonesia kini sudah semakin mengering, karena ekstraksi (pengeboran) minyak bumi tidak dibarengi oleh eksplorasi. Jangankan meningkatkan produksi, menahan laju penurunan saja sulit. Sebagai gambaran, tahun 2002 produksi minyak Indonesia 1,2 juta bph, 2003 menjadi 1,149 juta bph dan 2004 menjadi 1,124 juta bph.

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 24											TAHUN 2005																			

SEBELUM BAHAS PENGURANGAN SUBSIDI BBM

# DPR Minta Pemerintah Laporkan Neraca Pertamina

JAKARTA – Panitia Anggaran DPR RI belum bisa membahas rencana pengurangan subsidi BBM sebelum pemerintah melaporkan neraca awal PT Pertamina yang telah diaudit. Hal tersebut diungkapkan Anggota Panitia Anggaran DPR RI Rama Pratama kepada *Investor Daily*, di Jakarta, Sabtu (27/8).

Panitia Anggaran DPR juga meminta pemerintah menyelesaikan perhitungan harga pokok produksi (HPP) semua jenis BBM yang dilakukan konsultan independen. "Kedua tuntutan itu merupakan prasyarat bagi Panitia Anggaran untuk bisa menerima logika pemerintah mengurangi subsidi dalam APBN-P 2005," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahjo Kumolo menambahkan, pernyataan para pejabat pemerintah tentang kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM) secara berulang-ulang menimbulkan spekulasi di pasar. Pernyataan tersebut juga menambah beban berat rakyat.

"Seharusnya, pemerintah memberikan jawaban kepada rakyat secara terbuka, berapa sebenarnya ongkos produk BBM, termasuk tingkat kebocorannya. Jika itu tidak dilakukan, menimbulkan spekulasi politik yang bisa berakibat fatal," kata Tjahjo yang juga Anggota Komisi XI DPR ini, di Jakarta, Sabtu (27/8).

Tjahjo menambahkan, subsidi BBM yang dialihkan selama ini belum menyentuh pada sasaran yang hendak dicapai seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan umum seperti transportasi yang masih tidak nyaman bagi masyarakat.

### Verifikasi Belanja

Sementara itu, Panitia Kerja

(Panja) B DPR RI meminta pemerintah memverifikasi kembali usulan belanja kementerian dan lembaga.

Ketua Panja B Hafiz Zawawi mengatakan, usulan belanja kementerian dan lembaga pemerintah belum jelas. "Pemerintah mengusulkan hanya Rp 1,6 triliun, padahal lembaga dan kementerian jumlahnya banyak," ujar Hafiz kepada *Investor Daily*, Minggu (28/8). Panja meminta penjelasan dari pemerintah mengenai jumlah usulan dan kriterianya.

Selain itu, Panja B juga meminta laporan hasil pembahasan sebelumnya antara Panja A dan pemerintah mengenai asumsi makro dan penerimaan.

"Karena, dari hasil pembahasan itu dapat diketahui besar perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah," ujar Hafiz. (c79/ref)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN: 6											TAHUN 2005

# September, Impor Pertamina US\$ 1,6 Miliar

JAKARTA – Kebutuhan dana PT Pertamina untuk mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) periode September 2005 mencapai US\$ 1,6 miliar, atau meningkat dari kebutuhan normal US\$ 1,1 miliar.

Kenaikan kebutuhan dana tersebut disebabkan tingginya harga minyak di pasar internasional, yang mencapai US\$ 68 per barel.

"Angka itu tidak tergantung kurs, karena harga di luar me-makai dolar, hanya saja dana yang nanti harus dibayar pemerintah ke Pertamina kita akibat lemahnya rupiah pasti otomatis membengkak," kata Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimone di Jakarta, Jumat (26/8).

Setiap bulan Pertamina mengimpor minyak mentah sebesar 400.000 barel per hari (BPH) dan produk BBM sebesar 300.000 BPH. Kepala Divisi BBM Pertamina A. Faisal pernah mengatakan, impor BBM September mencapai 17,68 juta barel, yakni avtur 480.000 barel, premium 4,8 juta barel, kerosin 2,4 juta barel,

solar 8,2 juta barel, dan *fuel oil* – bahan bakar PLTU– 1,8 juta barel.

Sementara bulan ini impor mencapai 17,08 juta barel, yakni avtur 480.000 barel, premium 4,2 juta barel, kerosin 2,4 juta barel, solar 9,4 juta barel, dan *fuel oil* 600.000 barel. "Kenaikan ini disebabkan dua kilang BBM Pertamina yang masuk dalam tahap *turn around*, yakni kilang Dumai dan Cilacap," katanya.

#### Obligasi 2005

Mengenai rencana penerbitan obligasi pada 2005, Alfred membantah bahwa dana penerbitan obligasi senilai kurang lebih US\$ 500 juta itu akan digunakan untuk memperkuat *cash flow* perseroan dalam melakukan kegiatan impor minyak mentah maupun BBM.

"Dananya nanti untuk investasi, baik sektor hilir maupun hulu, kalau impor itu kan *short time*," katanya. Namun ketika ditanyakan kemungkinan untuk mendanai pembangunan kilang, Alfred juga menolaknya dengan alasan margin kilang sangat kecil sehingga kemungkinan untuk bisa membayar hutang terbatas.

Alfred mengatakan, penerbitan obligasi dipastikan tahun depan, namun dia tidak menyebutkan kapan pastinya. "Yang jelas setelah neraca awal kita keluar sekitar September, yang kemudian akan diaudit paling tidak dalam jangka 4 - 5 bulan, keluar *rating*, baru setelah itu kita terbitkan," jelasnya.

Menurut Alfred, penerbitan itu juga sekaligus menunggu selesainya revaluasi aset Pertamina yang saat ini masih mandeg di Depkeu. Menurut informasi, pekan depan pihak Depkeu dan DESDM bertemu untuk membahas masalah itu.

#### Kasus KBC

Alfred menuturkan, pihaknya merasa senang atas kemenangan

Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC) di pengadilan Singapura. "Ke depan bisa kita jadikan bukti, bahwa sudah ada kebenaran di Singapura. Nanti kita menangin lagi di Amerika Serikat (AS), masa kalah, kita juga tidak mau negara rugi," katanya.

Dia membenarkan denda Pertamina atas KBC telah membengkak akibat adanya bunga 4% per tahun, terhitung per tahun 2000 denda US\$ 261 juta. Hingga kini, Pertamina memang belum bersedia membayar denda perkara itu.

Menurutnya, pihaknya memang belum menyepakati keinginan pemerintah yang menunjuk Tery Gils dan Todung Mulya Lubis sebagai pengacara yang akan mengalahkan KBC di AS. "Itu belum ditunjuk Menteri Negara BUMN, masih nunggu surat," katanya.

Menteri Perencanaan Aburizal Bakrie mengaku telah menunjuk pengacara itu, tapi hingga kini masih belum ada pernyataan resmi Pertamina. "Belum ada kabar," katanya di Gedung DPR beberapa waktu lalu. (ari/c63)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 6											TAHUN 2005

## Asumsi Harga Minyak Diusulkan US\$ 52-58

JAKARTA – Komisi VII DPR menyepakati asumsi harga minyak dalam APBN-P 2005 diubah menjadi US\$ 52-58 per barel. Sementara jumlah produksi dan kuota BBM tetap, yakni masing-masing 1,070 juta barel per hari (BPH) dan 59,67 juta kiloliter (KL).

Kesepakatan Komisi VII DPR itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis (25/8) malam. Selanjutnya, kesepakatan akan disampaikan dalam rapat Panitia Anggaran pekan depan.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi tersebut juga meminta pemerintah untuk memperbaiki distribusi BBM tertentu yang saat ini rawan penyalahgunaan. DPR juga meminta pemerintah untuk meninjau kebijakan subsidi produk untuk mengubahnya menjadi subsidi langsung.

Poin penting dalam rapat itu juga menyatakan, kuota BBM dalam APBN-P 2005 sengaja tidak ubah, mengingat kelebihan kuota yang besarnya hampir 6 juta KL telah dijual ke masyarakat dengan mekanisme harga pasar per 1 Agustus 2005.

Purnomo mengatakan, asumsi harga minyak dalam APBN-P 2005 yang besarnya US\$ 40 per barel mengacu pada harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) yang saat ini berada pada level US\$ 50 - 58 per barel. "Jadi nanti kalau mau diubah asumsinya tentu melihat persepsi harga minyak ICP selama lima bulan ke depan.

Diperkirakan harga dalam kurun waktu itu sekitar US\$ 60 per barel, paling rendah US\$ 52 per barel," katanya. Dia menambahkan, asumsi dalam APBN-P selama ini bukan mengacu pada harga minyak internasional (WTI), melainkan mengacu pada ICP.

Mengenai kasus Cepu, Purnomo memastikan bahwa penyelesaian kasus tersebut bisa sebelum 25 September 2005. "Dusahakan bisa selesai sebelum 25 September," katanya. Dia mengakui, ada perbedaan laporan RUPS Pertamina dengan hasil nota kesepahaman antara pemerintah dan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI).

"Melihat itu, kata Purnomo, telah mengirimkan surat klarifikasi pada Pertamina, namun hingga kini masih belum ada jawaban.(ari)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31 HALAMAN : 15		
TAHUN 2005		

**BBM** *Bertahan di Tengah Kelangkaan Minyak Tanah*

*Malam belum melampaui pukul sepuluh, Rabu (24/8). Ombak laut di Kampung Palangpang, Sukabumi, Jawa Barat, tidak berdebur keras.*

*Beberapa perahu beleketek menepi menghampiri kumpulan orang di bibir pantai.*

**T**erdengar teriakan-teriakan bernada gembira. Tak lama kemudian, keranjang-keranjang bambu berisi ikan deles berpindah dari badan perahu ke daratan. "Sudah delapan malam tidak ada ikan," kata Haji Tuhar (50), juragan nelayan yang memiliki usaha pengolahan ikan asin.

Padahal, berdasarkan kebiasaan musim selama ini, bulan Mei-Agustus adalah saatnya ikan melimpah. "Perkiraananya meleset," tutur Tuhar.

Ikan di laut tidak ditanam seperti halnya padi di sawah. Oleh sebab itu, pantas bila para nelayan menganggap ada tidaknya ikan sebagai aturan rezeki dari Tuhan. Namun, di balik kepasrahan tersebut ada keprihatinan mendalam terhadap kerusakan ribuan terumbu karang.

Di bibir pantai menghampar pecahan terumbu karang yang terlempar ombak. Berkurangnya jumlah terumbu karang berhubungan langsung dengan populasi ikan. "Hasil tangkapan berkurang hingga 50 persen," kata Tuhar.

Para nelayan menduga kerusakan tempat berlindung ikan itu disebabkan penangkapan ikan hias menggunakan potasium yang berlangsung sejak tahun 1970-an. Masalahnya, penangkapan ikan hias yang didukung surat izin dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi itu dilakukan oleh warga tetangga, yakni dari Kampung Cikadal, Desa Mandarajaya. Hingga kini masalah penangkapan ikan hias tersebut masih menjadi sumber perseteruan antara dua desa terkait.



LIS DHANIATI

**Kelangkaan minyak tanah** mengakibatkan terhambatnya aktivitas pengolahan ikan asin di Kampung Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat.

Kedatangan keranjang-keranjang ikan itu membuat mereka sejenak melupakan masalah. Didorong perasaan gembira, Tuhar turut serta anak buahnya mengangkat keranjang ke dalam gudang pengolahan ikan asin. Malam itu bagang, alat penangkap ikan berupa bangunan bambu dilengkapi jaring dan lampu petromaks milik Tuhar, mampu menghasilkan sepuluh keranjang ikan deles. Satu keranjang berisi sekitar 25 kilogram ikan.

Pada gudang pengolahan yang ber dinding bambu, ikan-ikan berwarna hitam keperakan itu ditampung dalam sebuah bak semen berukuran sekitar 2 x 2 meter. Selanjutnya, sumber protein itu direndam larutan garam lebih kurang dua jam. "Supaya kalau direbus kulitnya tidak pecah," kata Tuhar menjelaskan.

Perebusan ikan dilakukan pada bak seng yang dipanasi dengan kompor minyak tanah. Ikan-ikan ditata dalam keranjang plastik berbentuk segi empat lalu dipanaskan sekitar lima menit. Pekerja lainnya membawa keranjang-keranjang itu keluar untuk dihamparkan pada waring, yakni tempat menjemur yang terbuat dari kerangka bambu dan rajutan jala.

Bila panas matahari tidak terhalang awan atau hujan, cukup dua hari untuk mengeringkan ikan-ikan itu. Ikan asin produksi Desa Ciwaru dipasarkan ke pedagang-pedagang di Bogor. Jika ikan di laut melimpah, dalam satu minggu satu gudang pengolahan bisa memproduksi sekitar satu ton ikan asin.

#### **Gudang pengolahan**

Selain penjualan ikan segar, usaha yang dipelopori almarhum Durmin pada tahun 1970-an itu telah menjadi urat ekonomi yang penting bagi masyarakat Desa Ciwaru. Pada desa yang berjarak sekitar 70 kilometer dari Palabuhanratu itu terdapat 30-an gudang pengolahan ikan.

Harga ikan sangat fluktuatif, tergantung perolehan para nelayan. Bila melimpah, satu keranjang ikan deles basah bisa jadi hanya dihargai Rp 30.000. Sebaliknya, jika ikan sedang langka, satu keranjang bisa mencapai Rp 80.000-Rp 100.000. Rendemen ikan asin mencapai 40 persen dari basahnya. Satu kilogram ikan deles asin bisa dijual Rp 8.000, sedangkan teri nasi atau lebih dikenal dengan nama teri medan bisa mencapai harga Rp 20.000-Rp 30.000.

#### **Langka minyak**

Kini usaha yang mampu menopang ekonomi ratusan warga, Ciwaru tersebut terkendala oleh persediaan minyak tanah. Kompor untuk merebus ikan sangat tergantung pada bahan bakar itu. Seorang pekerja, Dudun Suryadi (36), mengatakan, untuk merebus dua kuintal ikan dibutuhkan sekitar 20 liter minyak tanah.

Kebutuhan minyak untuk pengolahan ikan asin bersaing dengan penggunaan minyak untuk lampu petromaks pada bagang. Satu bagang memerlukan sedikitnya empat lampu petromaks. Padahal, terdapat ratusan bagang di wilayah laut Desa Ciwaru. Saat ini pasokan minyak ke daerah tersebut hanya 5.000 liter per minggu. Tentu saja jumlah itu tidak mencukupi.

"Kami sampai mencari ke daerah lain," ujar Roni Rizal (53), pengusaha ikan asin yang menampung hasil tangkapan 32 nelayan. Roni menambahkan, bila dihitung satuan, harga seliter minyak tanah bisa sampai Rp 1.600. "Kadang lebih mahal lagi," ujarnya.

Bahkan, jika membeli minyak tanah di kecamatan tetangga, seperti Jampang Kulon atau Surade, Roni harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi sebesar Rp 20.000 per drum dengan kapasitas 200 liter.

Lain lagi upaya Warna (25) dan Asnap (25). Acara menjual ikan keluar kota, seperti Bogor dan Cianjur, bagi mereka menjadi kesempatan berburu minyak tanah. "Tetapi, belinya enggak bisa banyak-banyak, takut disangka menimbun," ujar Warna.

Kelangkaan minyak tanah memang menjadi momok menakutkan bagi para pengusaha sekaligus nelayan yang menggantungkan hidup pada laut. Jika bahan bakar itu tidak ada, mereka tidak bisa mengoperasikan bagang dan merebus ikan. Akibatnya, urat nadi ekonomi yang menopang kehidupan ribuan warga itu seperti terputus. Mereka diam di rumah-rumah, mendengar deburan ombak tanpa bisa menanggung kekayaan lautnya. (D06)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN : 15											TAHUN 2005

**M**ENGAIS-NGAIS. Itulah upaya yang dilakukan Pertamina dengan menggali kembali sumur-sumur tua di Arubay, Ladang minyak di dekat perkantoran Pertamina, Lapangan Pangkalan Susu, sekitar 25 kilometer dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (Sumut).

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah dan solar dalam beberapa bulan terakhir di Sumut membuat Pertamina harus menggali potensi sumur minyak. Ladang minyak di sumur-sumur tua di Pangkalan Susu pun digali kembali.

"Kami mencoba mengais sumur-sumur tua itu kembali. Hasilnya ternyata ada gas di sumur Arubay yang dulunya menghasilkan minyak," kata Ridwan Nyak Baik, General Manager Daerah Operasi Hulu (DOH) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)-Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) kepada *Media* di Medan, baru-baru ini.

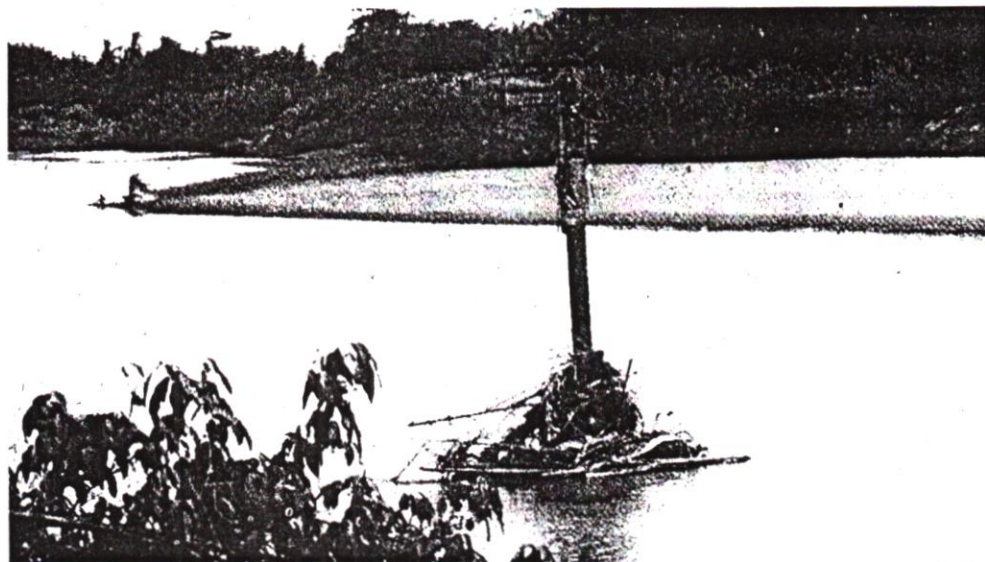
DOH NAD-Sumbagut berusaha menemukan dan mengembangkan cadangan minyak dan gas baru, namun sumur-sumur yang berproduksi tinggal sedikit. Hal ini diakibatkan karena sebagian besar sumur minyak yang sudah tua.

Dari 733 sumur yang ada di kawasan Rantau, NAD, hanya 79 di antaranya yang masih menghasilkan. Sedangkan di Pangkalan Susu, Sumut dari 372 sumur yang ada, hanya 91 sumur yang berproduksi. "Sumur-sumur di Rantau kebanyakan menghasilkan minyak, sedangkan di Pangkalan Susu kebanyakan menghasilkan gas," katanya.

Ridwan mengatakan daerah DOH NAD-Sumbagut tidak bertambah. Seluruh prospek yang ada

PANGKALAN SUSU

Ada Gas di Sumur Tua



■ ISTIMEWA

**TIDAK PRODUKSI:** Salah satu sumur minyak tua terlantar di tengah sungai. Ratusan sumur tua lainnya di ladang minyak Daerah Operasi Hulu (DOH) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)-Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) juga tidak berproduksi lagi karena persediaan menipis dan minimnya teknologi yang memiliki daya kuras lebih besar.

juga semakin menipis. Upaya yang dapat dilakukan, Kerja Ulang Pembuka Lapisan (KUPL) dan didukung penggunaan teknologi baru. DOH NAD-Sumbagut melakukan inovasi-inovasi baru dengan memfokuskan pada zona dangkal.

Hasilnya, Desember 2004 sampai Januari 2005 mendekat produksi 5.000 barel per hari walau terjadi peningkatan dari semester pertama 2004 ke semester I 2005 sekitar 23%. "Tapi setelah digenjot produksi bisa

turun lagi sehingga tingkat produksi berkisar antara 3.800 barel sampai 4.500 barel per hari," katanya.

Kemungkinan persediaan migas, ujar Ridwan, berada di laut. Potensi yang sampai sekarang belum tergalili secara signifikan berada di laut sepanjang pinggiran cekungan Sumut terbuka sampai ke utara Pulau Sabang, lalu berbatasan dengan Malaysia.

"Di selatan, berdasarkan geologi, dijumpai di kawasan Bukit Barisan

Sumatra. Di situ gas lebih banyak didapat," katanya.

Kondisi produksi minyak DOH NAD-Sumbagut itu berpengaruh terhadap pengadaan BBM di Indonesia, khususnya di Sumut.

Minyak kian menipis. Gas sudah di depan mata, tapi bisakah Pertamina mengeksplorasinya untuk kepentingan masyarakat dalam waktu dekat. Kita tunggu.

● Kennorton Hutasoit/N-3

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 15											TAHUN 2005																			

# Minyak 'Rakyat' pun Dipermainkan

**P**AGI itu sekitar pukul 07.30 WIB, ratusan warga Jl Pintu Air IV, Kelurahan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara (Sumut), tumpah ruah ke pangkalan minyak tanah milik B Sembiring.

Salah seorang warga, L Purba, ibu rumah tangga berusia 38 tahun itu turut antre pada Selasa (23/8) lalu. Ia tampak kesal dan terus-terusan mengomel.

Ibu dua anak itu kesal melihat perbuatan Sembiring yang mengisi jeriken minyak tanah dengan tergesa-gesa, sehingga minyak tanah yang ditimba dari drum banyak yang tumpah kembali ke drum itu.

"Kelihatan cara kerjanya disengaja seperti itu (tergesa-gesa) supaya banyak untung pemilik pangkalan ini. Kalau begiri caranya mana mungkin saya bisa jual Rp1.200 per liter," katanya dengan nada ketus. Dengan cara seperti itu, ujar L Purba, jeriken yang berkapasitas 35 liter itu berkurang menjadi 31 liter. Belum lagi harganya sudah mahal Rp1.000 per liter. "Kalau saya hitung modalnya menjadi Rp1.250. Lantas bagaimana saya bisa untung," tanya L Purba yang merupakan pengecer minyak tanah kepada *Media*, baru-baru ini.

Bukan hanya L Purba yang kesal dengan ulah yang dilakukan pemilik pangkalan minyak tanah. Ani, ibu rumah tangga lainnya yang tinggal di sekitar Jl Pintu Air IV juga geram de-

ngan ulah mereka. Karena itu, ia mengaku jarang membeli minyak tanah.

"Selain harganya mahal, Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter (di tingkat pengecer), minyak tanah pun sulit didapat. Sekarang saya terpaksa memasak dengan menggunakan kayu bakar," imbuh Ani.

#### Di atas HET

Berdasarkan pengamatan *Media* dalam sepekan ini, harga minyak tanah di tingkat pengecer di kawasan Medan Johor berkisar Rp1.300 hingga Rp1.500. Hal ini diakui B Simamora, warga Jl Simalingkar, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor.

"Sudah harganya mahal, saya pun kesulitan mendapatkan minyak tanah. Waktu saya tersita untuk antre di pangkalan," kata ibu rumah tangga itu.

Padahal, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut No 541/020/K/2003 tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah di Kota Medan Rp900 per liter.

Menurut Sembiring, pemilik pangkalan minyak tanah di Jl Pintu Air IV, Kelurahan Medan Johor, ia terpaksa melanggar HET, karena untuk biaya pengutipan liar. "Kalau saya jual Rp900 per liter, saya tidak mendapat untung, masalahnya banyak sekali pengutipan tak jelas, seperti biaya preman, administrasi, dan aparat," tandasnya.

Namun, menurut Ketua Bidang Minyak Tanah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumut Dat Malem Ginting, baru-baru ini, tidak

mungkin ada pangkalan yang menaikkan HET dari Rp900 menjadi Rp1.000 hingga Rp1.400 per liter. "Apalagi di tingkat agen tak mungkin harga minyak tanah Rp1.000 per liter," tandasnya.

Terlepas dari harga di atas HET, kelangkaan minyak tanah di Medan dalam dua bulan terakhir ini sudah hal yang biasa. Pemandangan warga antre membeli minyak tanah di sejumlah pangkalan masih sering ditemui.

Selain itu, pembeliannya pun dibatasi. Setiap warga hanya boleh membeli minyak tanah sebanyak lima liter dan tidak diizinkan membeli dua kali seminggu. "Orang pangkalan langsung menandai jeriken saya. Alasannya, untuk menghindari pembelian minyak tanah dua kali seminggu," ujar Sari, 25, penduduk Jl Ismaliyah, Medan.

Pertamina memang telah mengurangi jatah minyak tanah. Hal itu diakui Dat Malem. Ia mengatakan Pertamina telah mengurangi jatah pasokan minyak tanah dari 26 hari menjadi 24 hari. "Akibatnya pasokan menurun dari 65.000 kiloliter menjadi 60.000 kiloliter. Pengurangan diperkirakan mencapai 5.000 kiloliter," ujarnya.

Padahal, berdasarkan data Hiswana Migas Sumut, di wilayah ini ada 120 agen dan 2.800 pangkalan. Menurut Sembiring, kini ia hanya mendapatkan jatah minyak tanah 5.000 liter per dua minggu. Padahal, sebelumnya, ia mendapatkan pasokan minyak tanah sebanyak 5.000 liter per minggu.

● Kennorton Hutasoit/N-2

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL <u>AGST</u> SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31											
HALAMAN : 15										TAHUN 2005	

KELANGKAAN BBM

# Pembelian Minyak Tanah Maksimal Lima Liter

**JAKARTA (Media):** Kelangkaan minyak tanah terus terjadi di sejumlah daerah. Warga hanya boleh membeli bahan bakar minyak (BBM) tersebut paling banyak lima liter per orang.

Kelangkaan antara lain terjadi di Banyumas, Palembang, Palangkaraya, Muara Teweh, dan Kendari.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), kelangkaan minyak tanah membuat para pemilik pangkalan memberlakukan aturan ketat. Selain membatasi pembelian sebanyak lima liter per orang, para pembeli diharuskan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP).

Aturan itu antara lain diberlakukan sebuah pangkalan minyak tanah di Kelurahan Benu-Benu, Kota Kendari. Menurut Ridwan, pemilik pangkalan, aturan itu diberlakukan untuk menghindari adanya warga dari wilayah lain yang membeli BBM itu di pangkalannya.

Pada hal, warga di sekitar pangkalannya juga sangat membutuhkan minyak tanah karena stoknya terbatas.

Dia mengatakan, beberapa bulan terakhir pangkalannya hanya mendapat pasokan sebanyak dua truk tangki per bulan. Jumlah ini jauh

berkurang dari sebelumnya yang mencapai sebanyak 10 tangki.

Karena itu, ujarnya, jumlah sebanyak itu tidak bisa mencukupi kebutuhan warga Kelurahan Benu-Benu yang mencapai sekitar 600 keluarga. Tidak mengherankan bila setiap menjelang kedatangan pasokan minyak tanah terjadi antrean warga di pangkalannya.

Meski langka, tambah Ridwan, harga jual minyak tanah di setiap pangkalan stabil, yaitu Rp1.000 per liter.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kelangkaan minyak tanah terjadi seminggu terakhir. Harga BBM tersebut di tingkat pengecer naik dari Rp1.200 menjadi Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter.

Dari pantauan *Media*, sejumlah pangkalan tutup sejak 21 Agustus lalu karena tidak memiliki lagi persediaan minyak tanah. Menurut Rusdiannoor, salah seorang pemilik pangkalan Minyak di Jl Garuda, Kota Palangkaraya, ia kehabisan persediaan karena pasokan terlambat dan belakangan jatahnya dikurangi.

"Saya tidak tahu apa yang membuat pasokan minyak tanah terlambat. Saat ini dalam seminggu saya

paling hanya mendapat pasokan enam drum (1.200 liter). Padahal, sebelumnya bisa sampai 15 drum," ujar Rusdiannoor.

Beberapa pangkalan di kota ini juga membatasi penjualan minyak tanah. Seperti di Kendari, pangkalan minyak tanah di Palangkaraya juga hanya melayani penjualan paling banyak lima liter per orang. Hal serupa terjadi di Muara Teweh, ibu kota Kabupaten Barito Utara.

Pangkalan minyak di kawasan Rumah Susun 22 Ilir, Palembang, Sumatra Selatan, juga melakukan pembatasan serupa kepada para pembeli. "Meski membawa jeriken berkapasitas 20 liter, tetap saja mereka hanya dilayani lima liter," kata Arifin, pemilik pangkalan tersebut.

Sementara itu, di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kelangkaan solar makin parah. Sedikitnya 200 kapal ikan yang ada di pelabuhan dua daerah tersebut terpaksa tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM tersebut. Tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada membatasi penjualan, yaitu hanya melayani untuk delapan unit kapal per hari.

(HM/SS/AY/AS/LD/DY/HK/N-1)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AUGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31	
HALAMAN : 15 <span style="float: right;">TAHUN 2005</span>	

DANA MIGAS

## Pemerintah Pusat Diminta Perbaiki Jalan

**SEKAYU (Media):** Para kepala desa (kades) dan kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan (Sumsel), menuntut pemerintah pusat agar dana bagi hasil minyak dan gas (migas) digunakan untuk memperbaiki jalan negara di daerah ini yang rusak parah.

Tuntutan itu mengemuka pada *workshop* Peningkatan Kualitas Pengetahuan Kades dan BPD se-Muba di Kota Sekayu, Sabtu (27) lalu. Lokakarya yang dibuka Bupati Muba Alex Noerdin tersebut diikuti 200 kades dan 200 Kepala BPD.

A Rivai, perwakilan kades, mengemukakan kerusakan jalan negara yang ada di Kabupaten Muba sangat parah dan nyaris terputus. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alam daerah ini yang melimpah.

"Kondisi ini sangat menyedihkan, kekayaan Muba sudah dikeruk untuk kepentingan pemerintah pusat, tapi jalan negara yang menjadi tanggung jawabnya tidak diperbaiki. Untuk itu kami menuntut agar dana bagi hasil migas itu segera dikembalikan lagi untuk dibangun jalan-jalan negara yang rusak tersebut," kata Rivai.

Tuntutan yang sama juga dikemukakan Awi, Kades Ulakkembang. Menurut dia, selama ini masyarakat

**'Jalan itu kan menjadi urat nadi perekonomian. Kalau putus, Muba terisolasi.'**

Muba tidak pernah menuntut apa-apa kepada pemerintah pusat. "Tapi ketika melihat jalan negara rusak parah, sehingga warga desa sulit berhubungan, maka seharusnya pemerintah pusat yang telah menerima dana bagi hasil migas

untuk membangun jalan itu," ujar Awi.

Dalam acara tersebut terungkap, jalan negara yang rusak parah dan nyaris putus itu berada antara perbatasan Kabupaten Muba dan Musi Rawas.

"Jalan itu kan menjadi urat nadi perekonomian. Kalau putus, Muba terisolasi," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Muba Alex Noerdin mengungkapkan, dana bagi hasil migas yang disetor ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mencapai Rp120 miliar per tahun dan ke pemerintah pusat Rp4 triliun (86%) per tahun.

"Sedangkan dana yang masuk ke kas Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Muba hanya Rp240 miliar (6%)," ujar Alex

Menurutnya, tuntutan para kades dan Kepala BPD itu merupakan hal yang wajar dan tidak muluk-muluk. Sebab, katanya, selama ini Pemkab Muba yang menalangi dana untuk memperbaiki jalan negara yang rusak tersebut. "Tapi sampai kapan, sebab Muba juga ingin membangun sektor lainnya."

Menurut Bupati, dana bagi hasil migas yang disetor ke pemerintah pusat pada gilirannya memang untuk membangun kembali infrastruktur di daerah tersebut. "Kondisi jalan negara memang nyaris putus dan rusak parah, jadi perhatian pemerintah pusat sangat diharapkan," katanya.

Alex mengungkapkan, dana bagi hasil migas semata-mata untuk menyejahterakan rakyat. Dana bagi hasil migas yang sebesar Rp120 miliar, antara lain untuk membayar gaji para kades, pamong praja, serta untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor dan tenaga medis yang bertugas di desa-desa terpencil.

"Kalau dana itu diganggu lagi untuk perbaikan jalan negara atau jalan provinsi, tentu akan habis dan warga protes. Makanya, jalan negara dan provinsi yang rusak itu hendaknya diperbaiki dengan dana migas yang telah disetor Muba," ujar Bupati.

(AY/N-1)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31 HALAMAN : 6		
TAHUN 2005		

**Keluhan Agen Minyak**

SAYA adalah salah satu agen minyak tanah dari generasi keempat. Akhir-akhir ini minyak tanah menjadi fenomena yang menarik, direbutkan dan diributkan banyak orang. Mengapa? Jawabannya karena situasi ekonomi dan pemerintah sendiri.

Sejak krisis moneter menerpa Indonesia pada 1997 di mana nilai tukar dolar terhadap rupiah naik lima kali lipat, dan disparitas harga yang jauh antara minyak tanah masyarakat dan industri, ataupun dengan BBM lainnya seperti premium, menjadikan oknum yang ingin mendapatkan uang cepat berlomba mencari komoditas ini untuk dijual secara gelap.

Tetapi kalau Anda tanya sebelum tahun 1997, wah... kami harus berpikir keras bagaimana menjualnya. Karena kalau tidak laku maka barang dagangan itu akan menumpuk dan jika esoknya tidak bisa mengambil jatah rutin, akan mendapat denda dari Pertamina.

Kami sampai mempunyai tempat untuk 'menimbun' minyak tanah karena tidak habis dijual (saat itu karena produknya tidak selaku sekarang dan tidak dianggap sebagai penimbun—aneh juga memang). Kami bahkan harus rela rugi untuk menghindari denda dari Pertamina.

Sekarang ini kondisinya jauh berbeda, kami tidak tenang dalam menjalankan usaha. Kami letih sekaligus geram dikejar-kejar oleh wartawan, LSM, DPRD, dan polisi, seakan-akan kami sudah divonis bersalah.

Dalam suatu seminar, seorang peserta agen minyak mengeluh kepada Menteri Perindustrian, "Bahwa kami para agen seakan-akan sedang menjual narkoba." Waktu itu semua peserta seminar terdiam, sayang tidak ada jawaban dari Pak Menteri.

Jhonny Winarwa, Jakarta  
(adventure2112@yahoo.com)



■ TIYOK

39

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31		
HALAMAN : 1		TAHUN 2005

*Presiden Minta Masyarakat Berpikir Jernih dan Rasional*

# Soal BBM, Jangan Saling Menyalahkan

**INDRAMAYU, (PR).-**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta semua pihak untuk tidak hanya pandai mengecam dan saling menyalahkan terkait dengan soal permasalahan minyak yang belakangan menghangat. Sebaliknya, presiden mengajak masyarakat untuk berpikir dengan jernih, terbuka, rasional, dan konstruktif.

"Saya harus jujur mengatakan kepada rakyat Indonesia, tingginya harga minyak, turunnya produksi minyak, serta meningkatnya kebutuhan minyak termasuk BBM, berpengaruh kepada APBN, berdampak kepada subsidi, defisit anggaran, dan nilai tukar rupiah," ujar presiden dalam pidato tanpa teks saat meresmikan pengoperasian Kilang Langit Biru Balongan PT Pertamina Unit Pengolahan VI Kab. Indramayu, Minggu (28/8).

Persoalan yang dihadapi

sekarang, menurut Yudhoyono, penting untuk dijelaskan, agar masyarakat tidak hanya pandai mengecam dan saling menyalahkan seolah-olah Pertamina tidak mampu berbuat apa-apa. Seolah-olah tidak ada satu pun kebijakan yang tepat dan lain-lain.

Oleh karena itulah, kata presiden, saat ini pemerintah bersama DPR dan sejumlah komponen lain, terus-menerus bekerja dengan serius dan tidak menganggap ringan masalah ini untuk segera dapat menemukan solusi yang mendasar, bukan solusi tambal sulam, bukan solusi situasional. "Saya percaya, sering kali di balik musibah itu ada berkahnya," tambah Yudhoyono.

Menghadapi krisis harga minyak dunia, kata presiden, pemerintah perlu segera memiliki dan mengembangkan kebijakan energi yang mendasar, strategis, dan berjangka panjang. Tidak mungkin

menyelesaikan masalah dengan menunggu hadirnya kebijakan strategis seperti itu, melainkan juga terus mengatasi masalah-masalah jangka pendek agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

**Sejumlah solusi**

Pada bagian lain, presiden juga menyampaikan sejumlah solusi mendasar untuk mengatasi masalah energi, khususnya yang terkait dengan bahan bakar minyak (BBM) yang sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. "Pertama, kita harus bisa melihat tanpa emosi dan jujur bahwa produksi minyak dari tahun ke tahun menurun," kata presiden.

Sedangkan mengenai konsumsi terhadap BBM, lanjut Yudhoyono, dari tahun ke tahun meningkat. "Itu artinya ada gap antara pasokan dan permintaan sehingga menimbulkan permasalahan pada perekonomian

nasional," ujarnya.

Dia menggambarkan, sekira 30 tahun lalu produksi minyak Indonesia mencapai 1,5 juta barel per hari (bph) dengan jumlah penduduk saat itu sekira 135 juta jiwa. Sedangkan saat ini dengan jumlah penduduk mencapai 215 juta jiwa, produksi minyak ternyata menurun, kurang dari 1,2 juta bph.

Permasalahan tersebut perlu dicari solusi dalam jangka menengah dan panjang agar bangsa Indonesia mampu meningkatkan kembali jumlah produksi minyak dan gas di dalam negeri. "Potensi ini ada, mari kita lakukan," katanya.

Kedua, untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri, menurut presiden, dibutuhkan kilang-kilang untuk mengolah minyak mentah menjadi produk BBM. Setelah pembangunan ki-

lang Unit Pengolahan VI Balongan, pemerintah merencanakan membangun kilang sejenis di Jawa Timur sehingga Indonesia tidak akan lagi hanya bergantung pada impor.

Hal yang ketiga, adalah dengan kebutuhan yang makin meningkat, berarti harus dihitung pula secara nasional berapa sebenarnya kuota dan harga minyak. "Saya menerima kritikan dari masyarakat bagaimana bisa harga minyak di pasaran dunia yang telah mencapai 65 dolar AS, tetapi asumsi di APBN hanya sekitar 40 dolar AS per barel," katanya.

Hal itu, kata presiden, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana asumsi itu bisa dikatakan realistis, apalagi neraca

anggaran mengalami defisit. Hal yang keempat, bagaimana kita bisa mengembangkan diversifikasi energi karena bagaimana pun produksi minyak itu terbatas sehingga diperlukan energi alternatif seperti bio diesel, energi samudra, tenaga angin dan surya.

"Dengan diversifikasi ini, subsidi minyak tidak akan terlalu besar," katanya. Selain itu, upaya penghematan energi karena Indonesia dikenal sebagai negara sangat boros dalam mengkonsumsi BBM.

#### Borong dolar

Pada bagian lain, presiden juga meminta berbagai kalangan untuk tidak ikut-ikutan memborong dolar AS sehubungan dengan melemahnya rupiah terhadap mata uang itu

yang menunjukkan angka terendah pada kisaran Rp 10.400,00 per dolar AS beberapa hari terakhir ini.

"Kalau memborong dolar AS untuk tujuan yang benar, saya bisa mengerti. Tapi, kalau memborong dolar AS untuk ikut-ikutan, apalagi ada rencana yang tidak sedap, jangan diikuti," kata presiden.

Ia mencontohkan, bila PT Pertamina memborong dolar AS untuk membeli minyak mentah di pasaran internasional untuk memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri, itu masih sesuatu yang wajar.

Presiden menyebutkan bahwa sekira 45 persen kebutuhan minyak domestik masih harus impor, begitu pula bila ada satu-dua BUMN yang memborong dolar AS, masih bisa dipahami.

Namun, tegasnya, kalau memborong dolar AS itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada kepentingannya atau ketika tahun lalu atau beberapa bulan lalu tidak

membeli dolar AS tetapi akhir-akhir ini justru memborong dolar AS, sebaiknya hal itu tak dilakukan.

Ia menegaskan juga mengenai kurs sebenarnya sangat mudah dijelaskan dari sisi teori. "Mengapa harga dolar AS naik dan rupiah turun karena di dalam negeri terjadi pembelian dolar AS besar-besaran. Kalau dolar diborong harganya pasti naik. Begitu juga kalau rupiah diborong, maka harganya naik. Sayangnya ini dolar AS yang diborong," tukas presiden dengan gemas.

Presiden juga minta kepada semua kalangan, jangan menambah kesulitan kalau memang mencintai bangsa dan negeri ini. "Saya minta semua. Jangan menambah kesulitan, kalau kita cinta bangsa dan negeri ini," katanya.

Ia juga mempertanyakan pihak-pihak tertentu yang mengkhawatirkan bahwa dengan depresiasi rupiah itu defisit anggaran

tidak akan bisa ditutupi bahkan sebaliknya disebutkan akan lebih besar defisitnya.

Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah akan menutup defisit anggaran, meskipun diakui jumlahnya sangat besar. Ia juga menegaskan bahwa dalam satu-dua hari ini pemerintah dan Bank Indonesia akan menyampaikan kepada publik tentang solusi atas depresiasi rupiah ini. "Saya tidak pernah menganggap ringan sesuatu. Saya tidak pernah menganggap mudah persoalan begitu saja. Ini perlu pemikiran yang luar biasa, tetapi saya yakin akan dapat mengatasi persoalan ekonomi kita," katanya.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah bersama BI sungguh-sungguh mencari solusi terbaik dengan melihat prespektif secara jernih.

Presiden mengatakan, meski penjuror kebijakan moneter ada di BI, tetapi pemerintah mempunyai

otoritas fiskal dan mengatur ekonomi makro.

Usai meresmikan PLBB Kilang Unit Pengolahan VI Balongan, presiden bersama sejumlah menteri dan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan meninjau langsung kompleks Kilang Langit Biru. Dalam kunjungan itu, ia sempat berdialog dengan para pekerja dan memberikan dukungan. Apalagi, pembangunan proyek tersebut dikerjakan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

Kedatangan presiden ke Indramayu, setelah melakukan kunjungan sehari sebelumnya di Cirebon, mendapat perhatian dari kalangan masyarakat. Sepanjang jalan dari kota Cirebon sampai perbatasan Kab. Indramayu, seperti di Kec. Kerangkeng, terlihat anak siswa SD dan SMP berdiri di pinggir jalan raya memegang bendera merah putih, menyambut kedatangan presiden. (A-134/A-96/ant)\*\*\*

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS                                      DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 17										TAHUN 2005	

HARGA MINYAK

# Pertumbuhan Ekonomi Asia Bakal Terpangkas

JAKARTA, KOMPAS — Patokan pertumbuhan ekonomi Asia pada tahun 2005 dan 2006 akan terpangkas oleh kenaikan harga minyak mentah dunia yang mengarah ke harga 70 dollar AS per barrel. Namun, para ekonom menegaskan, resesi masih merupakan sesuatu yang mustahil.

Para ekonom mengatakan, pertumbuhan pasar ekspor di Amerika Serikat dan China yang kuat menjadi kunci utama yang membuat pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia tetap berjalan. Meskipun pertumbuhan hanya berjalan lambat.

Harga minyak *light sweet* di New York yang menyentuh harga tertinggi sebesar 68 dollar AS per barrel pada hari Kamis turun ke 66,13 dollar per barrel pada hari berikut menyusul meredanya ancaman angin topan Katrina di Teluk Meksiko.

Akan tetapi, pengamat pasar yakin, penurunan harga minyak hanya bersifat sementara dan hanya soal waktu harga mencapai 70 dollar AS per barrel. Posisi ini dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang berlaku pada akhir tahun 2003 yang sebesar 33 dollar AS per barrel.

Naiknya harga minyak mendorong Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia meninjau kembali perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia.

Laporan ADB pada bulan April lalu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Timur rata-rata 6,7 persen hingga 7,2 persen pada tahun 2005 dan 2006. Angka tersebut akan revisi dalam laporan yang akan dikeluarkan pada 8 September 2005.

"Ekonomi Asia pada saat ini berhadapan dengan harga minyak, yang akan memperlambat pertumbuhan. Tetapi, kami tidak

mengharapkan penghalang ini tidak bertambah parah dan memberikan dampak resesi," ujar ekonom ADB, Cyn Young-park, kepada AFP, Minggu (28/8).

Ekonom untuk Asia Timur dan Pasifik dari Bank Dunia, Milan Brahmbhatt, mengatakan, Bank Dunia juga akan memangkas ramalan pertumbuhan yang dikeluarkan bulan April 2005. Kecuali untuk pertumbuhan ekonomi China yang semakin cepat.

"Revisi yang sebagian besar mengarah kepada penurunan karena harga minyak tinggi dan ekspor melambat," ujar Milan.

Milan menambahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand juga diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan yang dikeluarkan sebelumnya pada bulan April 2005. Dalam perkiraan yang baru, Bank Dunia memproyeksikan empat negara tersebut akan tumbuh rata-rata 5,0 persen pada tahun 2005 atau lebih rendah dari ramalan sebelumnya 5,3 dan tumbuh 5,4 persen pada tahun 2006 atau lebih rendah dari ramalan sebelumnya 5,6 persen. (AFP/BOY)

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2005

# Anggaran Tambahan Mubazir

## Sebaiknya untuk Tambal Subsidi BBM

**JAKARTA (Media):** Panitia anggaran mengimbau agar anggaran belanja tambahan (ABT) dalam APBN perubahan tahap dua sebesar Rp1,6 triliun dialokasikan untuk menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membengkak.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi menilai pengajuan ABT dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahap dua merupakan hal yang mubazir atau sia-sia. "ABT sebesar Rp1,6 triliun itu seharusnya tidak perlu ada, sebaiknya dialokasikan untuk subsidi BBM saja, tapi berapa besaran subsidi belum diputuskan," katanya di Jakarta, kemarin.

Alokasi ABT untuk subsidi BBM, menurut Hafiz, merupakan upaya penghematan yang harus dilakukan pada tiap-tiap departemen dan lembaga pemerintahan. "Daripada mengajukan tambahan untuk departemen, kan lebih baik dialokasikan ke subsidi."

Dalam Panitia Kerja B Panitia Anggaran, jelasnya, telah dibahas mengenai belanja pemerintah pusat, serta subsidi non-BBM. "Tahapan berikutnya kami akan membahas seluruh permintaan tambahan oleh departemen dan lembaga."

Dia mengungkapkan, usulan kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat untuk departemen dan lembaga mencapai Rp10 triliun. Namun setelah anggaran itu diseleksi Departemen Keuangan, ternyata hanya Rp1,6 triliun yang lolos untuk diajukan ke Panitia Anggaran.

"Meski begitu, kalau dalam pembahasan penerimaan negara di Panja A disepakati ada tambahan penerimaan, usulan tambahan anggaran itu bisa dilanjutkan," tandas Hafiz.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran lainnya, Amin Said Husni, mengatakan, pada panitia kerja (Panja) A belum ada perkembangan pembahasan yang signifikan. Pada tahap awal pembahasan Sabtu (27/9) lalu, Panja B hanya membahas pembukaan neraca awal Pertamina.

Pada pembahasan itu, Panja B meminta laporan kinerja Pertamina sampai dengan Semester I 2005. Namun, pemerintah belum memiliki persiapan yang memadai untuk membahas hal itu. Selanjutnya Panja meminta pemerintah untuk melibatkan lembaga, dan instansi terkait dalam rangka menyepakati neraca awal bagi Pertamina.

Sedangkan anggota Panitia Anggaran Rama Pratama menyatakan, Panitia Anggaran DPR belum bisa membahas kemungkinan rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.

Sebelum melakukan pembahasan, pemerintah diminta untuk menyampaikan neraca awal PT Pertamina yang telah diaudit. Selain itu, pemerintah juga diminta menyelesaikan audit penghitungan harga pokok

produksi, atas semua jenis BBM. Perhitungan harga pokok itu juga harus diaudit oleh konsultan independen.

"Bagaimana kita melakukan pembahasan jika data-data berdasarkan fakta seperti hasil audit BBM belum diajukan pemerintah," tegas Rama.

### Asumsi harga BBM

Dalam kunjungannya di Cirebon, akhir pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui asumsi harga BBM pada APBN saat ini memang tidak realistis. "Saya pun tak luput dari kritikan mengenai asumsi harga BBM dalam APBN tersebut. Padahal harga minyak di pasaran dunia saat ini telah mencapai US\$65 per barel," katanya.

---

**'Daripada  
mengajukan  
tambahan untuk  
departemen, kan  
lebih baik  
dialokasikan ke  
subsidi.'**

---

Karena itu, saat ini pun pemerintah sendiri tengah mencari harga yang pas terhadap asumsi BBM tersebut. "Tetapi tidak akan lebih dari US\$60 per barel," tegas presiden di sela peresmian Kilang Langit Biru Balongan, di Indramayu, pekan lalu.

Sementara itu, dalam rapat kabinet terbatas yang dilakukan di salah satu hotel berbintang di Kota Cirebon pada Sabtu (27/8), Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan bahwa asumsi BBM pada APBN akan diubah pada kisaran US\$52-US\$58 per barel.

Sedangkan mengenai kenaikan harga BBM, Aburizal mengatakan bahwa kenaikan tersebut akan dilakukan setelah seluruh kompensasi BBM telah disalurkan serta adanya kejelasan program subsidi langsung apa yang akan dilakukan. "Selain itu kami pun masih menghitung berapa jumlah nyata orang miskin di Indonesia dari BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Aburizal. (Sam/UL/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS    DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL <u>AGST</u> SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31											
HALAMAN : 12										TAHUN 2005	

**Subsidi BBM untuk Kesehatan**

**P**EMPROV DKI Jakarta mendapat kuota subsidi kesehatan bagi keluarga miskin dari bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 277.134 orang dengan dana senilai Rp14,9 miliar. "Pengelolaan dana itu kita serahkan kepada asuransi kesehatan. Namun, pengawasannya tetap di bawah kendali Dinas Kesehatan DKI Jakarta," ujar kata Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Evi kepada *Media di Jakarta*, akhir pekan lalu. Bila dibandingkan dengan alokasi APBD DKI Jakarta untuk kesehatan keluarga miskin tahun 2005, nilai tersebut lebih kecil. Jumlah keluarga miskin yang sudah terdaftar mendapat kartu Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) di DKI yang berasal dari APBD sekitar 500 ribu orang dengan alokasi anggaran Rp100 miliar. "Jadi jelas nilainya jauh beda bila dibandingkan dengan subsidi BBM yang hanya Rp14,9 miliar untuk 277.134 keluarga miskin Jakarta," jelas Evi. (Ssr/J-3)

43

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31 HALAMAN: 15		

TAHUN 2005

BBM

## Solar di Pedalaman Langka dan Mahal

MENAMANG, KOMPAS — Solar di kawasan pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan saat ini makin sulit didapatkan. Selain itu, harga bahan bakar ini juga sangat mahal.

Berdasarkan pantauan *Kompas*, Minggu (28/8), di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, truk-truk pengangkut batu bara antre siang dan malam di depan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Karena antrean amat panjang, lebih dari satu kilometer, sedangkan SPBU tutup pukul 17.00, puluhan sopir truk terpaksa bermalam di depan SPBU. Truk yang antre itu umumnya mengangkut batu bara ke Pelabuhan Banjarmasin.

Sejumlah sopir truk mengatakan rela antre dan bermalam di depan SPBU karena harga solarinya cuma Rp 2.100 per liter. Jika membeli solar untuk industri tambang batu bara, harganya Rp 5.400 per liter.

"Kalau membeli 40 liter saja, selisihnya sudah Rp 136.000. Karena itu, lebih baik antre dan bermalam," kata Anwar (45), sopir truk pengangkut batu bara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Di pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti di Menamang dan Bendang, sekitar 150 kilometer sebelah barat Kota Samarinda, solar sulit didapat. Jika pun ada, harganya Rp 4.000 per liter.

Apabila tidak membawa cadangan bahan bakar dari kota terdekat, yakni Samarinda, mobil

atau kendaraan berbahan bakar harus menginap di tengah hutan karena kesulitan mendapatkan solar atau bensin. "Bahan bakar di sini memang mahal karena tidak banyak persediaan. Selain itu, mengambilnya juga jauh ke kota," kata Abdul (42), seorang pedagang solar eceran di tepi jalan di sekitar Desa Menamang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Abdul mengaku banyak warga kesulitan beraktivitas karena keterbatasan bahan bakar.

Padahal warga di pedalaman sangat tergantung pada kendaraan pribadi, seperti sepeda motor dan perahu, karena tidak ada angkutan umum.

Desa terpencil itu dikepung kawasan hutan tanaman industri dan warga harus mengangkut barang kebutuhan pokok sejauh ratusan kilometer melalui jalan tanah milik perusahaan tersebut.

Sementara itu, ketika berkunjung ke PT Pelindo II Palembang, Sabtu lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Harstjarja Harijogi mengemukakan, metode perhitungan penjatahan bahan bakar oleh PT Pertamina kepada SPBU harus diperjelas. Hal ini untuk mengantisipasi lumpuhnya angkutan perairan akibat kelangkaan dan mahalnya bahan bakar.

"Pertamina harus menjelaskan hitung-hitungan untuk penjatahan bahan bakar. Perlu dikaji, apakah penjatahan itu sebanding dengan kebutuhan bahan bakar untuk angkutan sungai dan laut," kata Harijogi mengingatkan.

(LKT/RAY/THY)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 66 - 68										TAHUN 2005	

# "Kalau Mau Memberhentikan Saya, Tak Perlu Ribut-Ribut..."

**Widya Purnama,  
Direktur Utama Pertamina:**

ISU pergantian direktur utama (dirut) Pertamina terus bergulir. Rumornya, Meneg BUMN Sugiharto telah menyiapkan sejumlah nama sebagai calon untuk menggantikan Widya Purnama. Dan tampaknya, pergantian itu tinggal menunggu waktu.

Sukses di tubuh perusahaan berlabang kuda laut itu, kabarnya, dipicu oleh sikap Widya yang *ngotot* menjadikan Pertamina sebagai operator sumur minyak di Blok Cepu, Jawa Tengah. Sementara pemerintah menginginkan pengelolaan ladang minyak di Cepu itu diserahkan kepada ExxonMobil Oil Indonesia.

Dan ibarat pertandingan sepak bola, perebutan kursi dirut Pertamina kini sudah memasuki masa *injury time*. Itu, jika kita berpegang pada pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum lama ini bahwa direksi "si kuda laut" akan diganti dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan digelar pada akhir bulan ini juga. Namun begitu, tampaknya Widya akan gigih mempertahankan kursinya. Walaupun akhirnya, mungkin akan kalah. Tapi, lewat usahanya itu ia masih berharap bisa menegakkan kepala ketika ke luar dari arena pertandingan.

Salah satu upaya yang dilakukan mantan direktur utama Indosat tersebut adalah memberikan laporan kondisi terakhir pasokan BBM kepada Presiden dan Wakil Presiden pada 25 Agustus lalu. Isi laporan itu sebenarnya merupakan bantahan Widya atas pemberitaan di media yang menyebutkan banyak daerah mengalami kelangkaan BBM. Selama tujuh hari, sejak laporan itu dibuat (26 Agustus-2 September), kondisi stok BBM nasional aman untuk 22 hari ke depan. Adanya beberapa daerah yang mengalami krisis BBM, katanya, itu hanya karena soal teknis. Kapal pembawa BBM terlambat merapat ke pelabuhan terdekat karena pengaruh cuaca buruk. Jadi intinya tidak ada kelangkaan BBM di Indonesia.

Dan Widya pun mengingatkan bahwa dirinya tidak dapat diganti dengan alasan kinerja Pertamina. Selama semester I tahun ini, rapor Pertamina sangat bagus. "Belum pernah ada rapor Pertamina sebagus ini,"

ujarnya bangga. "Jadi bila ingin memberhentikan saya tidak bisa dengan alasan kinerja, cari saja alasan yang lain," tambahnya.

Jika tetap harus diganti karena pendiriannya soal Blok Cepu itu, Widya pun siap. Pria berkulit gelap ini sadar karakternya yang tegas dan keras mungkin saja tidak membuat senang beberapa orang. Hingga akhirnya kursi dirut yang didudukinya sejak 11 Agustus 2004 terus digoyang. Widya pun sempat dibuatnya gerah. Kamis (25/8) malam pekan lalu, akhirnya ia mau menerima TRUST di ruang kerjanya di lantai 20 di Gedung Pertamina Pusat.

Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplon khas orang Betawi, ia meladeni sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Riza Sofyat, Eko Edhi Caroko, Hendra Gunawan, dan juru foto Mulyana, seputar rencana pemertintah mengusur dirinya dari Pertamina. Berikut petikan wawancaranya:

**SEPERTINYA ANDA NGOTOT SEKALI UNTUK MENDAPATKAN BLOK CEPU, MENGAPA?**

Memang itu tujuan saya, Pertamina harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya akan tanda tangani MoU itu kalau syarat-syaratnya dipenuhi. Karena rapat umum pemegang saham (RUPS) sudah memutuskan itu, yaitu Pertamina bersama BUMD (badan usaha milik daerah) adalah satu ranjang. Jadi kami adalah pemegang saham 55%. Kalau 55%, berarti *single majority*.

**APAKAH ITU TIDAK AKAN MEMBUAT (KONTRAKTOR) YANG LAIN JADI CEMBURU?**

Tidak dong. Ini memang wilayah kerjanya Pertamina 100%. Malah sudah bagus kita mau berbagi. Sudahlah, saya akan menghormati MoU, tapi kami harus jadi operatornya. Dan saya akan terus berjuang untuk itu.

**KEUNTUNGAN PEMERINTAH 86%, APAKAH ITU SUDAH TERMASUK LABA BERSIH?**

Kalau hitung-hitungannya, saya belum menghitung. Itu nantilah. Yang pasti, pembagiannya 85-15, yang 15 untuk mereka, Exxon dan pemda. Tetapi pengendali di sana atau operator yang mengoperasikan semuanya harus Pertamina.

**TAPI MOU YANG AKAN DITANDATANGANI BULAN SEPTEMBER NANTI CENDERUNG LEBIH KE EXXON?**

Saya tidak tahu itu. Tapi kalau benar, saya tidak akan menandatangani itu. Saya siap menerima segala risikonya.

**APAKAH BLOK CEPU AKAN RUGI KALAU DIPEGANG OLEH EXXON?**

Iya dan saya tidak mau itu. Itu wajib harus dipegang oleh Pertamina dan tidak ada tawar-menawar.

**MENGAPA?**

Saya ingin Pertamina menjadi tuan rumah di negara sendiri. Umur Pertamina sudah 48 tahun, masa tidak bisa menjadi operator di setiap kerja sama dengan asing. Saya ingin meminimalisasi biaya, sehingga keuntungan negara akan lebih besar. Saya jamin, kalau dipegang oleh Pertamina keuntungan akan lebih besar. Itu janji saya.

**BUKANKAH SELAIN SURYA PALOH, DI SITU JUGA ADA ICAL (MENKO PEREKONOMIAN ABURIZAL BAKRIE)?**

Pokoknya begini, ini harus *business to business*. Kalau pemda mau ikut, dia ha-

rus setor modal, kalau tidak setor modal tidak akan boleh. Begitu saja.

**KARENA SIKAP ANDA SEPERTI ITU, SEHINGGA PEMERINTAH INGIN MENGGANTI ANDA?**

Kalau itu saya tidak tahu, *no comment*. Yang jelas, saya ingin bekerja dengan baik.

**TAPI, TAMPAKNYA MENEG BUMN INGIN SEKALI MENGGANTI ANDA?**

Begini, kalau Meneg BUMN ingin memberhentikan dirut Pertamina, enggak usah ribut-ribut. Kalau mau *berhentiin*, *berhentiin aja*...

**PADAHAL ANDA KAN BARU SETAHUN MENJABAT SEBAGAI DIRUT PERTAMINA?**

Tidak apa-apa. Dan saya tidak tahu kenapa, mungkin saya terlalu keras kali. Tapi yang jelas, saya tidak akan kompromi pada siapa pun. Saya mendukung Presiden SBY, karena beliau juga sangat gigih untuk membersihkan semuanya. Kalau Presiden instruksikan, akan saya sikat semuanya.

**WAKTU DILANTIK SEBAGAI DIRUT PERTAMINA, ANDA PERNAH BERTEKAD AKAN MELIBAS HABIS MAFIA MINYAK?**

Semua itu saya jalankan. Saya audit semua pengadaan kita agar semuanya benar.

**KOK SAMPAI SAAT INI BELUM ADA YANG KENA TUH?**

Mungkin, begitu saya masuk, semuanya pada tiarap. Ke depan saya mau panggil *trader-trader* besar saja, karena sudah ketahuan *track record*-nya. Tidak usah pakai yang kecil-kecil.

**PEMBENAHAN KE DALAM TUBUH PERTAMINA SENDIRI BAGAIMANA?**

Kita perbaiki pelan-pelan, karena tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Saya harus tahu dulu medannya. Tapi yang pasti, kalau ada yang nakal kita pecat saja, tidak usah tanggung-tanggung.

**LALU BAGAIMANA TINDAK LANJUT DUGAAN KKN PENGADAAN MINYAK MENTAH DI PETRAL?**

Kalau itu benar terjadi ada main-main,

maka Direktur Petral akan saya pecat betul. Gampang kok pecat dia. Dan saya minta pertanggungjawabannya. Jadi siapa pun yang main-main, akan saya hantam. Saya tidak main-main. Tapi memang susah membuktikan itu semua, saya inginnya masyarakat membantu dengan memberi informasi kepada saya. Jadi kalau ada orang Pertamina yang main-main, saya akan pecat dia, tidak pakai tanya-tanya lagi. Karena kalau tanya-tanya lagi, cape saya. Jadi bila terbukti salah, langsung pecat. Paling saya di komplain, itu sudah biasa.

**BAGAIMANA KINERJA PERTAMINA SELAMA DI BAWAH KEPEMIMPINAN ANDA?**

Kinerja kami sekarang sangat bagus. Misalnya pendapatan kotor (EBITDA), target tahunannya Rp 9-10 triliun. Saat ini, semester satu, kami sudah mencapai Rp 6,72 triliun. Jadi kalau sekarang tidur saja, juga tidak apa-apa. Ini laporan kinerja semester I, *very-very excellent*, ibarat rapor angkanya sembilan semua.

**LALU, PENDAPATAN TERBESAR PERTAMINA DARI MANA?**

Dari non-BBM, seperti oli dan dari hulu. Tapi dari PSO (*public service obligation*) sih tidak dapat untung. Jual oli untungnya banyak lo, bisa Rp 1 triliun, kendaraan di negeri ini kan banyak sekali.

**MENGAPA RAPORNYA BISA SEBAGUS INI?**

Ya kami kerja keras. Seluruh karyawan yang kerja, bukan prestasi saya. Ini prestasi seluruh karyawan.

**BISA CERITA KIATNYA APA SAJA?**

Ya saya selalu bilang, memimpin Pertamina dengan keteladanan, kejujuran, disiplin, kerja keras, dan dengan berdo'a. Ini yang saya selalu tanamkan kepada karyawan. Saya harus menjadi teladan bagi mereka. Contohnya, seperti disiplin masuk kantor. Saya selalu bilang sama karyawan, kalau sampai dirut Pertamina masuk kantor terlambat 10 menit saja, di bawah saya boleh telat 20 menit, dan yang di bawahnya lagi boleh dua kali lipat dari 20 menit. Tapi ka-

lau dirut Pertamina tidak terlambat, ya yang di bawah jangan ada yang terlambat. Saya datang paling pagi dan pulang paling akhir. Itu semua memang sudah kebiasaan saya, karena saya ingin menunjukkan disiplin.

#### TARGET ANDA DI PERTAMINA APA SIH?

Membawa Pertamina menjadi besar dengan keuntungan yang besar pula.

#### OKE RAPOR ANDA BEGITU BAGUS, TAPI MENGAPA BEREDAR ISU ANDA AKAN DIGANTI?

Kalau urusan kinerja saya tidak bisa diganti atau tergantikan, karena kinerja saya bagus. Sedangkan menurut UU BUMN, anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan auditor dengan menyebutkan alasannya. Sekarang, kalau mau memberhentikan saya, alasannya apa? Silakan saja. Tapi kalau urusan kinerja, mereka tidak bisa memberhentikan saya. Ya silakan saja cari alasan yang lain.

#### KALAU LAPORAN KINERJANYA BAGUS, KOK MASIH ADA KELANGKAAN BBM?

Tidak ada BBM langka. Lihat laporan saya, dan ini laporan terbaik yang pernah dibuat. Laporan ini saya kirim ke Presiden, tanggalnya pun tertanda hari ini (25 Agustus 2005). Jadi sebenarnya itu tidak ada kelangkaan BBM. Cuma gara-gara satu daerah yang telat, kemudian dibesar-besarkan. Kita punya cadangan 22,5 hari dan stok sebesar itu jarang tercapai.

#### TAPI BUKTINYA MASIH ADA DAERAH YANG KRISIS BBM?

Kita memang punya daerah kritis, misalnya yang punya stok BBM kurang dari tiga hari. Masalahnya, untuk mencapai daerah tersebut harus naik kapal dan sebagainya. Lokasi kritis artinya begini, meskipun kurang dari tiga hari tetapi stok tetap ada.

#### SAAT INI DOLAR SUDAH MENCAPAI DI ATAS Rp 10.000, OTOMATIS BELANJA PERTAMINA AKAN NAIK, DONG?

Ya kita membeli pakai dolar dan menerimanya rupiah. Sebenarnya yang berat pemerintah.

#### BENAR PERTAMINA MASIH CARI-CARI DOLAR

#### KE BANK SWASTA?

Eenggak betul itu. Dolar kita dapat dari BI (Bank Indonesia) langsung.

#### BERAPA SIH KEBUTUHAN DOLAR PERTAMINA?

Tergantung. Paling sedikit US\$ 50 juta per hari, tapi mungkin sekarang bisa sampai US\$ 80 juta-US\$ 100 juta.

#### APAKAH SUBSIDI BBM AKAN DIKURANGI?

Mestinya sih begitu, karena terlalu berat beban pemerintah untuk subsidi. Ba-



ANTRIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

yangkan, setiap kenaikan US\$ 1 saja beban pemerintah naik Rp 3,8 triliun-Rp 4 triliun. Menurut saya memang tidak ada jalan lain selain menaikkan harga BBM.

#### BERAPA KIRA-KIRA HARGANYA NANTI?

Kalau itu haknya pemerintah, saya tidak dalam posisi untuk menjawab itu.

#### TAPI SAAT INI PERBEDAAN ANTARA BBM BERSUBSIDI DAN YANG TIDAK SANGAT BESAR, SEHINGGA MENIMBULKAN BANYAK PENYALAHGUNAAN DAN PENYELUNDUPAN?

Makanya, kalau ada perbedaan atau disparitas harga pasti ada penyalahgunaan

dan penyelundupan. Tapi sekarang ini Polri bekerja keras untuk menangani itu. Begitu pun TNI. Bahkan Presiden marah sekali. Saya sangat setuju, kalau ada yang tertangkap ditembak saja. Kan kasihan negara dan rakyat. Jadi kalau ada yang menyelundupkan BBM tembak di tempat saja, tidak usah tanggung-tanggung.

#### APAKAH ANTARA KEBUTUHAN DENGAN PASOKAN BBM SEIMBANG?

Kami ini diberi kuota pemerintah dan DPR. Tahun ini 59,6 juta kiloliter. Perinciannya antara lain, 26 juta kiloliter untuk solar, 15 juta kiloliter untuk premium, dan 10 juta kiloliter untuk minyak tanah.

#### BERAPA PERTAMINA MENGAMBIL UNTUNG?

Tidak ada. Pertamina tak boleh ambil laba. Yang menentukan harga pemerintah, makanya subsidi besar. Kalau untuk BBM industri, kami yang menentukan.

#### BERAPA KEUNTUNGAN PERTAMINA DARI SITU?

Tidak besar juga, angka pastinya saya lupa. Tapi yang jelas kecil.

#### BAGAIMANA POSISI MINYAK KITA, KABARNYA SUDAH NET IMPORTER?

Kalau Pertamina impor terus. Kilang kita kapasitasnya 1.050.000 barel per hari. Minyak dari pemerintah sekitar 600 ribu-an barel, sisanya impor.

#### BAGAIMANA NANTINYA JIKA PERUSAHAAN ASING JUGA JUALAN BBM DI NEGERI INI?

Sampai saat ini belum ada. Tapi kalau ada kita malah senang sekali, ada kompetisi. Dengan begitu Pertamina akan menjadi besar.

#### TAPI RENCANA MEREKA MASUK KE SINI MEMANG ADA?

Tergantung pemerintah. Kalau dibuka untuk umum, maka tidak ada subsidi. Kalau masih ada, mereka tidak akan mau. *Nagih* ke pemerintahnya susah.

#### SAAT INI PEMBAYARAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH KE PERTAMINA SUDAH LANCAR?

Sudah lancar. Saya terima kasih kepada media yang turut membantu. □

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN : 6																																													
TAHUN 2005																																													

**BBM INDUSTRI**

**Sektor Perikanan Agar Dikecualikan**

JAKARTA — Departemen Kelautan dan Perikanan terus mengupayakan agar harga jual bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan perikanan tangkap dan industri perikanan dikecualikan, atau tidak dimasukkan ke dalam kategori industri.

"Pasokan BBM dengan harga jual bukan industri itu khususnya untuk armada perikanan nasional yang berukuran di bawah 30 gross tone," ungkap Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi DKP Aji Sularso di Jakarta, Kamis (25/8).

Menurut Aji, DKP berupaya semaksimal mungkin agar dampak kenaikan harga BBM untuk sektor industri per 1 Agustus 2005 tidak banyak berpengaruh terhadap sektor kelautan dan perikanan.

Selain berkoordinasi dengan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) dan PT Pertamina agar tidak menetapkan BBM untuk kegiatan sektor perikanan dengan harga jual industri, DKP juga memfasilitasi nelayan dan industri perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Hal itu dengan pemanfaatan data dan informasi tentang musim ikan dari citra satelit.

DKP mendorong dan memfasi-

litasi nelayan untuk dapat bermitra dengan industri perikanan, serta membantu nelayan dalam mengakses sumber-sumber permodalan. Baik modal yang disediakan perbankan, koperasi simpan pinjam, serta lembaga keuangan lainnya.

Aji menambahkan, DKP juga memberi kelonggaran kepada armada perikanan nasional (berbendera Indonesia) untuk menggunakan kapal pengumpul dan pengangkut. Hal itu untuk mendorong efisiensi penggunaan BBM, dan kapal-kapal nasional itu diizinkan melakukan pemindahan ikan di laut (*transshipment*).

DKP juga telah menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan yang dapat mempermudah mencari usaha dan mengurangi biaya-biaya lain yang tidak perlu, serta memangkas mekanismen dan proses birokrasi.

Berdasarkan APBN tahun 2005, subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 19 triliun dengan kuota BBM ditetapkan sebanyak 59,6 juta kilo liter dengan asumsi harga minyak mentah US\$ 24 per barel dan kurs dipatok Rp 8.600 per dolar AS. Namun dalam perkembangannya, harga minyak mentah saat ini sudah mencapai di atas US\$ 65 per

barel, sehingga diperkirakan subsidi BBM sampai akhir 2005 mencapai lebih dari Rp 130 triliun.

**Jaminan Pasok**

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya DKP Made L Nurjana menyatakan, tambak-tambak udang memerlukan jaminan pasokan BBM solar untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin merupakan peralatan

"DKP akan meminta PT Pertamina memberi jaminan kelangsungan pasokan solar bagi usaha pertambakan udang."

■ Made L Nurjana

vital untuk menjaga pasokan oksigen bagi udang-udang yang ada ditambak.

"Kalau pasokan BBM terhenti maka kincir angin tidak akan bisa digerakkan lagi akibatnya udang-udang akan mati karena tak men-

dapatkan oksigen," paparnya.

Kebutuhan akan kelangsungan pasokan BBM, terutama sangat diperlukan bagi tambak-tambak yang jumlah udangnya telah mencapai 200-250 ekor per meter persegi (m<sup>2</sup>).

Made mengungkapkan, untuk tambak udang yang intensifikasinya besar dengan jumlah udang hingga 250 ekor per m<sup>2</sup>, maka kincir air harus digerakkan sepanjang hari sehingga kebutuhan BBM harus terus dipenuhi.

Oleh karena itu, DKP akan meminta PT Pertamina memberi jaminan kelangsungan pasokan solar bagi usaha pertambakan udang.

Tentang kemungkinan tidak tercapainya target produksi udang nasional sebanyak 300 ribu ton pada 2005 jika pasokan BBM terganggu, Made menyatakan keyakinannya sasaran tersebut masih dapat dipenuhi dari tambak tradisional. Sebab, produksi tambak tradisional berupa udang windu, terutama di Lampung dan Kalimantan Timur, saat ini sangat menggembirakan. "Tambak-tambak udang tradisional itu yang diharapkan mendukung pencapaian produksi nasional tahun 2005," tegasnya. (wy)

46

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2005																			

# Pemerintah Akan Lepas US\$ 1 Miliar ke Pasar

JAKARTA – Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan, Mulia P Nasution mengatakan, pemerintah akan mengkonversi saldo dalam dolar AS untuk membeli rupiah jika diperlukan. Pemerintah menyediakan dana di atas US\$ 1 miliar dari rekeningnya di Bank Indonesia. Aksi ini akan dilakukan awal pekan depan.

Mulia menegaskan, saat ini kondisi anggaran pemerintah masih surplus Rp 22 triliun (per 15 Agustus 2005). Pemerintah juga masih memiliki saldo sebesar Rp 70 triliun di Bank Indonesia (BI). "Jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran, bahkan kalau diperlukan kami bisa mengkonversi saldo kita di dolar AS untuk beli rupiah. Cukup besar, di atas US\$ 1 miliar," kata Mulia di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Jumat (26/8).

Pemerintah akan memantau kondisi pasar sebelum melakukan konversi tersebut. Mulia menyebutkan, sebenarnya transaksi valas di pasar tidak terlalu besar, hanya US\$ 400-500 juta. Sehingga, diharapkan rupiah kembali menguat.

Suplusnya pemerintah saat ini, kata Mulia, terdiri atas surplus netto Rp 12 triliun dan Rp 10 triliun untuk pembayaran cicilan pokok utang. Mulia mengakui, dari sisi pemerintah *capital inflow* (aliran dana yang masuk) lebih kecil dibandingkan dengan *capital out flow* (aliran dana yang keluar). Sebab, saat ini pemerintah harus membayar utang untuk menurunkan stok utang.

**Valas Pertamina**  
Menteri Negara BUMN Sugiharto

menegaskan, tidak ada *abuses* (pelanggaran) yang dilakukan oleh Pertamina dalam pembelian valas dalam tiga bulan terakhir. Rabu (25/8) malam, pihaknya telah memanggil Pertamina dan memeriksa transaksi valasnya.

"Tidak ada *abuses* dalam pembelian devisa, saya sudah melihat bukti-bukti materialnya. Ternyata mereka melakukan transaksi sesuai dengan apa yang sudah diputuskan Sidang Kabinet waktu itu," kata Sugiharto usai shalat Jumat (26/8), di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta.

Seperti diketahui, sejak adanya penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah dengan BI, Pertamina mendapatkan suplai valasnya dari rekening pemerintah yang ada di BI. Rata-rata kebutuhan valas Pertamina setiap bulan untuk impor BBM antara US\$ 1,5-1,8 miliar.

Selama ini, Pertamina melakukan transaksinya sesuai dengan prosedur. Sugiharto menambahkan, untuk kebutuhan valas BUMN lainnya, seperti PT Telkom dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), memang membutuhkan dolar AS untuk biaya investasi (*capital expenditure*). Namun, jum-

lahnya relatif tidak terlalu besar dan dapat diprediksikan.

"Jumlahnya sangat kecil, misalnya Telkom untuk pembelian 14 hari hanya US\$ 14 juta *it's nothing compare to the whole*," ujar dia. Untuk transaksi valas keseluruhan BUMN pada 2004 sebesar US\$ 13 miliar, US\$ 12 miliar di antaranya adalah untuk Pertamina. Meneg BUMN menandakan, tidak ada spekulasi valas dari BUMN.

"Faktor eksternal yang mendominasi baik tingkat suku bunga dalam negeri maupun kurs, sekarang ini kita lihat memang agak melemah dan itu tidak hanya di Indonesia. Ini akibat dolar menguat terhadap seluruh mata uang dunia karena perekonomian AS membaik," lanjut dia.

Faktor lainnya adalah kenaikan harga minyak dunia yang lebih tinggi dari perkiraan, hal tersebut menimbulkan spekulasi bahwa APBN mengalami tekanan. "Itu betul tapi katup-katup pengaman untuk fiskal itu sudah dilakukan oleh menteri keuangan dengan membuat yang disebut *prudential fiscal policy* (kebijakan fiskal yang berhati-hati)," lanjutnya.

Mengenai repatriasi devisa BUMN yang sudah diwajibkan sejak tiga bulan lalu, Sugiharto mengatakan, nilainya setahun hanya sekitar US\$ 1-2 miliar. "Saya sudah cek, perkebunan, pertambangan, umumnya BUMN yang mengeksport komoditas devisa untuk negara, itu dinegosiasikan langsung maupun tidak langsung melalui bank pemerintah. Itu sudah berjalan dan nilainya tidak besar, paling setahun di luar Pertamina nilainya US\$ 1-2 miliar," papar dia. (rie)

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>		
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL <u>AGST</u> SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 <u>27</u> 28 29 30 31			
HALAMAN : 8			TAHUN 2005

**MINYAK JARAK JADI BIODIESEL**

# Lahan Tandus Selamatkan Krisis BBM

LAHAN tandus bisa menyelamatkan kesulitan negeri ini dalam menyediakan bahan bakar minyak (BBM) untuk rakyat. Dari sekitar 13 juta hektare lahan tandus di seluruh Indonesia, bila ditanami pohon jarak pagar dapat menghasilkan lebih dari 400 ribu barel solar per hari. Dengan produksi ini, pemerintah tak perlu pusing mengutak-atik RAPBN menyusul fluktuasi harga minyak dunia.

**B**adan Pusat Statistik menyebutkan, semester I tahun ini, Indonesia mengimpor minyak senilai US\$ 28,37 miliar. Nilai tersebut lebih besar dari periode sama tahun sebelumnya, yang mencapai US\$ 20,96 miliar.

Salah satu jenis BBM yang banyak dikonsumsi adalah solar. Sampai kini, konsumsi solar 460 ribu barel, atau 73.140.000 liter per hari. Tingginya angka penggunaan solar, sejatinya tidak harus ditutup melalui impor. Ada beberapa sumber energi alternatif yang bisa disubstitusikan sebagai pengganti solar. Salah satunya energi biodiesel berbahan dasar minyak jarak.

Pembuatan energi alternatif, kini mulai menggejala di berbagai belahan dunia. Sebagian negara ada yang mengembangkan biodiesel, sebagian lainnya mengaktifkan bioetanol. Ini berarti, Indonesia tidak sendiri ketika mencari sumber energi alternatif.

Buktinya, negara sekelas Amerika Serikat saja, masih sibuk menggali sumber energi baru. Pekan pertama, Agustus ini, Presiden AS George W Bush menandatangani RUU Energi (Energy Bill) yang khusus mengatur Bio Fuel.

Gejala serupa juga muncul di kalangan perusahaan minyak dunia. Misalnya, *North Dakota Biodiesel Inc* yang menginvestasikan US\$ 50 juta untuk proyek biodiesel di Minot, North Dakota, USA. Biodiesel ini berbasis pada tanaman canola (sejenis gandum). Ini lah proyek terbesar di wilayah Amerika Utara, dengan produksi 100 ribu ton BBM. Biodiesel yang dihasilkan dari 144 ribu hektar kebun canola.

Produsen minyak kelapa sawit di Malaysia, IOI Corp dan Kuok Oil & Grains membangun dua penyulingan minyak kelapa sawit di Rotterdam yang memproduksi

lebih dari satu juta ton minyak kelapa sawit dalam satu tahun. Industri ini berencana memenuhi kebutuhan biodiesel di Eropa pada masa depan.

Sementara itu, perusahaan minyak raksasa Brazil, Petrobras akan meningkatkan ekspor etanol sampai 9,4 miliar liter pada 2010, dari dua miliar liter tahun 2005. Saat ini, Japan Mitsui & Co dan Vale do Rio Doce (CVRD) turut mendukung rencana Petrobras melalui studi peningkatan ekspor etanol Brazil.

Perusahaan dunia tersebut bukan tanpa alasan bila menajutahkan pilihan kepada biodiesel.

48

Apalagi secara prinsip kimia, penemuan energi alternatif berbeda tipis dengan penemuan energi konvensional (minyak bumi). Sebab, kata Direktur PT Rekayasa Industri Triharyo Soesilo, keduanya sama-sama mengaktifkan energi matahari. "Hanya saja, minyak bumi terjadi karena dipress sekian lama (di perut bumi). Namun energi itu bisa disimulasi di dalam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan," tambahnya. Proses simulasi energi ini lah yang menghasilkan bahan bakar biodiesel.

Sayangnya sebagai negara katulistiwa, Indonesia belum maksimum mengonversi energi matahari. Berbeda faktanya dengan negara lain yang sama-sama negara khatulistiwa. Brazil, misalnya. Negeri Samba ini sukses mengonversi energi matahari yang tersimpan di dalam gula. Kini, Brazil sudah menghasilkan Bioetanol yang dijual US\$ 25 per barel. "Ada sebuah teori yang mengatakan, nanti dunia ini ketika minyak bumi habis, tanahnya akan dibagi dua. Tanah lahan subur untuk makanan, tanah tidak produktif untuk bahan bakar melalui biodiesel, bioetanol, dan lain sebagainya," papar Triharyo.

Dari 13 juta hektare lahan kering di seluruh tanah air, kurang dari 10% yang sudah dan akan dipakai. Ini ironi, karena pertumbuhan pohon jarak justru sempurna bila ditanam di lahan kering. Jika Indonesia baru memanfaatkan kurang dari 10%, itu mengisyaratkan belum optimalnya pemanfaatan lahan kering.

Saat ini, kata Triharyo, ada tiga lembaga yang menanam jarak. Pertama, perkebunan milik PT Rekayasa Industri dan Institut Teknologi Bandung (ITB) berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas 12 ha dengan 30 ribu pohon. Kedua, perkebunan milik PT Energi Alternatif Indonesia (ada 48 ribu pohon). Ketiga, Departemen Pertanian (3 ribu pohon) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) juga berencana menanam jarak pagar di 2000-2500 ha lahan gundul di

---

**Presiden harus segera mengeluarkan peraturan khusus. Seluruh departemen harus dikondisikan untuk mendukung dan mengampanyekan pembuatan dan pemakaian biodiesel.**

---

Purwakarta, Oktober mendarang. Sebelumnya, RNI sudah menanam di Indramayu seluas 850 ha.

Di Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam, ITB, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Departemen Sosial (Depsos) bekerja sama menghidupkan 400 ha lahan kritis. Tiga bulan lagi, kata Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB Rohmin Dahuri, hasil budidaya pohon jarak sudah bisa dinikmati. Solar yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan 200 kapal, satu pabrik es, satu *cool storage*, serta satu unit pembangkit listrik tenaga diesel. "Yang lebih indah bagi nelayan. Harganya Rp 2.000-2.500 per liter. Yang sebenarnya Rp 1.500 kembali ke dia karena jarak yang dikelola dari pabrik inti dibeli dari mereka," jelas Rohmin.

Menurut perhitungan PT Rekayasa Industri, dari tiga juta

ha lahan kering akan dihasilkan 92 ribu barel solar per hari. Untuk memenuhi lahan tersebut diperlukan sekitar 7,5 miliar bibit. Bila dari seluruh tanah tandus seluas 13 juta ha ditanam jarak pagar, solar yang dihasilkan lebih dari 400 ribu barel,

Kendati sudah ditanam di beberapa tempat, budidaya jarak belum terkoordinasi secara nasional. Ini ironis, mengingat besarnya potensi di belakangnya.

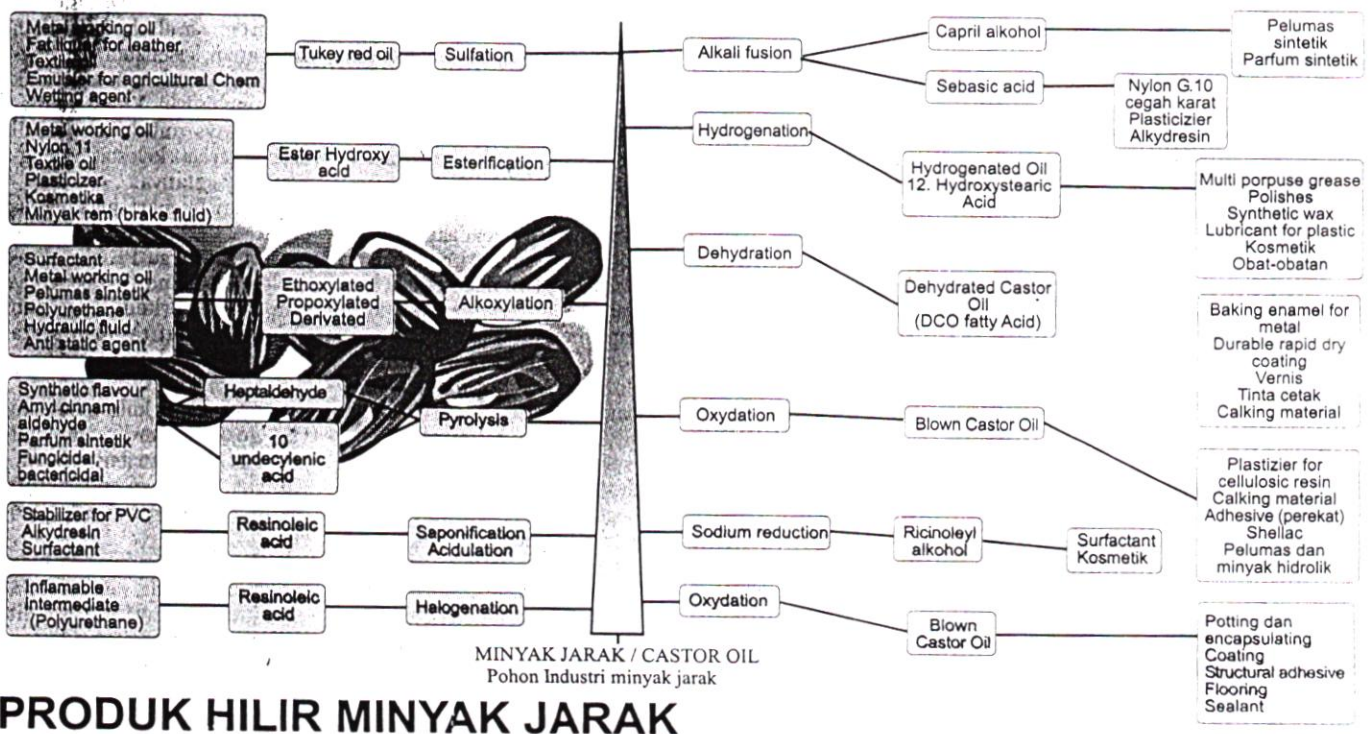
Bayangkan, proyek percontohan di NTB dan Cilacap (Jawa Tengah), kata Tutik Herlina Mahendrato, *business manager* PT Rekayasa Industri, sudah dilirik sejumlah investor. Pada saat bersamaan, PT Energi Alternatif Indonesia sudah mengembangkan biodiesel buah jarak ke dalam skala industri. Sebuah pabrik dengan kapasitas produksi 1.000 liter solar/hari, kini berdiri di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Produk biodiesel sudah dijual kepada pengusaha asal Jepang, serta sejumlah SPBU lokal.

#### **Gerakan Nasional**

Ada banyak pertimbangan menjadikan biodiesel sebagai proyek nasional. Selain potensi bisnis, juga penuntasan beragam kendala di belakangnya. Harus ada yang bisa menjawab kenapa 13 juta ha lahan kering se-Indonesia tidak digarap sebagaimana mestinya. Lahan-lahan yang tersebar di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa bagian selatan, serta Papua tersebut dibiarkan terkapar. Nasibnya tidak berbeda dengan pesakitan yang menunggu ajal. "Menurut saya, pemerintah harus mengambil inisiatif," ujar Rohmin.

Sementara Triharyo mengatakan, presiden harus segera mengeluarkan peraturan khusus. Seluruh departemen harus dikondisikan untuk mendukung dan mengampanyekan pembuatan dan pemakaian biodiesel.

Ketua Forum Biodiesel Indonesia (FBI) Tatang Soerawidjaja, menyoroti komunikasi masing-masing institusi. Pengembangan biodiesel terkesan jalan sendiri-sendiri karena komunikasi antar pakar, industriawan, serta pemerintah belum berjalan. Namun utamanya, Pertamina sebagai persorotifikasi pemerintah sudah membuka diri. "Bila Pertamina sudah ikut main maka pengembangan biodiesel sudah tidak ada masalah lagi," tegasnya. (c64/c74/ys)



# PRODUK HILIR MINYAK JARAK

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA						<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI				<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 14											TAHUN 2005																			

## Harga BBM Bakal Naik Akhir 2005 atau Awal 2006

Cirebon, *Bisnis RM*

Kenaikan harga BBM diputuskan akan dilakukan pada akhir 2005 atau awal 2006 setelah pemerintah menyelesaikan dana kompensasi BBM dan mengidentifikasi program dana subsidi. Namun pemerintah belum menentukan besaran kenaikannya.

Demikian keputusan rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Cirebon, akhir pekan lalu. "Angkanya sedang dihitung. Kenaikan dilakukan secara berjenjang dan tidak sekaligus," kata Menko Perekonomian Aburizal Bakrie usai rapat.

Menurut Aburizal, dalam rapat itu, Presiden menyampaikan dua hal. Pertama, dana kompensasi BBM saat ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai jadwal. Kedua, identifikasi program dana subsidi langsung harus sudah selesai dan ada data BPS tentang jumlah dan letak orang miskin di Indonesia serta mekanisme pengaturannya. "Pemerintah juga akan membahasnya dengan DPR," katanya. ● Imq/03B

49

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31		
HALAMAN : 20		

## Pengganti Widya Masih Nyangkut Di TPA

### Jakarta, Bisnis RM

Meski sebelumnya Meneg BUMN Sugiharto mengatakan bahwa, direksi Pertamina akan diganti paling cepat pekan lalu, namun tampaknya rencana penggantian itu sedikit molor. Pasalnya, nama-nama calon yang akan menggantikan posisi Dirut Pertamina Widya Purnama itu, hingga kini belum keluar karena masih masih nyangkut di Tim Penilai Akhir (TPA).

Usai melantik jajaran direksi baru PT Pos Indonesia di Jakarta, akhir pekan lalu, Sekretaris Meneg BUMN Said Didu menjelaskan, Kementerian BUMN masih menunggu keputusan TPA soal penggantian dirut dan jajaran direksi

Pertamina.

"Yang jelas kita masih menunggu hasil keputusan TPA yang berada di tangan Presiden, Wapres, Meneg BUMN dan Menteri Keuangan," cetus Said.

Menurut Said, setidaknya tiga nama dari setiap jabatan direksi sudah masuk ke TPA untuk selanjutnya diputuskan siapa yang layak mengisi posisi Dirut PT Pertamina yang saat ini dijabat Widya Purnama.

Pergantian jajaran direksi Pertamina itu, lanjut Said, dilakukan dalam rangka revitalisasi BUMN berlambang kuda laut itu sehingga pemerintah melihat perlunya orang-orang yang profesional di

bidangnya untuk membawa Pertamina ke arah yang lebih baik.

Adapun tiga nama yang belakangan ini santer disebut-sebut untuk menggantikan posisi Widya Purnama adalah Iin Arifin Takhyan yang saat ini menjabat Dirjen Migas, Martiono Hadiyanto saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina. Selain itu, muncul juga nama Tubagus Hariyono, Kepala Badan Pengawas Hilir Migas.

Saat ditanya kapan pergantian direksi Pertamina dilakukan, Said menjawab belum bisa memastikan karena setiap saat pertemuan TPA bisa saja dilakukan sehingga kemungkinan minggu ini atau minggu depan. ■ AUL



Dirut Pertamina Widya Purnama. Foto: Zamri

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : A.2											TAHUN 2005

## Jangan Selalu Bimbang

Sampai akhir pekan lalu, dolar Amerika belum juga turun, masih bertengger di harga Rp 10.360. Ini pertanda bahwa pasar perlu tindakan nyata, lebih dari sekadar anjuran pemerintah agar masyarakat tidak panik.

Bank Indonesia, yang bertanggung jawab menjaga nilai rupiah, mencoba menyesuaikan suku bunga rupiah, dan juga melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan dolar, tapi semua ini masih kurang atau belum berhasil. Kunjungan mendadak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Gedung BI pekan lalu juga tak berdampak jelas.

Faktor lain, boleh jadi yang terpenting, adalah kenaikan harga minyak bumi yang luar biasa. Dengan harga sekitar US\$ 65 per barel—sebelumnya hanya sekitar US\$ 50—Pertamina memerlukan US\$ 1,6 miliar setiap bulan untuk mengimpor bahan bakar minyak. Kebutuhan dolar meningkat, harganya tentu akan naik juga.

Imbas lain dari kenaikan harga ini adalah tekanan yang berat pada keuangan negara, karena harga BBM eceran masih tetap disubsidi pemerintah. Tekanan bisa dihilangkan kalau subsidi dicabut, dengan akibat harga BBM eceran harus naik dengan cukup drastis. Di pihak lain, imoral untuk terus menyediakan subsidi BBM sebesar Rp 120 triliun, padahal bukan rakyat miskin yang terutama menikmatinya.

Penundaan penghapusan subsidi yang berlalu-larut dan ketidakberanian memikul risiko dibaca sebagai ketidakmampuan pemerintah membuat keputusan dalam mengelola keuangan negara. Akibatnya, kepercayaan merosot,

dan bersamaan dengan itu rupiah juga ikut turun nilainya. Faktor nonmoneter seperti kepercayaan—dari dalam dan luar negeri—ini kurang disadari pentingnya, sehingga sering diabaikan. Menteri ekonomi dan keuangan yang memberikan keterangan bertentangan, berlainan dari waktu ke waktu, berkomentar serampangan atau membadut, hanya menambah lunturnya wibawa pemerintah.

Yang perlu, atau masih bisa ditekan, ialah agar pemerintah bertindak sepadan dengan situasi yang dihadapi, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat kembali. Berikan sinyal positif, termasuk segera memutuskan dan seketika itu juga melaksanakannya. Faktor waktu amat menentukan.

Ada dua hal yang minimal tidak bisa ditunda: hapus subsidi BBM yang membebani anggaran negara, dan hapus persepsi tentang inkompetensi beberapa pembantu presiden di bidang ekonomi dan keuangan, dengan menggeser atau menukar beberapa menteri seperlunya. Keduanya harus dilakukan sekarang kalau ingin ada efeknya pada kepercayaan umum. Sendi stabilitas rupiah, untuk saat ini, adalah pada rasa percaya kepada pemerintah.

Melihat sosok dan sikapnya, sukar dipercaya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mau dan mampu melakukan apa yang sebenarnya mutlak harus dikerjakannya saat ini juga. Tapi siapa tahu, SBY bukan kependekan dari "selalu bimbang ya", lalu seperti pembimbang Hamlet akan berkata: *to be or not to be*, itu soalnya sekarang. ●

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS                                      DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 20										TAHUN 2005	

## Pertamina Menangkan Kasus KBC di Singapura

Jakarta, Bisnis RM

Pengadilan banding Singapura memenangkan Pertamina dalam kasus gugatan Karaha Bodas Company (KBC) atas aset Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak perusahaan Pertamina di Hong Kong.

Keputusan yang dikeluarkan pada 24 Agustus 2005 di Singapura ini, menguatkan keputusan Hakim Choo Han Teck pada Maret 2005 yang menolak banding KBC. Pengadilan Singapura juga menghukum KBC untuk menanggung biaya persidangan dan kerugian yang ditimbulkannya.

Humas Pertamina M Harun mengatakan, kemenangan Pertamina tersebut merupakan bagian dari upaya hukum yang terus-menerus dilakukan BUMN yang mengelola minyak dan gas bumi ini secara konsisten sejak tahun 2000 terhadap keputusan Arbitrase International, yang dinilai Pertamina sangat tidak adil dan merugikan Pertamina serta Pemerintah Indonesia.

Keputusan pengadilan banding tersebut juga memberikan kesempatan kepada Petral maupun Pertamina Energy Services Limited (PES), anak perusahaan Petral di Singapura, untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang diderita sebagai konsekuensi penahanan aset (*mareva injunction*) yang diajukan KBC dengan cara yang salah.

Kerugian yang diderita akibat penahanan aset itu diperkirakan berjumlah besar. Selanjutnya akan dihitung dan dimintakan penggantian kepada pihak KBC. Pada Maret 2005, Pengadilan Tinggi Singapura mencabut tidak hanya

*mareva injunction* yang diperoleh KBC melalui upaya *ex parte* (*in absentia*), tetapi juga menolak seluruh upaya hukum terhadap Petral maupun PES, yang merupakan anak perusahaan Pertamina, karena tidak menemukan alasan untuk itu.

Dalam kasus ini, kata M Harun, Petral dan PES diwakili oleh penasihat hukum Anjali Iyer (Haq & Selvam Solicitors), sedangkan KBC diwakili oleh Alvin Yeo SC (Wong Partnership).

Menurut Harun, KBC merupakan perusahaan yang sekadar didirikan dan hanya diketahui beralamat pada kantor Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG) di Cayman Islands.

KBC juga tidak diketahui pengurus, kantor atau asetnya memperoleh *mareva injunction* pada bulan Desember 2004 sebesar 36 juta dolar AS terhadap Petral di Hongkong. *Injunction* (penahanan/larangan) tersebut juga berlaku terhadap PES di negeri singa Singapura.

KBC memiliki keputusan arbitrase melawan Pertamina sebesar 261 juta dolar AS sehubungan dengan kontrak panas bumi yang ditandatangani pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Kontrak tersebut ditanggihkan oleh Keputusan Presiden yang dikeluarkan atas permintaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) sebagai persyaratan awal untuk saran dan bantuan IMF pada saat krisis keuangan melanda Asia tahun 1997-1998. Pertamina saat ini sedang melawan upaya pendaftaran keputusan arbitrase yang diperoleh KBC. ■ MAF

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS                                      DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL <u>AGST</u> SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 <u>28</u> 29 30 31											
HALAMAN : 1										TAHUN 2005	

## BBM Naik Akhir 2005 Atau Awal 2006 **SBY Diingatin: Jangan Tergelincir Minyak...**

CIREBON, RM. Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir tahun 2005 atau awal tahun 2006. Keputusan yang banyak ditentang masyarakat itu diambil dalam Rapat Kabinet terbatas bidang ekonomi di Cirebon, Sabtu (27/8) petang, kemarin. Namun, rencana kenaikan harga BBM ini baru akan dilaksanakan setelah pemerintah menyelesaikan dana kompensasi BBM dan mengidentifikasi program dana subsidi.

"Belum ada berapa kenaikannya. Angka-angka sedang dihitung. Kenaikan akan dilakukan secara berjenjang dan tidak sekaligus," kata Menko Perekonomian Aburizal Bakrie kepada wartawan usai rapat kabinet terbatas tersebut.

Sehari kemarin, Presiden SBY dan Ani Yudhoyono bersama beberapa menteri berkunjung ke Cirebon untuk menyaksikan pagelaran kesenian

Korwil III Cirebon, Jawa Barat dan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara PT Jamsostek dengan mitra kerjanya.

Anak buah Megawati di parlemen, Ramson Siagian langsung bereaksi. Anggota Panitia Anggaran dari F-PDIP itu mengingatkan, seharusnya Menko Perekonomian Aburizal Bakrie tidak sembarangan menaikkan harga BBM.

"Kalau subsidi dicabut dengan harga minyak dunia yang sudah mencapai lebih dari 65 dolar AS per barel, maka harga premium dan solar bisa mencapai Rp 7000 per liter. Ini kan namanya mencekik rakyat," tukasnya saat dihubungi tadi malam.

Menurut Ramson yang juga anggota Komisi VII DPR itu, pemerintah jangan terlalu berpatokan dengan mekanisme harga minyak dunia interna-

sional. "Jangan cabut subsidi karena itu hanya akan membahayakan pemerintahan. Sebaiknya tim ekonomi yang dipimpin Ical bisa melakukan terobosan-terobosan alias inovasi. Jangan cuma membebani rakyat dengan menaikkan harga BBM yang sangat vital bagi rakyat," tandasnya.

Apalagi, lanjut Ramson, berdasarkan data yang didapatnya dari pemerintah *cq* Departemen Keuangan kemarin, pendapatan per kapita penduduk Indonesia saat ini hanya sebesar Rp 12.053.000 atau setara dengan 1200 dolar AS. Kataanya, hal itu sangat jauh dibandingkan negara tetangga. Ramson memberi contoh Singapura yang pendapatan per kapita 27.800 dolar AS, Malaysia 9700 dolar AS, dan Jepang 29.400 dolar AS.

Karenanya, lanjut Ramson, kalau ada yang bilang bahwa pencabutan subsidi perlu dilakukan agar rakyat tidak manja, dia berani katakan itu tidak tepat. Apalagi, Indonesia adalah produsen minyak dan gas.

"Yang manja itu justru para tukang kemplang utang triliunan rupiah yang ditanggung dengan uang rakyat," ujarnya dengan nada geram.

Lanjut Ramson, periode Januari hingga Juli tahun ini saja, inflasi sudah mencapai 5,09 persen. Makanya, kalau pemerintah berniat mencabut subsidi BBM, dalam hal ini premium dan solar, Ramson meyakini inflasi akan menembus dua digit alias di atas 10 persen.

"Akibatnya rakyat akan makin menderita sebab harga-harga pasti naik. Masih syukur kalau ada peningkatan lapangan kerja. Tapi ini kan nggak. Jadi saya mengingatkan pemerintah agar berhati-hati," tandasnya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Ramson Siagian mengingatkan SBY agar tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM pada akhir tahun ini awal tahun depan.

"Kalau SBY berani menaikkan harga BBM, bisa-bisa beliau 'kepeleset minyak'. Kita hanya mengingatkan agar Pa . SBY hati-hati dan tidak kepeleset," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka* tadi malam.

Kembali ke rapat kabinet yang diadakan di Gedung Negara itu, Gubernur BI Burhanudin Abdullah ikut hadir. Ia juga membahas soal depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang makin terpuruk hingga menembus pada kisaran Rp

10.400 per dolar AS.

Lebih lanjut Ical—sapaan Aburizal Bakrie, mengungkapkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kata Ical, Presiden setuju, namun ia menitikberatkan dua hal. Pertama, dana kompensasi BBM yang telah dilaksanakan saat ini harus benar-benar dilaksanakan secara baik dan sesuai jadwal.

Kedua, identifikasi program dana subsidi langsung harus sudah selesai direncanakan dan harus ada data dari BPS tentang jumlah dan letak orang miskin di Indonesia dan bagaimana mekanisme pengaturannya. "Dengan dua hal itu, baru Presiden bisa menyepakati kenaikan BBM. Ini kajian bila BBM akan dinaikkan," katanya.

Ical berharap, penyelesaian dana kompensasi dan penyaluran dana subsidi itu sudah selesai dilakukan dalam waktu dekat ini. Ia menambahkan, pemerintah akan membahas atau membicarakan dengan DPR tentang kenaikan harga BBM tersebut.

"Berknaan dengan rencana kenaikan BBM, pemerintah akan mengaudit kembali dana kompensasi yang sudah berjalan," katanya.

Sementara itu, Gubernur BI menegaskan bahwa pihak perbankan belum terpengaruh dengan depresiasi rupiah. "Sektor perbankan menu ijukkan indikator masih sangat solid," katanya.

"Ketenangan bekerja di dalam perbankan menjadi jaminan kita semua. Meskipun nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, tapi kondisinya masih baik dan justru akan meningkatkan nilai ekspor dan mengundang investasi yang banyak," tambahnya.

Senada dengan Ramson, anggota Panitia Anggaran (Panggar) lainnya dari F-PKS Rama Pratama juga mengingatkan hal yang sama. Kata anak buah Tifatul Sembiring itu, dalam rapat pembahasan RAPBN Perubahan ke-2 tahun 2005 hari kemarin, Panggar belum bisa membahas kemungkinan rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM sebelum pemerintah menyampaikan neraca awal PT Pertamina yang telah diaudit.

"Selain itu, perhitungan harga pokok produksi semua jenis BBM yang dilakukan oleh konsultan independen hingga kini juga belum selesai. Karenanya kita belum bisa membahas pengurangan subsidi," tegasnya. ■ ZIK/JPN

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS    DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL <u>AGST</u> SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31											
HALAMAN : 3										TAHUN 2005	

MIGAS

## Iklm Investasi Perlu Diperbarui

**JAKARTA (Media):** Industri hulu minyak dan gas di Indonesia saat ini sedang berada pada titik penentuan. Untuk mencapai target produksi minyak hingga 1,3 juta barel per hari (bph) pada 2009, Indonesia perlu memperbarui iklim investasi agar dapat menarik investor.

"Sudah saatnya semua pihak yang terkait bekerja sama dan bahu-membahu membangun, serta meningkatkan investasi di industri migas. Jika kita bisa melakukannya dengan segera, saya optimis dengan masa depan industri minyak di Indonesia," kata Presiden The Indonesian Petroleum Association (IPA) Chris Newton di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, perbaikan iklim investasi akan meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk menanamkan modal mereka, baik untuk proyek-proyek baru maupun yang saat ini telah berjalan. Tingkat kepercayaan diartikan sebagai bukti keberhasilan yang telah dicapai di masa lalu, peningkatan stabilitas ekonomi makro, politik, dan keamanan, serta tercapainya target ekonomi yang diharapkan.

Newton memaparkan Indonesia pernah mengalami puncak produksi minyak pada 10 tahun yang lalu, yaitu mencapai hingga 1,60 juta bph. Namun, saat ini produksi minyak

Indonesia menurun tajam, yaitu hanya 1,07 juta bph. Sementara kebutuhan konsumsi minyak meningkat pada level yang sama, yaitu 1,070 juta bph.

Dia menegaskan kegiatan eksplorasi yang sukses merupakan satu-satunya harapan bagi semua pihak yang terkait dalam industri demi menghentikan kecenderungan menurunnya produksi migas Indonesia. "Tanpa eksplorasi yang sukses dan investasi yang optimal, produksi minyak dari sumber-sumber yang ada sekarang diperkirakan dapat mengalami penurunan sebanyak 50% dalam sepuluh tahun mendatang," ujar Newton.

Pemerintah dan para ahli geologi dari perusahaan-perusahaan minyak tetap optimis dengan potensi *hydrocarbon* di wilayah Indonesia yang belum tereksplorasi. Para investor yang ada saat ini memiliki sumber daya, dana, kemampuan, serta keinginan untuk berinvestasi.

"Dengan terciptanya kondisi usaha dan iklim investasi yang lebih baik, tidak ada alasan bagi investor untuk tidak memanfaatkan sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, Indonesia kembali dapat menikmati bagian yang imbang dari alokasi modal yang tersedia secara global," tambah Newton. (Wis/Ant/E-3)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 20												TAHUN 2005																		

# Pengusaha Minyak Tuntut Iklim Investasi Yang Kondusif

## Jakarta, Bisnis RM

Asosiasi Minyak Indonesia (*The Indonesian Petroleum Association/ IPA*) menekankan pentingnya Pemerintah menciptakan iklim investasi yang kompetitif untuk menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia.

Menurut Presiden IPA Chris Newton, para investor yang ada saat ini memiliki sumber daya, dana, kemampuan serta keinginan untuk berinvestasi. Dengan terciptanya kondisi usaha dan iklim investasi yang lebih baik, tidak ada alasan bagi investor untuk tidak meman-

faatkan sumber-sumber tersebut.

"Dengan demikian, Indonesia kembali dapat menikmati bagian yang imbang dari alokasi modal yang tersedia secara global," ujar Newton di Jakarta, baru-baru ini sehubungan dengan akan diselenggarakannya Konvensi dan Pameran IPA ke-30 di Balai Sidang Jakarta pada 30 Agustus-1 September 2005 yang rencananya akan dibuka Presiden SBY.

Newton melihat, industri hulu migas di Indonesia saat ini sedang berada pada titik penentuan. Untuk itu, industri migas nasional harus

mampu menghadapi segala tantangan menghadapi pasar global. Sebab jika tidak, industri migas akan terus mengalami kemunduran.

"Kami melihat pengusaha/perusahaan migas di Indonesia telah berhasil melalui berbagai tantangan dalam industri ini. Namun, kita perlu mengambil langkah lebih jauh agar dapat berkompetisi di pasar global serta memulihkan kontribusi ekonomi industri migas sebagaimana mestinya," ujarnya.

Lebih lanjut Newton menegaskan, untuk mencapai target produksi minyak hingga 1,3 juta barel per

hari (bph) di tahun 2009, Indonesia perlu iklim investasi yang lebih baik agar dapat menarik investor.

Menurut dia, Indonesia pernah mengalami puncak produksi minyak pada 10 tahun lalu yang mencapai hingga 1,6 juta bph. Namun saat ini produksi minyak Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam, yakni hanya sekitar 1,070 juta bph. Sementara itu konsumsi minyak di dalam negeri meningkat pada level yang sama, yaitu 1,070 bph.

Dia juga mengingatkan, untuk menghentikan kecenderungan menurunnya produksi migas Indonesia, maka kegiatan eksplorasi perlu terus ditingkatkan oleh semua pihak yang terkait dalam industri migas tersebut.

"Tanpa adanya eksplorasi dan investasi yang optimal, produksi minyak dari sumber-sumber yang ada sekarang diperkirakan dapat mengalami penurunan sebesar 50 persen dalam 10 tahun mendatang," ujarnya.

Dia mengungkapkan, pemerintah dan para ahli geologi dari perusahaan-perusahaan minyak, tetap optimis dengan potensi *hydrocarbon* di wilayah Indonesia yang belum tereksplorasi. Presien IPA itu mengharapkan agar Pemerintah Indonesia memelihara para investor yang ada sekarang ini, serta menjadikan mereka sebagai mitra dan "duta" bagi industri perminyakan Indonesia. ■ MAF

## MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 MAJALAH PILARS  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2005

## Jepang tak Buka Cadangan Minyak

● Pasokan cukup. Kurangi ketergantungan.

### Neraca

Tokyo - Jepang tak berniat mengambil cadangan minyak strategisnya kendati terjadi lonjakan harga minyak dan ketergantungan yang tinggi negara itu pada impor energi. "Kami belum masuk ke dalam situasi yang memaksa kami perlu mengambil stok minyak kami," kata Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Shoichi Nakagawa.

Jepang memiliki cukup cadangan minyak daruratnya untuk 170 hari. Tapi Jepang hanya akan memakai cadangan tersebut jika ada kekurangan pasokan. "Ketika kami sampai pada suatu situasi yang sangat mendesak, kami baru akan mengambilnya."

"Tapi ini hanya jika ada kekurangan, dalam pengertian volume pasokan. Kini kami memang memiliki jumlah tersebut. Negara-negara seperti Jepang, Eropa, AS dan China memiliki kapasitas membeli minyak di pasaran."

Jepang tak memiliki sumber energi domestik yang signifikan. Itu memaksanya mengimpor dalam jumlah besar minyak mentah dan gas alam.

Nakagawa mengakui, Jepang terlalu besar bergantung pada minyak, khususnya dari Timur Tengah. Ia mengatakan, Jepang perlu mengembangkan sumber daya energinya sendiri dan meningkatkan penggunaan pipa saluran untuk pengiriman energi.

Harga minyak meningkat ke rekor tertinggi di pasar dunia, karena para produsen berjuang mengimbangi permintaan dari China dan India meningkat.

### Taiwan

Tamparan krisis minyak juga dialami di Taiwan. Per-ekonomian Taiwan melambat lebih jauh Juli dengan indeks indikator utama turun 0,7

persen dari Juni, waktu indeks naik 1,8 persen, angka resmi menunjukkan Jumat (26/8). Angka pada Juli menunjukkan "sinar kuning-biru," sama dengan Juni, yang mengindikasikan perlambatan dalam perekonomian, kata Dewan untuk Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan (CEPD).

CEPD memakai spektrum lima-tingkat untuk mengukur kesehatan ekonomi domestik, dengan biru mengindikasikan resesi, kuning-biru perlambatan, hijau pertumbuhan ajek, kuning-merah pemanasan ringan dan merah pemanasan absolut.

Indeks terpisah dari indikator kebetulan, yang mengukur laju aktivitas perekonomian sekarang, jatuh 0,9 persen dari Juni waktu indeks naik 1,6 persen.

### Vietnam

Sementara itu, Perdana Menteri Vietnam Phan Van Khai menyerukan industri minyak dan gas di negara itu meningkatkan kerjasama internasional guna menarik investasi asing dan untuk belajar tentang kemajuan manajemen dan teknologi. Pada acara ulang tahun ke30 Perusahaan Minyak dan Gas Vietnam (PetroVietnam), Khai juga minta kerjasama memperkuat potensi minyak dan gas.

Proyek besar minyak dan gas Vietnam seperti kilang minyak Dung Quat di Provinsi Quang ngai, kompleks pupuk-listrik-gas di Provinsi Ca Mau dan Kilang Nghi Son dan Komplek Petrokima di Provinsi Thanh Hoa, Khai diminta untuk dioptimalkan guna menggerakkan sumber daya alam guna menjamin kualitas baik dan pembangunan yang direncanakan.

Khai menekankan, pemerintah akan menciptakan berbagai kerjasama menguatkan industri minyak dan gas.

Antara

56





MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : /										TAHUN 2005	

# Ongkos Impor Pertamina Naik 45%

• Pertamina stop beli dolar dari bank komersil.

• Presiden minta warga berhenti "ikut-ikutan" borong dolar.

**Alfan Hamzah**  
**Neraca**

JAKARTA - Meski Pertamina perlu dolar dalam jumlah besar untuk mengimpor minyak, tapi perusahaan perminyakan negara itu tak bisa disalahkan sendiri atas kejatuhan dramatis mata uang republik pekan lalu, kata seorang pejabat perminyakan.

Dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Bloomberg pada pekan lalu, Direktur Keuangan Pertamina, Alfred Rohimone, mengatakan: "Kami tak lagi membeli dolar dari pasar (bank komersil) ... Kami membelinya dari Bank Indonesia. Jika kami beli dari pasar, pasar pasti hancur."

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level Rp 10.390 per dolar pada Jumat petang setelah sempat sebelumnya sempat berpindah tangan di Rp 10.465, posisi terendah sejak 4 Februari 2002. Pelemahan itu menjadikan total penurunan rupiah mencapai 3,9%. Itu yang terbesar dalam tempo sepekan sejak 26 Juli 2002, menjadikan rupiah sebagai mata uang paling buruk kinerjanya dari 16 mata uang di Asia.

Sejumlah analis mengatakan pelemahan rupiah itu dilatari besarnya permintaan dolar Pertamina. Kebutuhan dolar Pertamina, kata Ben Rudd, perencana keuangan regional Asia di ABN Amro Asia Ltd pada 25 Agustus lalu, memicu "lonjakan besar permintaan dolar di dalam negeri." Saat yang sama, katanya,

"kita belum melihat ada peningkatan yang signifikan dalam hal suplai (dolar)."

Menurut Alfred, biaya impor minyak Pertamina melonjak 45% belakangan ini, seiring kenaikan harga beragam minyak olahan seperti bensin.

Impor minyak naik hingga US\$ 1,6 miliar (Rp 16 triliun) pada Juli dari sekitar US\$ 1,1 miliar pada awal tahun ini, kata Alfred.

Dalam wawancara yang sama, Alfred mengungkapkan rencana perusahaan berbasis Jakarta itu menerbitkan surat utang senilai US\$ 500 juta tahun depan meski tak memberi penjelasan mendetil.

Pertamina berencana mengoperasikan penuh fasilitas penyulingannya guna mengurangi volume impor minyak hingga 29% pada Oktober dan November dari level September, kata pimpinan divisi BBM Pertamina, Achmad Faisal, pada 11 Agustus. Pertamina juga berencana mengimpor 12,5 juta barel minyak olahan pada Oktober dan November dari 17,68 juta barel pada September.

Sementara itu, dalam sebuah pidato tanpa teks saat meresmikan kilang minyak Pertamina di Balongan, Jawa Barat, Minggu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan "wajar" bila Pertamina dan beberapa perusahaan negara membeli dolar untuk pembiayaan impor minyak mentah.

"Kalau memborong dolar untuk tujuan yang benar," kata presiden seperti dikutip Kantor Berita Antara, "saya bisa mengerti, tapi kalau memborong dolar untuk ikut-ikutan, apalagi ada rencana yang tidak sedap, jangan diikuti!"

Dalam satu-dua hari ini, kata presiden, pemerintah dan Bank Indonesia akan menyampaikan ke publik solusi memperkuat rupiah.

"Saya," kata presiden, "tidak pernah menganggap ringan sesuatu. Saya tidak pernah menganggap mudah persoalan begitu saja. Ini perlu pemikiran yang luar biasa, tetapi saya yakin akan dapat mengatasi persoalan ekonomi kita."

Bloomberg, Antara

59

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12					13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29 30 31				
HALAMAN : 2											

● cari angin  
**Minyak (Part Two)**

Putu Setia

**N**amanya pedagang, kalau jualannya laku pasti senang. Semakin banyak pembeli yang antri, semakin banyak barang yang dijual, semakin besar untung si pedagang. Teori berdagang itu tidak harus dipelajari sampai di perguruan tinggi, tak perlu gelar sarjana palsu, tidak "makan sekolahan" pun tahu rumus itu. Anehnya, itu tidak berlaku untuk berjualan minyak, apakah itu premium, minyak tanah, atau solar. Berjualan minyak harus siap rugi.

Soalnya, yang berdagang minyak itu pemerintah. Sebagai pedagang, pemerintah bisa dikatakan menjual minyak dengan tidak rela. Kalau yang membeli sedikit, malah senang. Bahkan jika sama sekali tidak ada rakyat yang membeli minyak, pemerintah pasti senang tak kepalang. Cuma, bagaimana sayur di pedalaman bisa diangkut ke kota dan garam di kota bisa dibawa ke gunung kalau mobil angkutan tidak punya premium? Jadi repot juga.

Yang jadi masalah besar, penjualan minyak tak bisa menaikkan harga semaunya. Dengan patokan harga minyak dunia US\$ 66 per barel, harga premium mestinya paling murah Rp 4.600 per liter. Harga itu yang dipatok "para pedagang" di luar negeri. Tetapi di sini, pedagang (supaya gampang dibaca pemerintah) selalu rela *nombok*, sehingga premium dijual Rp 2.400 per liter. Bayangkan, berapa triliun harus dipakai *nombok*. Dalam ilmu dagang, modal pun jadi berkurang, kepentingan lain jadi ditelantarkan.

Tempelan poster di SPBU yang berbunyi "Setiap liter premium yang Anda beli terdapat subsidi pemerintah minimum Rp 500" tak lagi dibaca orang. Malah poster mulai mengupas. *Emangnya gue pikirin*, begitu komentar pemilik mobil. Gerakan penghematan tak jalan, haangat-haangat tahi ayam,

kata sejumlah orang, padahal mereka bukan peternak unggas.

Lalu siapa yang memikirkan minyak? Para menteri kabinet, menurut informasi yang sumbuernya tidak jelas, sudah menyarankan kepada Presiden agar segera menaikkan harga. Jangan tunggu Januari tahun depan, apalagi kurs dolar terhadap rupiah juga sudah makin gila. Tapi Bapak Presiden—ini juga sumbernya tidak jelas—tak mau menaikkan harga minyak saat ini. Bukan apa-apa, ini kan menjelang "satu tahun naik takhta". Biasanya, di hari-hari seperti itu, mahasiswa punya *kerjaan* untuk "memeriahkan" peringatan itu. Misalnya dengan aksi demo. Nah, kalau harga minyak naik, bertambah amunisi para demonstran. Mahasiswa pasti *ngotot* berteriak, "Batalkan kenaikan harga BBM, sekarang juga"—meskipun orang tahu aksi itu tak akan lama karena memang bikin capek, sementara harga minyak tetap tidak turun.

Bisakah rakyat membeli minyak lebih mahal dari sekarang? Di NTT harga premium pernah Rp 10 ribu per liter, di Sumba pekan lalu bahkan Rp 15 ribu per liter. Minyak di pedesaan Jawa, yang distribusinya bagus, sering langka dan dijual Rp 3.000. Ternyata dibeli juga. Yang perlu dijelaskan kepada rakyat, berapa sesungguhnya harga yang pas untuk minyak itu, supaya pedagang tidak bangkrut. Utak-atik untuk menentukan harga ini harus transparan. Soalnya, masyarakat masih ingat masa-masa lalu, ketika harga minyak dunia meroket naik di atas US\$ 25 per barel, kala itu ada sebutan "*booming* minyak", yang menguntungkan negara. Sekarang harga minyak melambung tinggi kok malah belingsatan. Apa yang terjadi dengan Nusantara ini? Apa tanah kita tak lagi mengandung minyak? Ini yang tidak dijelaskan. ●

2005

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																											
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 4.22												TAHUN 2005																		

# Kepemilikan Cepu Urusan Pertamina dan ExxonMobil

Pemerintah baru campur tangan dalam hal pola bagi hasil, bonus, dan komitmen program kerja.

**JAKARTA** — Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Iin Arifin Takhyan menilai, masalah kepemilikan saham (*participating interest*) antara PT Pertamina dan ExxonMobil Oil Indonesia di Blok Cepu merupakan urusan bisnis. "Pemerintah tidak akan ikut campur. Itu urusan korporat," kata Iin di Jakarta pekan kemarin. Pertamina dan ExxonMobil berhak menyelesaikannya berdasarkan perundingan bisnis.

Mekanismenya, tutur Iin, kedua perusahaan itu bernegosiasi terlebih dulu. Hasil kesepakatannya dilaporkan

kepada pemerintah. Campur tangan akan dilakukan bila pembicaraan berkaitan dengan pemerintah. Misalnya mengenai pola bagi hasil, bonus penandatanganan, dan komitmen program kerja.

Masalah kepemilikan saham itu muncul setelah Pertamina tidak menerima hasil nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MOU) tim pemerintah dengan ExxonMobil soal pengembangan Blok Cepu.

Pertamina melalui direktur utamanya, Widya Purnama, menginginkan hak mayoritas dalam pengelolaan Cepu atau memiliki saham 55 persen dan ExxonMobil 45 persen. Padahal dalam MOU itu diputuskan, pengelolaan Cepu dilakukan perusahaan baru dengan kepemilikan Pertamina 45 persen, ExxonMobil 45 persen, dan pemerintah daerah 10 persen.

Pernyataan Widya itu se-

suai dengan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) Pertamina 30 Juni lalu. Pertamina tunduk terhadap perintah RUPS.

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro memerintahkan Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengklarifikasi perbedaan angka kepemilikan saham di Blok Cepu, antara hasil RUPS Pertamina dan kesepakatan tim negosiasi Cepu.

Bagi Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis, pembagian saham menurut RUPS Pertamina itu sudah benar. Dengan pola itu Pertamina menjadi dominan, sehingga bisa menjadi operator Blok Cepu. Pertamina juga berkesempatan mendapatkan pengalaman mengelola blok minyak terbesar di Indonesia. Ini berarti menguntungkan kepentingan nasional.

Namun, dengan formula 45 persen untuk Pertamina, 45 persen ExxonMobil, dan 10 persen pemda, kata Emir, yang dominan adalah ExxonMobil. Sebab, perusahaan Amerika Serikat ini dipandang sebagai salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, sehingga dianggap lebih mampu dibanding Pertamina.

Karena itu, Emir mengkritik kesepakatan tim negosiasi pemerintah memilih pola itu. Seharusnya 10 persen keikutsertaan pemda masuk ke Pertamina, sehingga kepemilikan Pertamina menjadi 55 persen dan ExxonMobil 45 persen. "Tahu *nggak* siapa pemilik 10 persen jatah pemda itu? Miliknya orang-orang dalam (pemerintah), para pejabat kita juga. Masak, harta karun kita mau dijarah begitu saja," kata Emir.

● RETNO SULISTYOWATI | AGUS SUPRIYANTO

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 20											TAHUN 2005																			

## ▼ Ngotot Mau Ambil Alih Blok A Di Aceh Pertamina Disuruh Nego Dengan Exxon

### Jakarta, Bisnis RM

Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Iin Arifin Takhyan, mengkritik keinginan Pertamina Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang ngotot untuk mengambil alih pengelolaan blok A tanpa berbicara dengan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI),

Menurut dia, semestinya Pertamina NAD membicarakannya secara langsung dengan EMOI karena pemerintah tidak bisa campur tangan dalam kasus tersebut. Di blok A yang serius akan melepas *participating interest*-nya adalah Exxon-

Mobil. Sementara untuk Conoco Phillips belum membicarakan keinginannya untuk melepas *participating interest*-nya kepada pemerintah.

"Jadi kalau Pertamina ingin mengelola blok A, itu harusnya *business to business* (B to B) dengan Exxon, bukan dengan pemerintah," kata Iin di sela-sela diskusi "Mencari Kebijakan Migas Yang Tepat," di Jakarta, baru-baru ini.

Dia mengingatkan bahwa hasil keputusan akhir ada di tangan Exxon, sehingga nantinya tergantung Exxon, apakah ingin mem-

berikan pengelolaan blok A ke Pertamina atau tidak.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) Suyitno Patmosukismo. Menurutnya permintaan Pertamina untuk mengelola blok A awalnya berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.35 tahun 2004 tentang hulu. Dalam PP itu disebutkan, perusahaan nasional yang dimiliki pemerintah 100 persen, diberikan prioritas pengelolaan apabila daerah tersebut dilepas setelah kontrak selesai. ■ MAF

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30	31						
HALAMAN : 7											TAHUN 2005

### Medco Kelola Blok Libya

JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco-Energi) mengeluarkan US\$ 10 juta untuk membiayai eksplorasi di blok 47 di Libya selama 4 – 5 tahun mendatang. Untuk pengembangan blok tersebut mitra kerja MedcoEnergi, Verenex, juga mengeluarkan sejumlah biaya yang sama, mengingat kepemilikan keduanya yang sama besar di blok itu. Sebagai tahap awal, MedcoEnergi dan Verenex akan melakukan pengeboran dua hingga tiga sumur.

“Eksplorasi di blok itu sudah jalan, operator kami Verenex sudah mulai melakukan pengerjaan pengeboran. Untuk 4 hingga 5 tahun ke depan, kami komit berinvestasi US\$ 20 juta karena risiko di blok ini relatif kecil,” kata Direktur Keuangan Medconergi Darmoyo Doyoatmojo di Jakarta pekan lalu. (ari)

63

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31		
HALAMAN: 13		
TAHUN 2005		

# RI braces for liberalization of downstream oil and gas sector

**F**ollowing is the first of a series of articles planned in anticipation of the liberalization of the country's downstream oil and gas sector later this year.

Like a family anxiously waiting for a baby to be born, oil and gas players, as well as customers, are eagerly anticipating Nov. 23, the day state oil and gas firm Pertamina's monopoly in the downstream sector ends.

For customers, it means they will see names other than Pertamina on gasoline stations, like Petronas and Chevron, and for once they will have a choice from whom to buy petroleum-based fuel.

With the introduction of Law No. 22/2001 on oil and gas, Pertamina will not be the sole entity importing fuel into the country and distributing it through some 2,600 pump stations throughout the archipelago.

The new law also enables the liberalization of the other segments in the sector, namely refining, storage and transportation.

Pertamina's regulatory function over the downstream industry is also being transferred to the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas), formed in 2002.

"Our task is to ensure the distribution of fuel to all parts of Indonesia," chairman of BPH Migas, Tubagus Haryono, told *The Jakarta*

**Leony Aurora**  
*The Jakarta Post/Jakarta*

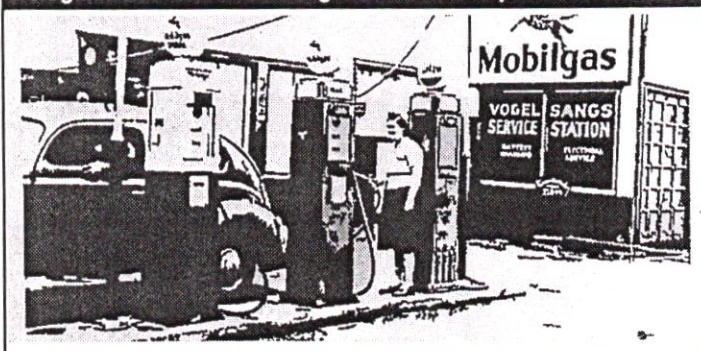
Post recently.

The bulk of the downstream sector in Indonesia is the distribution of subsidized fuel products — gasoline, kerosene and diesel fuel — for small-scale enterprises, households, transportation and state power firm PLN.

BPH Migas, together with the Ministry of Energy and Mineral Resources, is still drafting the concepts of public service obligation (PSO) for the regulated, or subsidized, fuel. Despite that, many multinational, as well as local, companies have applied for licenses to operate, at least to sell unregulated fuel.

According to data from the ministry, PT Intanjaya Agromegah and PT Berkah Refinerindo Utama have secured principal licenses to build refineries capable of processing 300,000 barrels per day (bpd) — one in Parepare, South Sulawesi, and another in Trenggalek, East

## Deregulation and restructuring of downstream petroleum business



- ▶ **Nov. 23, 2001** — Law No. 22/2001 on oil and gas
- ▶ **Dec. 30, 2002** — Govt. Regulation No. 67/2002 and Presidential Decree No. 86/2002 on the formation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas)
- ▶ **May 13, 2003** — Appointment of BPH Migas Committee (Presidential Decree No. 53/2003)
- ▶ **June 18, 2003** — Govt. Regulation No. 31.2003, Pertamina is made a limited liability company
- ▶ **Jan. 23, 2004** — Ministerial Decree No. 1088/2003 on the authority of BPH Migas
- ▶ **Oct. 14, 2004** — Govt. Regulation No. 36/2004 on the downstream sector
- ▶ **Nov. 23, 2005** — End of Pertamina's monopoly

Source: BPH Migas

JPI Darul Aqsha/ Irma R.D.

Java, respectively.

Applications from seven other companies are currently under evaluation. One of them — the smallest refinery with a capacity of 800 bpd in Musibanyuasin, South Sumatra — is under construction.

Nine companies, including PT Nicor Lubrindo Pratama, PT Tranaco Utama and Pertamina subsidiary PT Elnusa Petrofin, have got licenses to store fuel and crude oil, with expected investments reaching US\$420 million.

Fuel storage facilities of Nicor, with an investment of \$150 million, are reported to be under development.

But the most attractive is the retail business, with Malaysia's Petroliaam Nasional Bhd (Petronas) and Dutch's Shell already securing preliminary licenses to open

64

gasoline stations and sell non-subsidized fuel, such as high-octane products similar to Pertamina's Pertamax and Pertamax Plus.

"Companies with preliminary licenses will get permanent ones after showing their commitment to building a network here," said Tubagus.

According to BPH Migas, Petronas' local unit PT Petronas Niaga Indonesia is ready to open 200 gas stations here. The first one will open in December in Greater Jakarta. The company plans to expand to Bandung, Surabaya and Semarang.

Shell, meanwhile, is planning to build 400 outlets over eight years.

Local companies coming into the retail sector include Pertamina subsidiaries PT Elnusa Petrofin and PT Elnusa Harapan — which plan to build 200 pump stations over five years — PT Sigma Rancang Perdana, PT Pandu Selaras and PT Petroleum Limas.

According to Government Regulation No. 36/2004 on downstream oil and gas activities, business entities can only own and wholly operate 20 percent of their total network — a system called company owned, company operated (COCO).

"For the rest (80 percent), they have to cooperate with local parties under the systems of CODO and DODO," said Tubagus.

CODO stands for company owned, dealer operated, which means the gas station may be owned by the company but operated by a local partner. DODO is dealer owned, dealer operated, meaning the company supplies only the fuel, but the outlet is owned and operated by another firm, said Tubagus.

64

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>									
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM								
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL <u>AGST</u> SEPT    OKT    NOV    DES										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31										
HALAMAN : 14										
TAHUN 2005										

# Oil prices to keep stock investors on edge

Scott Malone  
*Reuters/New York*

As the summer of discontent over runaway oil prices comes to an end, stock investors will pore over key U.S. economic data, including Friday's August payrolls report and retailers' monthly sales figures, for signs of how big a toll crude's surge has taken on the economy.

With oil hitting a record \$68 a barrel last week, Wall Street's fear is that consumer spending and corporate investment will suffer. When companies and individuals have to devote more of their available cash to pay more for gasoline, electricity and other energy costs, that leaves less to spend on business equipment, clothing or other items.

"With the increased focus on the potential of an economic slowdown, driven by the higher energy prices, anything that comes out of the economic data to either support or refute that is going to be key," said John Caldwell, chief investment strategist at McDonald Financial Group, of Cleveland.

On Thursday, major U.S. retailers will report August sales, pro-

viding a gauge of consumer spending during the key back-to-school shopping season.

The same day, August U.S. car and truck sales are due, with economists expecting a decline from July levels. A report on personal consumption also is due on Thursday, with the forecast calling for a gain, according to economists polled by *Reuters*.

The consumer confidence index for August from the Conference Board, a private research group, kicks off the week's economic calendar on Tuesday. The forecast calls for the index to slip to 101.5 from a previous reading of 103.2, according to economists polled by *Reuters*.

July factory orders, due on Tuesday, are expected to drop, compared with a previous month's gain.

In contrast, the Institute for Supply Management's August index of U.S. manufacturing activity, due on Thursday, is expected to show a slight pickup in pace from July.

If a weaker-than-expected reading comes in on any of these data points, Wall Street could take that as a sign that high oil prices are weighing on the economy.

Oil's surge to yet another

record last week took a toll on the major U.S. stock indexes. On Thursday, U.S. crude jumped to US\$68 a barrel, the highest price since oil futures started trading on the New York Mercantile Exchange in 1983.

For the week, stocks fell, giving up their mid-summer gains. The blue-chip Dow Jones industrial average finished the week down 1.5 percent, while the broad Standard & Poor's 500 index slipped 1.2 percent, and the tech-laced Nasdaq Composite Index declined 0.7 percent.

"A lot of the short-term action is dependent on oil prices," said Michael Metz, chief investment strategist at Oppenheimer & Co., of New York.

On Friday, though, U.S. oil prices retreated late in the day on expectations that Hurricane Katrina would bypass oil and gas production in the Gulf of Mexico. NYMEX crude for October delivery settled on Friday at \$66.13 a barrel, down \$1.36.

A drop in oil prices from their current peak would likely drive stocks higher in the week ahead, strategists said. They also noted volume is likely to be light in

65

the coming week, with many traders trying to squeeze in final vacation days.

"My guess is we've seen a little bit of a blow-off on oil and it's going to be a little bit more of a hospitable climate, as far as oil prices are concerned," Metz said.

Nabi cited a historical trend as a reason to expect oil prices to ease.

"I go back to late 1979 and 1980, at the point when oil had the last spike in price," said Stanley Nabi, vice chairman of Silvercrest Asset Management in New York. "Oil stocks ignored that spike. That's exactly what they are doing right now ... This is an indication that maybe we are going to have a peak here in oil prices."

The American Stock Exchange index of energy companies, which usually rises with oil prices, has fallen 5 percent in the last two weeks as crude has hit new highs.

Still, if oil prices continue their rally, it could signal trouble for equities.

"If we saw them continually ratcheting higher, that would be a negative for stocks," McDonald Financial Group's Caldwell said. "Investors do feel that energy prices matter."

On Friday, the Labor Department's employment report is expected to show that U.S. nonfarm payrolls added 190,000 jobs in August, according to economists polled by *Reuters*. In July, the economy added 207,000 nonfarm jobs.

"I think the data will be supportive of good, solid employment figures," Nabi said.

But he warned that positive numbers can be interpreted in different ways.

"Employment will be solid. Then the naysayers will say that also means that the Fed is going to have its marching orders from the employment data to further raise interest rates."

The data will dominate the week's agenda, with the wave of quarterly earnings reports from U.S. companies near its end. Only four S&P 500 components due to report next week, including jeweler Tiffany & Co. and tax preparer H&R Block Inc.,

So far, 402 of the 482 S&P 500 companies that have reported earnings have met or beaten analysts' forecasts, with the group as a whole running 4.3 percent ahead of consensus estimates, according to *Reuters* Estimates.

65

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2005

## Efisiensi energi vs subsidi

Oleh MAXENSUS TRI SAMBODO  
Peneliti Pusat Penelitian  
Ekonomi LIPI

**K**ebutuhan akan energi semakin meningkat dari tahun ke tahun. The International Energy Agency (IEA) dalam buku *World Energy Outlook 2004* telah memberikan gambaran umum tentang kebutuhan energi dunia hingga 2030.

Studi yang dilakukan oleh Faith Birol selaku *Chief economist* dan Pimpinan pada Divisi Analisis Ekonomi IEA menyimpulkan dua hal penting. *Pertama*, dengan mengasumsikan semua pemerintah di dunia tidak melakukan perubahan kebijakan di bidang energi maka pada 2030 kebutuhan energi akan meningkat sekitar 60% dan negara-negara berkembang akan menyerap dua per tiga dari total energi dunia.

*Kedua*, permintaan energi akan tetap didominasi oleh bahan bakar yang berasal dari fosil terutama minyak (*non-renewable energy sources*) dan permintaan minyak akan semakin meningkat terutama dari negara-negara berkembang.

Menurut data yang dikeluarkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada 1980 untuk menghasilkan US\$3,3 pendapatan kotor domestik (GDP dengan menggunakan paritas daya beli 1995 sebagai tahun dasar) diperlukan satu satuan energi setara barel minyak.

Pada 1990 angka ini meningkat menjadi US\$3,9 dan

2001 turun menjadi US\$3,7. Dengan demikian dalam periode 1980-1990 untuk setiap penggunaan energi telah mengarah pada penciptaan nilai tambah yang lebih besar sebagai akibat dari industrialisasi dan berkembangnya sektor jasa. Hal ini sekaligus menandakan energi telah digunakan lebih efisien.

Namun demikian pada periode 1990-2001 angka efisiensi energi turun 0,2 poin. Terdapat dua penjelasan untuk hal ini. *Pertama*, setelah krisis ekonomi 1997/1998 banyak usaha yang harus gulung tikar ataupun menghentikan usaha untuk sementara.

*Kedua*, dalam jangka panjang perekonomian nasional mendapat kesulitan di dalam meningkatkan efisiensi (inovasi) penggunaan energi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebab mengapa efisiensi energi tidak dapat berjalan yaitu akibat kebijakan harga energi yang terdistorsi oleh subsidi.

Tentu kebijakan subsidi semacam ini tidak akan bertahan dalam jangka panjang terlebih dalam keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah. Terdapat dua hal penting yang dapat menurunkan kapasitas keuangan negara yaitu harga minyak dan nilai tukar rupiah. Jika diperhatikan harga minyak mentah dunia cenderung meningkat sejak 2002. Harga rata-rata yang ditetapkan oleh OPEC pada tahun tersebut sekitar US\$24,36 untuk setiap barel dan saat ini harga minyak men-

tah mencapai US\$68/barrel. Dengan demikian dalam jangka waktu kurang dari empat tahun harga minyak mentah sudah meningkat 180%.

Naiknya harga minyak mentah diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yang saat ini mencapai lebih dari Rp10.000,00/US\$. Karena Indonesia juga sebagai negara pengimpor minyak maka harga minyak impor juga menjadi mahal. Sehingga peningkatan subsidi tidak hanya berasal dari naiknya harga minyak akan

**Jika harga minyak terus terdistorsi seperti sekarang ini sebenarnya pemerintah juga yang akan rugi. Sebab seluruh risiko harga akan ditanggung oleh pemerintah sendiri.**

tetapi juga akibat melemahnya nilai tukar.

Di samping itu jika dilihat pada lonjakan harga minyak pertama 1973/1974 kemudian di 1979 yang berlanjut pada 1981, pada waktu itu kebijakan ekonomi yang dijalankan sangat proteksionis dengan pengembangan industri berbasis substitusi impor.

Akibatnya upaya menggenjot ekspor non-migas terabaikan dan orientasi ekonomi menjadi *inward looking*. Ke-

tika harga minyak turun drastis dari US\$28 per barel menjadi US\$10 per barel pemerintah mulai banting stir kebijakan dengan mengedepankan promosi ekspor dan kegiatan penanaman modal asing.

Hal serupa juga terjadi akhir-akhir ini ketika harga minyak naik, namun sekarang sebagian besar kebutuhan minyak sudah harus diimpor jadi kondisinya berbeda dengan lonjakan harga minyak pertama. Sebagai akibatnya pemerintah mencanangkan gerakan penghematan energi.

### Polusi udara

Kebijakan harga energi bersubsidi juga dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup terutama polusi udara. Penggunaan energi berbasis fosil akan mengeluarkan karbon dioksida.

Dalam laporan *World Energy Outlook 2004*, untuk skala dunia emisi karbon dioksida akan meningkat 60% pada 2030 di mana dua per tiga total emisi karbon akan berasal dari negara berkembang yang juga paling banyak menggunakan batu bara (*carbon-intensive fuel*). Saat ini Indonesia berada dalam peringkat 21 dunia dalam hal emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar.

Dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan akan energi maka pemerintah perlu segera melakukan investasi di sektor perminyakan dan kelistrikan dengan menggalang partisipasi aktif dari kalangan swasta.

Untuk itu pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kedua sektor tersebut. Misalkan dengan memberikan kepastian akan undang-undang, dan menghapuskan praktik monopoli terutama yang berasal dari perusahaan milik negara. Jika hal hal ini tidak segera dilakukan maka dapat menjadi ancaman bagi upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, insentif harga juga menjadi penting dalam mendorong kegiatan investasi. Jika harga minyak terus terdistorsi seperti sekarang ini sebenarnya pemerintah juga yang akan rugi. Sebab seluruh risiko harga akan ditanggung oleh pemerintah sendiri.

Lebih jauh hal ini tidak akan meningkatkan daya saing perekonomian nasional bahkan sebaliknya pemborosan dana. Kita bayangkan jika sektor industri yang menyerap begitu besar energi dan sebagian dari mereka industri yang berorientasi ekspor. Tentu subsidi yang dikeluarkan akan banyak dinikmati oleh pihak asing. Ini sama saja dengan dengan penyelundupan BBM ke luar negeri.

Selanjutnya pemerintah juga perlu mendorong penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Penyediaan sarana transportasi publik yang berkualitas dapat menjadi sasaran jangka menengah terutama di kota besar.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS                                      DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : A.22										TAHUN 2005	

## Lagi, PIM Terancam Stop Operasi

JAKARTA — PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terancam berhenti beroperasi. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian gas untuk pabrik pupuk di Nanggroe Aceh Darussalam ini setelah 6 September nanti. Stok gas hanya cukup sampai tanggal itu.

"Ada kemungkinan PIM akan berhenti operasi," kata Direktur Utama PIM Hidayat Nyakman kepada koran ini di Jakarta, Sabtu (27/8).

Komitmen satu kargo gas dari Oman yang disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab pekan lalu, menurut Hidayat, belum ada realisasi.

Namun, Menteri Negara BUMN Sugiharto mengatakan, pemerintah berusaha mencari gas untuk PIM. Hal ini akan dibahas bersama Menko Perekonomian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 6 September.

Sebelumnya, Alwi mengatakan komitmen gas itu disampaikan Menteri Perminyakan Oman. Gas itu untuk menggantikan gas ExxonMo-

bil di Aceh yang sedianya dikirim ke Jepang atau Korea.

Namun, kata Alwi, tim teknis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral harus menindaklanjuti pembicaraan itu. Misalnya menyangkut harga, volume pasokan, dan waktu pengiriman. "Komitmen itu masih sebatas lisan," katanya.

Pemerintah juga melobi Qatar. Dalam pertemuan dengan emir Qatar di Singapura beberapa waktu lalu, kata Alwi, Qatar berjanji akan memasok gas. "Tapi kami masih menunggu kabar lebih lanjut," kata dia. PIM sendiri sudah ke Qatar pada bulan lalu sambil membawa pesan Presiden. Hanya, kemungkinan besar Qatar baru akan memenuhi pasokan gas pada awal tahun depan.

Awal Juli lalu, PIM juga sempat terancam berhenti beroperasi karena pasokan gas dari ExxonMobil hanya cukup hingga 8 Juli. Beruntung, ExxonMobil masih bisa memasok gas. Namun, gas itu harus diganti pemerintah.

● TITO SIANIPAR

67

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 22		TAHUN 2005

# 6 September, PIM Stop Produksi

JAKARTA – Pemerintah baru membahas pasokan gas alam cair PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada 6 September mendatang. Pada waktu bersamaan, manajemen PIM menghentikan produksi karena cadangan gas habis.

Menurut Meneg BUMN Sugiharto, kelanjutan pasok gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) untuk PIM akan dibicarakan secara terintegrasi dengan pasokan gas ke beberapa industri lainnya.

"Kami akan membicarakannya di Kantor Menko Perekonomian pada 6 September," kata Sugiharto menjawab *Investor Daily* di Jakarta, Jumat malam (26/8).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PIM Hidayat Nyakman yang dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Minggu (28/8), mengemukakan, manajemen sudah memutuskan untuk mematikan sistem produksi pada 6 September. "Soalnya, pada tanggal itulah cadangan gas kami habis," tuturnya.

Menurut Meneg BUMN, upaya pemerintah mencari LNG untuk PIM di pasar *spot* belum berhasil. "Kami akan menyiapkan pembelian gas di pasar *spot* dalam skala besar untuk PIM, mengingat pasok dalam negeri baru siap pada 2008 setelah ladang migas Blok A Arun berproduksi," paparnya.

Dia menambahkan, pembahas-

an pasokan LNG untuk PIM akan melibatkan sejumlah menteri, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan (Menkeu) Jusuf Anwar, dan menteri terkait lainnya.

"Tapi pada dasarnya kami akan terus berusaha meski *swap* gas belum bisa terlaksana. Rapat level menteri itu dilakukan karena kelangkaan pasokan gas selama ini saling terkait dengan masalah subsidi," ucapnya.

Ketika ditanya apakah PIM diinstruksikan agar menghentikan produksi untuk sementara, Sugiharto menegaskan, sejauh ini belum ada keputusan, apakah tutup sementara atau tutup dalam jangka lama. "Soalnya, berdasarkan asumsi pemerintah, gas untuk PIM akan dicarikan dari pasar *spot*," ujarnya.

## Tunggu Penjelasan

Menurut Hidayat Nyakman, pihaknya masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai penghentian operasi PIM, apakah hanya sementara atau jangka panjang.

Dia mengungkapkan, penghentian operasi sementara dan jangka panjang memiliki implikasi biaya perawatan yang berbeda. Jika berhenti sementara (maksimum enam minggu), berarti PIM butuh biaya perawatan lebih mahal ketimbang berhenti untuk jangka waktu lebih dari setahun.

"Jika instruksinya berhenti untuk jangka waktu lama, berarti biayanya murah karena kami hanya butuh biaya *maintenance* untuk menyedot atau menguras kondensat dalam instalasi produksi," paparnya.

Hidayat Nyakman beberapa waktu lalu mengumumkan, PIM hanya akan mampu beroperasi hingga 6 September 2005, mengingat pada tanggal itu pasokan gas Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) terhenti.

"Kontrak pasokan gas dari EMOI ke PIM berakhir pada 6 September 2005. Bila pemerintah belum memperoleh kontrak baru lagi, otomatis pada tanggal itu EMOI tidak lagi memasok gas ke PIM," katanya.

Sekjen Departemen Perindustrian (Deperin) Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, persoalan yang dihadapi industri di NAD, khususnya PIM, adalah murni persoalan bisnis. "Tidak ada kaitan politik. Problemnnya hanya di gas. Jika gasnya ada maka tidak ada masalah," katanya. (kzy)

58

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS                                      DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 22										TAHUN 2005	

## Nasib AAF Belum Jelas

JAKARTA – Meneg BUMN Sugiharto mengungkapkan, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura selaku pemegang 40% saham PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) ihwal kelanjutan nasib industri pupuk tersebut.

"Kami belum dapat *notice of interest-nya*," kata Meneg BUMN di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia mengakui, seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), AAF juga menghadapi kelangkaan pasokan gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*). Bahkan, industri pupuk di Aceh Nanggroe Darussalam (NAD) itu sudah lama menghentikan produksi.

AAF merupakan industri pupuk

patungan negara-negara Asean. Indonesia menguasai 60% saham, Malaysia 13%, Filipina 13%, Thailand 13%, dan Singapura 1%. Akibat tidak adanya pasokan gas, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura memutuskan melepas sahamnya di AAF.

Berdasarkan ketentuan, RI memiliki hak pertama untuk membeli saham itu. Namun jika Pemerintah RI tidak bersedia, hak itu dilimpahkan kepada pihak ketiga.

Pemerintah RI, menurut sumber *Investor Daily*, telah memutuskan untuk tidak membeli 40% saham AAF yang dikuasai Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura.

Dengan demikian, ada dua opsi yang akan diambil, yakni menjual 40% saham empat negara Asean

kepada pihak ketiga atau melikuidasi PT AAF.

Menurut Direktur Operasi AAF Alita Ilyas, manajemen AAF berencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 3 September mendatang.

"RUPSLB akan memutuskan pemenang *law firm* pelaksana likuidasi yang telah ditenderkan. Perseroan telah meminta pemegang saham agar menunjuk *law firm* selaku likuidator," tuturnya.

Dia menjelaskan, RUPSLB tersebut akan menjadi forum resmi pemegang saham asing untuk menerima jawaban Pemerintah RI bahwa Indonesia tidak sanggup membeli saham AAF, sehingga menawarkan likuidasi. kzy)

69



MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 22											TAHUN 2005																			

Setelah Anjlok Akibat Serbuan Produk Impor

# Pertamina Menguasai 50% Pasar Pelumas

**BANDUNG, (PR).-**

Setelah sempat anjlok akibat membanjirnya produk pelumas dari luar negeri di Indonesia, Pertamina kini kembali bangkit dan mampu menguasai pasar pelumas hingga 50% dari penjualan pelumas di Indonesia. Selain itu, dalam memperkuat bisnisnya, perusahaan minyak milik negara ini telah memproduksi 30 merek pelumas dengan 200 jenis turunannya.

Demikian diungkapkan General Manager Unit Pelumas PT. Pertamina, Djaelani Sutomo kepada "PR" usai meresmikan OliMart Kaef Motor di Rancaekek, Kab. Bandung, Rabu beberapa waktu lalu. OliMart merupakan inovasi baru bisnis ritel pelumas Pertamina yang bekerja sama dengan pengusaha bengkel. Dan OliMart Rancaekek merupakan pertama di Indonesia.

Menurut Djaelani, sejak keluar

Keputusan Presiden (Kepres) No. 21 tahun 2001, sekira 230 merk pelumas dari luar negeri membanjiri pasar pelumas di Indonesia. Namun belakangan, setelah adanya kenaikan bahan baku pembuatan pelumas, beberapa merk pelumas tersebut hilang karena perusahaannya banyak yang kolaps.

Begitu juga pelumas produk Pertamina, sebelum adanya kepres tersebut, pelumas Pertamina menguasai sekira 70% pasar pelumas di Indonesia. Namun karena banyaknya produk luar negeri, penjualan pelumas Pertamina pun turun hingga 30%. "Penurunan itu lebih disebabkan shock karena banyaknya produk pelumas dari luar negeri," kata Djaelani.

Setelah itu terjadi, Pertamina pun membuat terobosan hingga akhirnya dari tahun ke tahun pelumas Pertamina kembali eksis dan penjualannya merangkak naik dipasaran. "Sampai tahun 2005 ini,

pelumas Pertamina sudah menguasai pasar hingga 50% dan mudah-mudahan saja bisa kembali ke semula hingga 70%," katanya.

Untuk memenangkan persaingan ini menurut Djaelani, strategi yang diterapkan lebih memilih selera dan kebutuhan konsumen terhadap pelumas. Jadi apa saja keinginan konsumen mengenai pelumas, Pertamina akan memenuhinya. "Kami punya fasilitas pabrik, laboratorium, bahan baku dan yang lainnya sehingga kami tinggal memproduksi pelumas sesuai kebutuhan konsumen saja," katanya.

Apalagi Pertamina selalu meng-update perkembangan teknologi sehingga teknologi pelumas terkini pun sesuai keinginan konsumen akan diwujudkan. Tentu saja Pertamina akan memberikan harga yang bisa bersaing sehingga diminati masyarakat. (A-113)\*\*\*

71

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 6											TAHUN 2005																			

# Pertamina Kurangi Jumlah Agen Pemasok Minyak Tanah

*Tidak Akan Mengurangi Jatah untuk Wilayah Sumedang*

SUMEDANG, (PR).-

Jumlah agen pemasok minyak tanah ke pangkalan-pangkalan minyak tanah di Kab. Sumedang, dipastikan akan dikurangi dari yang semula 37 agen menjadi 12 agen. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumedang, Drs. H. Ali Badjri, M.M., Minggu (28/8) kepada "PR" menyebutkan, kebijakan itu diambil atas kesepakatan antara Pertamina dengan para agen yang selama ini memasok minyak tanah ke Kabupaten Sumedang, dalam pertemuan bersama pekan kemarin.

Namun, tegasnya, pengurangan jumlah agen tersebut, bukan berarti akan turut mengurangi jatah minyak tanah untuk Sumedang. Tetapi, hal itu hanya sebagai langkah untuk lebih menertibkan pendistribusian minyak tanah ke Sumedang.

Diterangkannya, jatah minyak tanah untuk Sumedang, belakangan ini dipasok Pertamina melalui 37 agen. Namun, dari jumlah agen tersebut, hanya ada empat agen yang melayani khusus Sumedang. Selebihnya merupakan agen yang

juga melayani pengiriman ke pangkalan di luar Kab. Sumedang.

Ali menyebutkan, dalam pertemuan itu, pihak Pemkab Sumedang dan Pertamina sepakat, bahwa agen yang memasok minyak tanah ke Sumedang, tak boleh lagi ada yang merangkap sebagai pemasok ke daerah lain. Dan, atas kesepakatan para agen pemasok minyak tanah Sumedang, dalam pertemuan itu, Hiswanamigas menunjuk 12 agen pelayan khusus Sumedang dari 37 agen tadi, termasuk empat agen khusus Sumedang sebelumnya.

"Berdasarkan pertemuan itu pula, maka jatah minyak tanah untuk Sumedang, hanya akan dipasok oleh 12 agen khusus. Jadi, tidak akan ada lagi agen pemasok minyak tanah untuk Sumedang yang juga melayani pasokan ke pangkalan di luar Sumedang," ujarnya, seraya berharap melalui cara tersebut, pasokan minyak tanah ke Sumedang akan lebih tertib dan mudah diawasi. "Mudah-mudahan dengan cara ini, Sumedang tidak akan lagi dilanda kasus kelangkaan minyak tanah seperti

yang sudah-sudah," harapnya.

Sementara itu, untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah di wilayahnya, Pemkab, bekerja sama dengan Pertamina dalam dua hari terakhir, telah melakukan dua kali operasi pasar minyak tanah. Masing-masing di Kecamatan Cibugel yang berbatasan dengan Kabupaten Garut pada Jumat (26/8) dan di Kecamatan Conggeang yang berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Sabtu (27/8).

Sebelumnya Komisi B DPRD Sumedang, menilai tim pembina dan monitoring agen minyak tanah yang setiap tahun kegiatannya didanai dari APBD, selama ini tidak bekerja maksimal. Buktinya, Sumedang yang dipasok puluhan agen dan ditempati ratusan pangkalan minyak tanah, belakangan ini tak luput turut dilanda kasus kelangkaan serta tingginya harga eceran bahan bakar tersebut.

"Kelangkaan dan tingginya harga eceran minyak tanah yang sekarang terjadi di beberapa wilayah pemasaran pangkalan minyak tanah di Sumedang, menurut saya, antara lain disebabkan karena ku-

rang pengawasan dari tim monitoring. Padahal setiap tahun anggaran, DPRD telah mengkomodasi anggaran untuk kerja tim monitoring itu. Pada tahun anggaran sekarang saja, APBD Sumedang mengalokasikan dana kegiatan tim tersebut, Rp 25 juta," ujar Ending Ahmad Sajidin, seorang anggota Komisi B DPRD Sumedang, kepada "PR", Kamis (25/8).

Ending Ahmad Sajidin, yang juga Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Sumedang, menyebutkan, sebagaimana dijadwalkan komisinya, menyikapi masalah distribusi minyak tanah di daerahnya, Komisi B DPRD Sumedang, Senin ini akan mengundang serta mengadakan dengar pendapat dengan berbagai pihak terkait.

Menyinggung tentang penilaiannya terhadap kinerja tim monitoring minyak tanah tadi, Ending Ahmad Sajidin, mencontohkan, indikasi lemahnya pengawasan, antara lain, terlihat dengan banyaknya pangkalan minyak tanah di Sumedang yang tidak memiliki izin usaha. (A-91)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL <u>AGST</u> SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <u>29</u> 30 31											
HALAMAN : 7										TAHUN 2005	

**Supplying Pertamina**

With economic growth of over 6 percent and a budget deficit of (in the worst case) of only 1 percent in 2005, Indonesia's macroeconomic picture appears very good. I find the ongoing pressure on the currency, in view of the latter, difficult to understand. Further, Indonesia is less dependent on oil imports than all other Asian countries with the exception of Brunei. Yet the currencies of these other countries remain firm against the dollar.

Indonesia remains a net exporter on the energy account, including LNG, so the frequently aired view that it is oil imports which are pressuring the economy makes little sense. This assumes, of course,

that all the dollar proceeds from energy exports are being repatriated. The central bank should be in a position to supply Pertamina directly with all the dollars it needs using the proceeds from energy exports.

The forex market in Indonesia, again without Pertamina's open market transactions, remains relatively small such that central bank intervention should be highly effective in maintaining a currency range, just as in Singapore for instance. Perhaps the missing ingredient is confidence, which requires effective communication with the markets from both the central bank and the government.

Alternatively, and more disturbingly, it would be of concern that undisclosed issues regarding the true situation of

the currency account and currency repatriation are at play.

PHILIP TOWNSEND  
Sanur, Denpasar

73

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 14		TAHUN 2005

# Global oil prices blaze a trail to \$68 on hurricane fears

Agence France-Presse  
London

Oil prices hit a US\$68 high point last week on the back of hurricane weather, threatening crucial Gulf of Mexico oil rigs, and amid lower-than-expected U.S. gasoline stocks.

Tightening supply conditions and fierce global demand, particularly from Asia and the United States, conspired to send oil prices to the record level in New York.

Silver and coffee prices, meanwhile, slumped to multi-month lows.

The Commodities Research Bureau's index of 17 commodities climbed to 319.04 points on Friday from 312 points the previous week.

**Gold:** Gold prices eased while the U.S. dollar gave up just 0.5 percent of its value against the euro last week.

On the London Bullion Market, gold prices fell to \$438.85 per ounce at the late fixing last Friday from \$447.25 the previous week.

**Silver:** Silver prices sank on further evidence that the boom in digital photography has slashed demand for

developing camera films.

On the London Bullion Market, silver prices fell to \$8.845 per ounce at the late fixing on Friday — its lowest level since Feb. 10 — from 6.995 dollars the previous week.

**Platinum and Palladium:** Platinum and palladium prices stabilized.

By Friday, platinum prices rose to \$894 per ounce on the London Platinum and Palladium Market from \$887 the previous week.

Palladium prices stood at \$183.50 per ounce on Friday from \$184.50.

**Base Metals:** Base metals prices mostly gained ground as copper pushed higher.

By Friday, three-month copper prices rose to \$3,608 per ton on the London Metal Exchange from \$3,578 the previous week.

Three-month aluminium prices eased to \$1,893 per ton on Friday from \$1,895. Three-month nickel prices stood at \$14,860 per ton on Friday from \$14,780.

Three-month lead prices climbed to \$875 per ton on Friday from \$853. Three-month zinc prices rose to

\$1,362 per ton on Friday from \$1,353. Three-month tin prices gained to \$7,200 per ton on Friday from \$7,175.

**Oil:** Oil prices struck an all-time high of \$68.00 per barrel in New York as Hurricane Katrina threatened oil rigs on the U.S. Gulf Coast, while lower-than-expected U.S. gasoline (petrol) stocks compounded supply worries.

London's Brent crude meanwhile neared its historic record of \$66.85 set on Aug. 14.

Elsewhere, Nigeria's labor movement warned it would react quickly to protest the country's latest fuel price hike on Friday — raising the prospect of a general strike in Africa's biggest oil exporter as filling stations began raising prices.

Meanwhile, the U.S. Department of Energy said that crude oil supplies increased 1.8 million barrels in the week to Aug. 19 — well above market predictions of a 200,000-barrel rise.

But gasoline reserves dropped sharply by 3.2 million barrels, after a fall of five million barrels the previous week. The figure overshoot

analysts' forecasts of a 900,000-barrel decrease.

By Friday, New York's light sweet crude for October delivery surged to \$67.50 per barrel from \$65.79 the previous week.

In London, Brent North Sea crude for October delivery soared to \$66.04 per barrel from \$63.30.

**Rubber:** Rubber prices stretched on speculative buying.

On TOCOM, Tokyo's commodity exchange, natural rubber for October delivery increased to ¥171.40 on Friday, from ¥161.30 a week earlier.

Singapore's RSS 3 October contract rose to 154.75 U.S. cents on Friday, from 147.75 U.S. cents.

**Cocoa:** Cocoa firmed on rising tensions in Ivory Coast, the world's top producer.

On LIFFE, London's futures exchange, the price of cocoa for December delivery rose to £824 per ton on Friday from £816 a week earlier.

On the CSCE, the New York futures market, the December contract gained to \$1,412 per ton on Friday, from \$1,387.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				13 14 15	16 17 18	19 20	21 22 23	24 25	26 27	28 29 30 31	
HALAMAN: 7											TAHUN 2005

## Solar Mahal, Nelayan Pakai Minyak Tanah

TANGERANG — Ratusan nelayan di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang sudah beberapa tahun ini menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar mesin perahunya. Kondisi itu telah berlangsung semenjak terjadinya krisis moneter terjadi beberapa tahun lalu.

Seorang nelayan setempat Sutra (28), mengaku bahwa menggunakan bahan bakar minyak tanah itu terpaksa karena harga solar yang cukup mahal. Dengan menggunakan minyak tanah, para nelayan bisa menghemat biaya operasional melaut. "Kalau kita pake minyak tanah setidaknya bisa hemat 50 persen

lebih," ujarnya kepada *Republika* Ahad (28/8).

Namun diakuinya, menggunakan minyak tanah bukannya tanpa risiko. Sebab, mesin motor perahunya seharusnya diisi bahan bakar solar, bukan minyak tanah. Kondisi itu dipastikan akan menyebabkan mesin cepat rusak. "Memang kalau kita pake minyak tanah mesin jadi cepet rusak, tapi paling kita hanya mengganti noselnya aja," ujar Sutra. Penggantian nosel itu bisa tiga kali dalam setahun.

Hal senada diungkaplan Aryo (25) dan sejumlah nelayan lainnya. Menurut Aryo, dia sudah lama menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar mesin perahunya. "Hampir semua nelayan di sini menggunakan minyak tanah untuk mesin perahunya," tambahnya. ■ c32

20

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS    DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 9										TAHUN 2005	

# Krisis Minyak Bisa Bangkrutkan Asia

● Ekonomi turun. Inflasi tinggi. Hemat energi harga mati.

## Neraca

Singapura - Perekonomian Asia yang rakus minyak harus segera menempuh strategi baru menghadapi keadaan terburuk akibat krisis minyak. Bencana ekonomi bakal terjadi jika harga minyak mencapai 70 dolar per barel, yang akan membuat ekonomi macet, inflasi tinggi, dan suku bunga besar.

Harga minyak melonjak 67,10 dolar AS per barel pada 12 Agustus 2005, yang merupakan tertinggi selama ini. Untuk sementara, harga sempat turun 64 dolar. Tapi analis mengatakan harga tetap bergejolak akibat permintaan kuat dan pasokan seret.

Dampak kenaikan harga

bervariasi di seluruh kawasan. Perekonomian memang sempat menguat seperti di Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Itu diharapkan akan membantu negara-negara yang lebih miskin di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Presiden Filipina Gloria Arroyo memerintahkan pemerintahannya mengambil langkah drastis berhemat energi. Termasuk pengurangan jumlah kendaraan dalam konvoi mobilnya sendiri. Manila tahun lalu membayar 4,57 miliar dolar AS untuk impor minyaknya. "Jika tak berhemat, kami akan mencapai titik ketika tagihan minyak negara akan mengancam cadangan devisa," kata Menteri Energi Filipina Raphael Lotilla.

Menteri Perencanaan

Ekonomi, Augusto Santos, mengatakan produk domestik bruto tahun ini akan tumbuh 5,1 persen, bukan 5,3 persen, jika harga minyak tetap antara 60 dan 70 dolar. Sementara inflasi akan berkisar antara 5,7 hingga 8,1 persen.

Bagi Thailand, lonjakan harga minyak akan memangkas keuntungan korporat. Karena, para konsumen mengencangkan ikat pinggang mereka, kata kepala riset Macquarie Securities Andrew Stotz.

Para analis lain mengatakan, perekonomian akan menderita karena inflasi lebih tinggi, pertumbuhan produk domestik bruto yang melambat dan neraca berjalan yang melebar dan ketimpangan perdagangan.

Bahkan di Malaysia, peng ekspor minyak mentah, para analis mengatakan Indeks Komposit Kuala Lumpur akan jatuh di bawah batas psikologis 900 poin jika harga mencapai 70 dolar per barel.

Thinktank Malaysia utama bulan lalu memotong prediksi pertumbuhan produk domestik bruto untuk 2005 menjadi 5,1 dari 5,4 persen.

Singapura, yang ekonominya paling maju Asia Tenggara, juga tak bebas dari ancaman. Harga minyak yang tinggi akan memperlambat perekonomian.

Perekonomian Asia Selatan akan terhuyung-huyung akibat harga minyak 70 dolar. Para analis di Pakistan memperingatkan inflasi akan melampaui perkiraan pemerin-

tah pada 8,0 persen tahun ini.

"Hantaman terkeras akan dialami kelompok dengan penghasilan tetap, kelompok menengah dan kaum miskin," kata ekonom Shahid Hasan Siddiqui, yang mengepalai Institut Riset Perbankan dan Keuangan Islam.

Bangladesh, yang memiliki tagihan minyak total 1,5 miliar dolar AS dalam tahun keuangan yang berakhir 30 Juni, mengatakan harga-harga yang meroket telah memberikan sinyal lampu merah pada posisi neraca pembayaran negara itu. Inflasi mendekati 10 persen.

Inflasi rata-rata tahunan Sri Lanka melompat menjadi 12,7 persen bulan ini, naik dari 4,3 persen setahun lalu.

Antara

76

BISNIS & INDUSTRI: INTERNASIONAL



Harga bahan bakar minyak untuk mobil di Kanada untuk pertama kali menembus satu dolar Kanada per liter, atau 3,16 dolar Kanada per galon. Itu memicu pencurian minyak di Provinsi Quebec. (Bloomberg News)

76

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 106		TAHUN 2005

# Khasiat Biji Jarak

Putut Trihusodo

ORANG-orang Pemongkong punya cara sendiri untuk berjalan menembus kepekatan malam. Mereka tidak memerlukan lampu sorot atau lentera minyak untuk mendapat sekadar pelita. Cari biji-biji buah jarak yang kering, tusuk dengan batang bambu dan nyalakan dengan korek. Hasilnya adalah lentera sederhana, cukup terang dan cukup lama pula nyalanya.

Biji jarak gampang diperoleh di Pemongkong. Sejak puluhan tahun silam, petani di desa Lombok Timur itu membudidayakan tanaman bergetah putih itu di atas lahan-lahan kering seputar kampung. Usaha tani itu masih berjalan hingga kini. Dari Desa Pemongkong, setiap tahun rata-rata diperoleh 200 ton biji kering dari 200 hektare kebun jarak mereka. Produk pertanian ini diangkut ke Jawa, diekstrak dan minyaknya dikirim ke sejumlah industri, antara lain kosmetik, obat, sabun, cat, dan kertas.

Di tengah membubungnya harga bahan bakar minyak (BBM), kehadiran biji jarak juga dianggap memberi harapan. Bukan harapan baru, memang, karena sejak zaman pendudukan Jepang, lebih dari 60 tahun silam, pun minyak jarak sudah mengukir reputasi sebagai alternatif minyak diesel. Kini, dengan harga minyak bumi yang membubung hingga US\$ 68 per barel, minyak jarak seperti mendapat momentum untuk unjuk diri.

Para pencinta lingkungan sudah lama mengelu-elukan minyak nabati itu sebagai bahan bakar alternatif. Minyak jarak berasal dari sumber yang terbarukan (*renewable*). Tak seperti

BBM, bahan bakar fosil yang mustahil tercipta kembali dalam waktu dekat. Minyak jarak bisa diproduksi di kebun-kebun atau huma, boleh juga di tanah sawah. Proses produksinya ramah lingkungan. Pohon jarak tumbuh secara alamiah. Proses fotosintesisnya menyerap karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan kadang bercampur gas-gas lain di atmosfer, hingga bisa memberi reaksi balik terhadap efek rumah kaca.

Potensi jarak pagar (*Jatropha curcas*) dan jarak kaliki (*Ricinus communis*) sebagai penghasil bahan bakar minyak sekaligus bahan industri membuat tanaman ini dianggap sebagai komoditas penting di India, dan belakangan Mesir. Kedua pemerintahan ini memberikan dukungan bagi perluasan tanaman jarak, terutama *Jatropha*, dengan terus mengintrodusir teknologi budi daya yang mutakhir. Tujuannya, meningkatkan produksi.

Di daerah Kutch (dulu Gujarat), India, panen buah jarak yang berwarna kuning itu terjadi di musim gugur. Hasilnya bisa mencapai 12 ton per hektare tiap tahun,

di lahan berpengairan. Namun rata-rata panen mereka lima ton biji kering untuk tanah tak beririgasi. Setelah digilas, biji jarak lima ton itu memberikan 1,6 ton minyak. Angka ini jauh melampaui produktivitas petani Pemongkong yang cuma bisa menghasilkan satu ton biji kering per hektare tiap tahun. Produk minyaknya 300 kg.

Produktivitas tinggi itu suatu tuntutan yang hampir mutlak agar budi daya jarak untuk energi bisa mencapai ambang ekonominya. Bibit yang ditanam harus galur unggul supaya volume produksinya besar dan rendemennya tinggi. Dr. Agus Rusyana Hoetman dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pernah menghitung ongkos produksinya. Jika harga bijinya Rp 800 per kg, biaya produksi minyak jarak dalam versi optimistis Rp 3.000 per kg.

Saat ini, harga biji jarak cukup tinggi, Rp 1.500 per kg. Harga minyaknya boleh jadi sekitar Rp 5.000 per kg. Bila dilakukan budi daya yang intensif, biaya produksi per satuan berat dan harga di pasaran bisa ditekan. Dengan harga Rp 5.000 per kg pun, sebenarnya sudah cukup bersaing dengan solar untuk industri yang harganya kini Rp 4.000 per liter —ini pun masih mengandung subsidi.

Untuk menghasilkan minyak jarak yang siap pakai

sebagai pengganti minyak diesel atau solar, tak diperlukan pengolahan terlalu rumit. Cukup dikerjakan industri kecil dengan investasi Rp 1 milyar saja untuk kapasitas 10 ton biji. Proses mengubah minyak jarak menjadi biodiesel hanya melalui tahap reaksi kimia sederhana, dengan menambahkan alkohol dan katalisator, antara lain natrium hidroksida (NaOH).

Tidak cuma harganya yang mampu bersaing. Mutunya pun tak mengecewakan. Hasil pengujian di India menunjukkan, biodiesel itu punya nilai cetane 51, lebih tinggi dari solar yang cetananya 50. Kalorinya pun tak terpaut banyak. Sekitar 10.1770 k.cal per kg untuk

solar dan 9.470 k.cal per kg pada minyak jarak. Mesin diesel yang ada sekarang tak memerlukan modifikasi apa pun untuk mengonsumsi biodiesel dengan aman.

Sebagai negeri agraris berpenduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, Indonesia sepatutnya cepat menyiapkan bahan bakar alternatif. Tak ada jaminan bahwa harga minyak internasional akan turun. Kita tahu, India dan Cina adalah dua raksasa yang ekonominya sedang menggeliat bangkit, hal yang membuat permintaan BBM di pasar dunia meningkat cepat dari tahun ke tahun.

Indonesia kini menjadi negeri importir minyak. Mungkin saja defisitnya akan makin besar pada tahun-tahun mendatang. Beban subsidi BBM akan makin berat. Lantas, mengapa kita harus fanatik menggunakan bahan bakar fosil bila minyak hayati cukup kompetitif. Paling tidak, kita bisa memulainya dengan biodiesel lebih dulu. ☺



MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA			<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS			<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI			<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 109												TAHUN 2005																		

## Denda Kahara Membengkak

PT Pertamina kukuh, tidak mau tunduk pada putusan Arbitrase Internasional yang menghukum membayar denda US\$ 261 juta kepada Karaha Bodas Company. Akibatnya, denda yang seharusnya dibayarkan lima tahun lalu itu kini sudah membengkak menjadi US\$ 307 oleh bunga.

Denda itu, menurut Direktur Utama PT Pertamina, Widya Purnama, tidak masuk akal dan tak layak dibayar. Sebab, proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Bukit Karaha dan di Bukit Telaga Bodas, Garut, Jawa Barat, yang digarap Karaha Bodas Company itu gagal total. "Pertamina hanya akan mengembalikan nilai aset mereka (Karaha Bodas) sebesar US\$ 50 juta," ujar Widya tegas.

Pemerintah kini tengah menempuh upaya hukum agar denda yang harus dibayarkan tidak terlalu besar. Rabu pekan lalu pengadilan banding Singapura memenangkan gugatan Pertamina terhadap Karaha Bodas Company, yang menahan aset Pertamina di Singapura. Kasus ini meru-

pakan salah satu buntut dari batalnya proyek PLTP di Garut itu. Karaha Bodas dihukum membayar ganti rugi. "Besarnya akan dihitung kemudian," kata juru bicara Pertamina, Mochammad Harun. Karaha Bodas juga dihukum membayar biaya persidangan.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS                                      DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 108										TAHUN 2005	

### Industri Boleh Impor BBM

HARGA BBM untuk industri terus melejit. Pengusaha menjerit. Mereka meminta diperbolehkan mengimpor

BBM langsung atau tanpa melalui PT Pertamina. Cara ini, menurut Ketua Pengusaha Indonesia Djimanto, bisa menekan biaya produksi. Contohnya, harga solar dari Singapura cuma Rp 4.500 per liter. Di Riau, Pertamina melegonya dengan Rp 5.480 per liter.

Menteri Perindustrian Andung Nitimiharja menyetujui permintaan itu. Sudah ada beberapa pengusaha yang menghubungi dirinya untuk mempertanyakan adanya kemungkinan mengimpor BBM langsung. "Sesuai dengan peraturan, hal itu (industri

mengimpor langsung) diperbolehkan. Berapa pun jumlahnya," kata dia.

Namun tidak demikian menurut Manajer Pemasaran Industri Muhamad Sadji, hingga saat ini belum ada pihak yang berhak mengimpor BBM selain Pertamina. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8/1971 tentang Pertamina. Hak tunggal perusahaan pelat merah ini baru berakhir pada November mendatang, mengacu pada UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input checked="" type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 72 - 73											TAHUN 2005

Perbuatan Melawan Hukum

# Mayat Hidup Menantang Raksasa Minyak

Conoco Philips, perusahaan minyak besar asal Amerika Serikat, diseret ke pengadilan karena dianggap memutus kontrak dengan semena-mena. Aset-asetnya juga terancam disita.

Ariyanto, Pringgo Sanyoto, dan Ahmad Pahingguan

PERUSAHAAN perminyakan terbesar ketiga di Amerika Serikat tersangkut perkara di Indonesia. Conoco Phillips yang dulunya bernama Gulf Resource Ramba itu dituntut membayar ganti rugi sebesar US\$ 27,18 juta dan Rp 4 miliar atau sekitar Rp 274,18 miliar. Aset-aset perusahaan yang beroperasi di 40 negara dan salah satu rekanan besar BP Migas itu juga terancam disita pengadilan.

Menariknya, tuntutan besar itu melayang dari sebuah perusahaan yang sudah pailit alias bangkrut. Adalah Randy Rizaldy, kurator PT Saptasarana Personaprima, yang melayangkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Kami akhirnya dijatuhi vonis pailit oleh pengadilan gara-gara batalnya proyek itu," tulis Randy dalam gugatan yang didaftarkan awal Agustus lalu.

Terseretnya raksasa minyak dari Negeri Abang Sam itu ber-

mula dari perjanjian kerja sama yang ditekennya bersama PT Saptasarana Personaprima. Awalnya, Conoco menunjuk rekan bisnis asal Indonesia itu untuk mengelola alat-alat pengeboran alias *rig management services*. Namun, agaknya kerja sama itu tak berjalan mulus. Conoco dianggap sering mengubah spesifikasi yang sebelumnya telah disepakati oleh Saptasarana.

Misalnya, Conoco mengubah waktu berlakunya kontrak yang semula Agustus 2001 menjadi 24 Oktober 2001. Selain itu, pada 13 Februari 2002, ada lagi perubahan ukuran alat bor yang sebelumnya 250 HP menjadi 500 HP. Paling akhir, perusahaan perminyakan yang salah satu basis operasinya berada di Aceh itu mengubah pesanan *rig* dari tiga buah menjadi dua. Revisi itu tercatat pada 5 April 2002.

Tentu saja perubahan-perubahan itu membuat pengiriman *rig* meleset dari jadwal yang ditentukan oleh Conoco. Akibatnya fatal. Keterlambatan pengiriman itu berbuah pemutusan kontrak. Bukan hanya itu, Conoco juga tidak membayar tagihan yang diajukan oleh Saptasarana dan sebaliknya malah menajutuhkannya denda kepada kontraktornya itu. Buntutnya, Saptasarana tak kuasa melunasi utang ke salah satu kreditornya sehingga divonis pailit alias bangkrut oleh pengadilan.

Diperlakukan begitu, Saptasarana jelas tidak terima. Di mata Randy, pembatalan kontrak itu merupakan perbuatan melawan hukum. Conoco juga dianggap telah melawan hukum dengan mengalihkan pekerjaan yang semula dikerjakan oleh Saptasarana kepada pihak lain. Padahal jika menengok ke bela-

kang, Saptasarana telah mengeluarkan upaya yang tak sedikit untuk mendapatkan pekerjaan itu. Apalagi, dalam perjanjian disebutkan bahwa Saptasarana berhak memperoleh pekerjaan yang mirip dari kontraktor lainnya. Namun, alih-alih mendapat proyek lain, yang sudah ada saja malah diputus dan diselesaikan oleh orang lain.

Lewat gugatannya itu, Saptasarana juga menolak jika dikatakan telah terlambat mengirimkan pesanan. Soalnya, perjanjian tersebut tidak mengatur ataupun memberikan waktu pelaksanaan pekerjaan. Perjanjian antara Conoco dan Saptasarana hanya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, Saptasarana selaku penerima pekerjaan harus menyesuaikan dengan standar tertinggi dan hukum setempat yang berlaku.

Standar internasional dalam pengiriman *rig* umumnya membutuhkan waktu beberapa bulan. Organisasi broker *rig* in-

ternasional alias *International Drilling Rig* menyatakan bahwa pengiriman memakan waktu sekurang-kurangnya empat bulan sejak tanggal pemesanan. Kenyataannya, tulis Randy dalam gugatannya, pihaknya akan mengirimkan pesanan lebih cepat dari standar internasional itu, yakni hanya dalam waktu satu bulan.

Berpijak pada hal itu, Saptasarana yang bisa diibaratkan sebagai mayat hidup ini menuntut agar aset-aset Conoco disita. Untuk itu, Conoco mesti membayar ganti rugi sebesar US\$ 27,18 juta dan Rp 4,02 miliar. Kerugian itu timbul akibat ongkos yang telah dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Selain itu, kerugian itu juga timbul akibat kehilangan keuntungan serta beban bunga yang mesti ditanggung. "Sebagai perusahaan kontraktor yang tepercaya, nama baik kami telah tercemar," tulis penggugat di salah satu bagian gugatannya.

Sementara, T. Iskandar Machmud, *External Communication* Conoco Phillips, mengatakan bahwa pihaknya belum tahu jika ada gugatan yang dilayangkan oleh bekas rekan bisnisnya itu. Namun, Iskandar membenarkan bahwa perusahaannya memang pernah menjalin kerja sama dengan Saptasarana pada tahun 2001. Kontrak tersebut untuk mengerjakan proyek eksplorasi milik Conoco Phillips. Proyek yang merupakan bagi hasil dengan BP Migas itu berlokasi di Kepulauan Natuna dan Jambi.

Sayangnya, Iskandar belum bersedia memberikan keterangan ihwal pengakhiran kerja sama perusahaannya dengan Saptasarana. Dia juga enggan menanggapi tuntutan yang dilayangkan oleh perusahaan kontraktor tersebut. "Untuk masalah itu kami tidak bisa berkomentar dulu, karena kami harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat di Amerika," ujarnya. □



CONOCOPHILLIPS.COM

CONOCO DI TUNTUT RP 274 MILIAR

## PEDAGANG TUA DARI UTAH

IBARAT gurita raksasa, jaringan bisnis Conoco Phillips—perusahaan minyak yang bermarkas di Amerika itu—menyebar ke segala penjuru dunia. Seperti tertera dalam situs resminya, Conoco mengklaim sebagai perusahaan *refiner* alias pengilangan terbesar di Negeri Abang Sam. Sedangkan di dunia, perusahaan "tua" itu menduduki posisi terbesar kelima dan memiliki usaha di lebih dari 40 negara. Saat ini, sedikitnya 36,1 ribu orang menggantungkan nasibnya di perusahaan yang beraset US\$ 97 miliar itu.

Sejatinya, Conoco Phillips adalah jemaan dua perusahaan minyak yang sudah berumur cukup tua, salah satunya adalah Conoco Inc. Perusahaan ini lahir 25 November 1875 dan memiliki nama

the Continental Oil and Transportation Company. Di kota kelahirannya, Ogden, Utah, Amerika Serikat, perusahaan itu tercatat sebagai pihak yang pertama kali menjajakan minyak. Ketika itu Ogden adalah kota yang masih menggunakan lilin sebagai sumber penerang utama.

Awalnya, dengan menggunakan dua tangki yang diangkut kereta kuda, Isaac Elder Blake (pendiri the Continental Oil and Transportation Company) keluar masuk kota untuk memasarkan dagangannya. Perjuangan berat itu membuahkan hasil. 20 tahun kemudian perusahaan tersebut telah memiliki lebih dari seribu stasiun pengisian minyak yang tersebar di 15 kota.

Pada tahun 1928, perusahaan itu

berubah nama menjadi Continental Oil Company setelah bergabung dengan Marland Oil, perusahaan perminyakan yang sudah memiliki sumur minyak di India ketika itu. Sejak itulah nama Conoco dikenal dan laju bisnisnya kian kencang. Setelah Perang Dunia II berakhir, perusahaan tersebut bahkan telah menggurita ke Dubai, Jerman Barat, Austria, Belgia, Luxemburg, dan the Inggris.

Pada akhir Agustus 2002 Conoco bergabung dengan Phillips Petroleum Company, perusahaan minyak yang lahir tahun 1905 dan mengantongi sejumlah hak paten atas sejumlah penemuan penting di bidang perminyakan. Saat ini, duet itu mengeksplorasi dan menyedot hampir di seluruh belahan dunia. Sementara di Indonesia, Conoco memiliki ladang eksplorasi mulai dari Aceh hingga ke Belanak, Laut Cina Selatan. □

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input checked="" type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI																												
		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2005																			

**NAIKKAN HARGA BBM SEGERA!**

Setelah harga minyak dunia terus meningkat hingga US\$ 66 per barel, pemerintah Indonesia masih saja kebingungan dalam bersikap. Pemerintah melenakan masyarakat dengan mempertahankan pola subsidi BBM. Ujung-ujungnya, orang Indonesia menjadi manja dan merasa bahwa BBM adalah sumber daya yang tak akan pernah habis. Akibatnya, kita menjadi sangat boros.

Pemerintah pun tak pernah berpikir mau membuat perumahan (*flat*) buat warga kelas menengah ke bawah di tengah kota. Mungkin mereka berpikir, biarkan saja perumahan kelas menengah ke bawah berada jauh di pinggiran. Kalau penghuninya mau bekerja ke kota, pakai

saja kendaraan bermotor. Toh, harga BBM murah. Akhirnya, kebanyakan orang kini punya rumah jauh di pinggiran dan menjadi sangat tergantung pada BBM.

BBM yang murah juga mendorong pemakaian kendaraan umum secara gila-gilaan. Sebaliknya, angkutan umum menjadi berantakan. Lebih parahnya lagi, energi alternatif tidak berkembang.

Kini, pemerintah mengatakan akan menaikkan BBM di sekitar awal tahun 2006. Gara-gara pernyataan itu, muncul penimbunan BBM. Minyak menjadi langka dan harga barang-barang lantas bergerak naik. Padahal, harga BBM-nya sendiri belum naik.

Makanya, pemerintah mesti tegas. Hapuskan subsidi BBM agar masyarakat kita tidak manja lalu menjadi bangsa tempe.

**Ferry Rahman**

*Jalan Rawamangun Muka I  
Jakarta Timur*